LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MUARA SABAK, 2017

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah, kita semua telah dapat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur selama hampir lima tahun. Selama itu pula kami bersama DPRD dan segenap SKPD serta komponen yang terkait telah dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung yang sama-sama kita cintai ini. Tentu belum banyak prestasi yang ditoreh, namun kebijakan dan "road map" yang disusun sudah berada dijalur yang tepat, sehingga kita tetap optimis, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, Insya Allah akan tercapai.

Memenuhi amanat ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, serta memenuhi komitmen akuntabilitas satu tahun masa jabatan selaku Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2016-2021, maka dengan ini disampaikan dokumen mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah keberhasilan bersama dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat, dibawah koordinasi dan arahan Kepala Daerah.

Semoga dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini, akan semakin memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap seluruh upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok yang didukung DPRD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur. Prestasi kinerja yang diperoleh tidak lepas dari perkenan dan hidayah Allah SWT yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah. Sebaliknya kinerja program pembangunan daerah yang belum terealisasi secara optimal, dipengaruhi oleh faktor internal di pemerintah disamping tentunya faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta para pihak dan masyarakat yang telah turut serta memajukan pantai timur Jambi Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini.

Wabillahitaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ **i**
DAFTAR ISI ____ **ii**
DAFTAR TABEL ____ **iv**
DAFTAR GAMBAR ____ **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. LatarBelakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Maksud Dan Tujuan 3
1.4. Gambaran Umum Daerah 3
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah 3
1.4.2. Kondisi Demografis 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi 6
1.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi 7
1.4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 8
1.4.3.3. Struktur Ekonomi 10
1.4.3.4. PDRB per kapita 10
1.4.3.5. Indeks Gini (Gini Ratio) 12
1.4.3.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan 13
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH **16**
2.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 17
2.2. Prioritas Dan Pembangunan Tahun 2016 23
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH **31**
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 31
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 31
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan 33
3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah 34
3.1.2.2. Pendapatan Dana Perimbangan 37
3.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 39
3.1.2.4. Pembiayaan 40
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah 41
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah 41
3.2.2. Target dan Realisai Belanja 42
3.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung 43
3.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung 45
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH **52**
4.1. Dinas Pendidikan 52
4.2. Dinas Kesehatan 57
4.3. RSUD Nurdin Hamzah 65
4.4. Dinas Pekerjaan Umum 69
4.5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan 72
4.6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 74
4.7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 78
4.8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 82
4.9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 88
4.10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 91
4.11. Kantor Ketahanan Pangan 95
4.12. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup 99

4.13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 105
4.14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD/K) 105
4.15. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 108
4.16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 111
4.17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 115
4.18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga 120
4.19. Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data 124
4.20. Dinas Kelautan dan Perikanan 127
4.21. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 132
4.22. Dinas Peternakan 136
4.23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 139
4.24. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 141
4.25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 144
4.26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 148
4.27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 151
4.28. Inspektorat 156
4.29. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 159
4.30. Badan Kepegawaian Daerah 162
4.31. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah 165
4.32. Sekretariat Daerah 167
4.33. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia 172
4.34. Sekretariat DPRD 173
4.35. Kecamatan 175

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 180
5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima 181
5.1.1. Dasar Hukum 181
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 181
5.1.3. Satuan Kerja Pelaksana 181
5.1.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya 181
5.1.4.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 181
5.1.4.2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 183
5.2. Bantuan Keuangan Yang Diberikan 183

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH 185
6.1. Kerjasama Antar Daerah 185
6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 186
6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah 190
6.4. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 193
6.5. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 196

BAB VII PENUTUP 198

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2014 dan 2015 6
Tabel 1.3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015 8
Tabel. 2.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 19
Tabel 2.2 Prioritas Pembangunan Daerah 24
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 33
Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015–2016* 34
Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 35
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016 35
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016 36
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016 37
Tabel 3.7. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2015–2016* 38
Tabel 3.8. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 39
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2016 40
Tabel 3.10. Perkembangan Pembiayaan Periode 2016 41
Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 42
Tabel 3.12. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 43
Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 44
Tabel 3.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 45
Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 46
Tabel 3.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 47
Tabel 4.1. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016 53
Tabel 4.2. Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 55
Tabel 4.3. Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 56
Tabel 4.4. Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016 56
Tabel 4.5. capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016 56

Tabel 4.6. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016 58
Tabel 4.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 63
Tabel 4.8. Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 64
Tabel 4.9. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2016 66
Tabel 4.10. Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2015-2016 67
Tabel 4.11. Jumlah Pasien Perbulan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2015-2016 68
Tabel 4.12. Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2015-2016 68
Tabel 4.13. Data Efisiensi Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2016 68
Tabel 4.14. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 70
Tabel 4.15. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016 71
Tabel 4.16. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2016 73
Tabel 4.17. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2016 75
Tabel 4.18. Kegiatan Penertiban Tahun 2016 76
Tabel 4.19. Kegiatan Pengamanan 2016 76
Tabel 4.20. Penegakan Perda 2016 77
Tabel 4.21. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Tahun Anggaran 2016 78
Tabel.4.22. Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Parpol TA. 2016 80
Tabel 4.23. Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpollinmas Tahun 2016 80
Tabel 4.24. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 83
Tabel 4.25. Capaian Kinerja Dinas Sosnakertrans berdasarkan Urusan Wajib Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2016 86
Tabel 4.26. Capaian Kinerja Dinas Sosnakertrans berdasarkan Urusan Pilihan Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2016 87
Tabel 4.27. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016 89
Tabel 4.28. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016 92
Tabel 4.29. Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sampai dengan Tahun 2016 94
Tabel 4.30. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Ketahanan PanganTahun Anggaran 2016 96

Tabel 4.31. Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH) 96
Tabel 4.32. Jumlah Alokasi Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (keadaan s/d Desember 2016) 97
Tabel 4.33. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun Anggaran 2016 100
Tabel 4.34. Hasil Pemantauan kualitas air rata-rata pertahun 102
Tabel 4.35. Jumlah Perusahaan yang memiliki izin pengumpul limbah 83 dan IPAL di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 103
Tabel 4.36. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2016 105
Tabel 4.37. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2016 106
Tabel 4.38. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaTahun Anggaran 2016 109
Tabel 4.39. Capaian Sektor Perhubungan sampai dengan Tahun 2016 111
Tabel 4.40. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2016 112
Tabel 4.41. Jumlah KUD dan Non KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 114
Tabel 4.42. Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016 114
Tabel 4.43. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2016 116
Tabel 4.44. Jumlah Izin yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016 117
Tabel 4.45. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik Tahun 2016 119
Tabel 4.46. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2016 121
Tabel 4.47. Jumlah Seni dan Budaya Tahun 2016 123
Tabel 4.48. Situs dan Cagar Budaya yang ada dikabupaten tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2016 124
Tabel 4.49. Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2016 124
Tabel 4.50. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data Tahun Anggaran 2016 125
Tabel 4.51. Jumlah Sarana dan IKM Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data Tahun 2016 127
Tabel 4.52. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 128
Tabel 4.53. Jumlah Bantuan Kapal Nelayan (Pompong) kepada masyarakat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 129
Tabel 4.54. Jumlah Produksi Ikan Menurut Sub sektor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 131

Tabel 4.55. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggran Dinas Pertanian TP Tahun Anggaran 2016 133
Tabel 4.56. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016 135
Tabel 4.57. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Peternakan Tahun Anggaran 2016 136
Tabel 5.58. Populasi Ternak Perkecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 138
Tabel 4.59. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 139
Tabel 4.60. Jumlah Penyuluh dan Status Penyuluh per Kecamatan Tahun 2016 141
Tabel 4.61. Jumlah Bidang Penyuluhan Tahun 2016 141
Tabel 4.62. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2016 142
Tabel 4.63. Bantuan Bibit Perkebunan untuk Masyarakat 143
Tabel 4.64. Luas Hutan menurut Kawasan 143
Tabel 4.65. Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan 144
Tabel 4.66. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan 144
Tabel 4.67. Produktifitas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan 144
Tabel 4.68. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016 145
Tabel 4.69. Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Ketenagalistrikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 – 2016 147
Tabel 4.70. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2016 149
Tabel 4.71. Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 150
Tabel 4.72. Jumlah, Kondisi, Jenis dan Kepemilikan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 150
Tabel 4.73. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2016 152
Tabel 4.74. Jumlah Pengguna Jaringan E-Government s/d Tahun 2016 154
Tabel 4.75. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 155
Tabel 4.76. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2016 157
Tabel 4.77. Target dan Realisasi Pemeriksaan Internal dan Review, 2016 158
Tabel 4.78. Total Temuan Hail Audit Pemeriksaan Tahun 2011-2016 158
Tabel 4.79. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 160
Tabel 4.80. Dana transper dan bantuan keuangan tahun 2016 161
Tabel 4.81. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016 162

Tabel 4.82 Komposisi Aparatur Negara Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 164
Tabel 4.83 Capaian Kinerja tahun 2016 164
Tabel 4.84. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2016 166
Tabel 4.85. Capaian Kinerja Kantor Penelititan dan Pengembangan Daerah Tahun 2016 167
Tabel 4.86. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2016 168
Tabel 4.87. Jumlah produk hukum yang dihasilkan Tahun 2016 171
Tabel 4.88. Penyelesaian Sengketa Lahan 172
Tabel 4.89. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2016 173
Tabel 4.90. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2016 174
TabeL 4.91. Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2016 175
Tabel 4.92. Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 176
Tabel 4.93. Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Tahun 2016 177
Tabel 4.94. Target dan Realisasi PDRD 10 Kecamatan Tahun 2016 179
Tabel 5.1. ADD Dan Dana Desa Tahun 2016 184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Luas Wilayah per kecamatan (%) 5
Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 7
Gambar 1.3. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2011-2015 9
Gambar 1.4. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2011-2015 9
Gambar 1.5. Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 10
Gambar 1.6. PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 11
Gambar 1.7. Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015 (persen) 12
Gambar 1.8. Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 13
Gambar 1.9. Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015 14
Gambar 1.10. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015 15
Gambar 4.1 Perkembangan Harga Komoditi Pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 97
Gambar 4.2. Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 97
Gambar 4.3. Perkembangan Harga Bahan Pangan Hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 98

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar hukum tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangan lainnya yang diperlukan; gambaran umum daerah yang terdiri dari kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, dan kondisi ekonomi yang terdiri dari potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB.

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sistem daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Hak dan kewajiban tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan kepada publik melalui instrumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ini, dijelaskan bahwa dokumen LPKJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2016 ini sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 disusun untuk :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
2. Memberikan gambaran sejauh mana perencanaan program dapat dilaksanakan, tingkat capaian keberhasilan serta manfaatnya.
3. Sebagai evaluasi atas kinerja Bupati selama menjalankan tugas jabatan periode tahun 2016.

1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (*Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999*). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km^2 dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Jambi atau seluas ± 10,2 persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

tahun 2011 – 2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah *Hinterland* segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura – Batam – Johor (Sibajo).

Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Secara geografis keberadaannya terletak antara 0°53´ Lintang Selatan sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km^2 dan luas perairan (laut) ± 3.560,09 km^2 yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah	Luas Kecamatan	
		Kelurahan	Desa	Km^2	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478.17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
	JUMLAH	**20**	**73**	**5.445,00**	**100,00**

Sumber : Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, 2016

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan.

Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

Berikut diagram pie dari luas wilayah per kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 1.1.
Luas Wilayah per kecamatan (%)

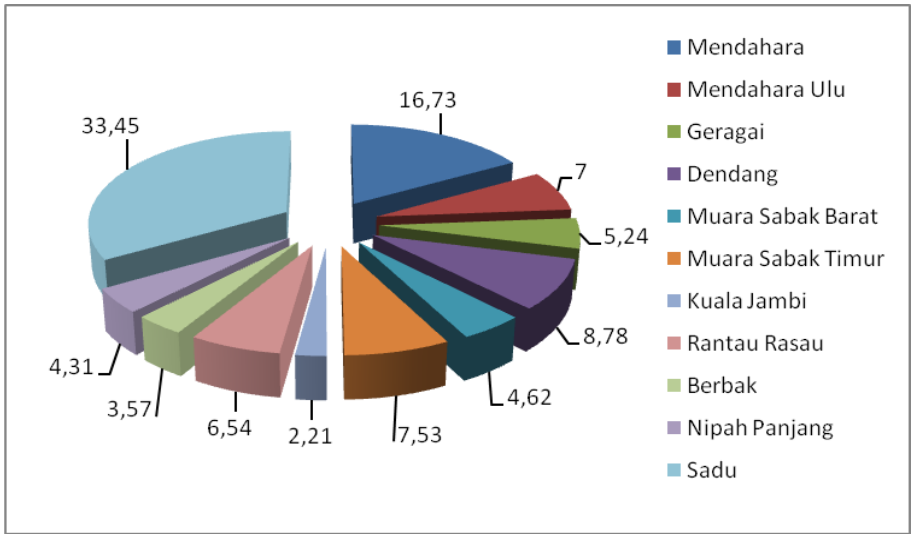

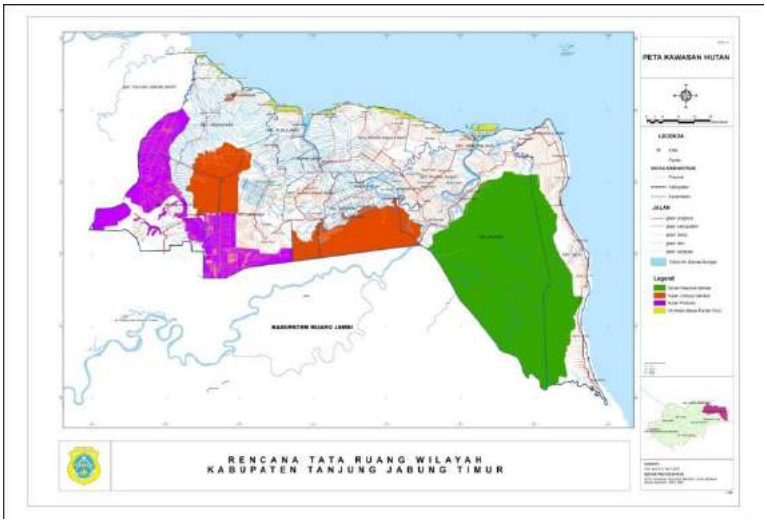

Topografi wilayah ; dataran rendah, rawa-rawa, dengan ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut. Jenis tanah : rawa bergambut, cocok untuk tanaman padi dan holtikultura lain; alluvial untuk holtikultural dan perkebunan; dan prozolik merah kuning (PMK) juga cocok untuk perkebunan. Sekitar 37,45% (203.921 ha) luas daratan kabupaten ini merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, tahura, dan kawasan TNB yang luasnya mencapai 116.605 ha. Luas kawasan budidaya pertanian dan non pertanian : 340.579 ha (62,55 %).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan

2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

1.4.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 bertambah sebanyak 8.497 jiwa dari 213.670 jiwa pada tahun 2015 menjadi 222.167 jiwa pada tahun 2016 atau dengan pertumbuhan 3,98 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2016 sebesar 40,80 jiwa/km^2 dan sex ratio 105.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2014 dan 2015

Kecamatan	2015					2016*				
	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km2)	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km2)
Mendahara	13.306	12.747	26.053	104	28,59	13.598	12.925	26.523	105	29,11
Mendahara Ulu	9.001	7.932	16.933	113	44,41	8.282	7.641	15.923	108	41,76
Geragai	11.965	10.483	22.448	114	78,67	12.601	11.648	24.249	108	84,98
Dendang	7.641	7.354	14.995	104	31,36	8.380	8.020	16.400	104	34,30
Sabak Barat	8.682	8.204	16.886	106	67,07	9.603	9.189	18.792	105	74,65
Sabak Timur	15.710	15.507	31.217	101	76,09	16.155	15.638	31.793	103	77,49
Kuala Jambi	7.314	7.103	14.417	103	119,62	7.671	7.166	14.837	107	123,11
Rantau Rasau	11.857	11.287	23.144	105	64,99	12.342	11.712	24.054	105	67,54
Berbak	5.061	4.817	9.878	105	50,80	5.364	4.919	10.283	109	52,88
Nipah	12.906	12.603	25.509	102	108,69	13.429	12.992	26.421	103	112,57
Sadu	6.275	5.915	12.190	106	6,69	6.600	6.292	12.892	105	7,08
Jumlah	**109.718**	**103.952**	**213.670**	**106**	**39,24**	**114.025**	**108.142**	**222.167**	**105**	**40,80**

**) Angka sementara*
Sumber : Dukcapil Tanjung Jabung Timur

1.4.3. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2016 ini akan menggunakan indikator ekonomi makro seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar tahun 2010. Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : pertumbuhan

ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

1.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2015 mencapai 1,87 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,81 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan sebesar 13,43 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori Pertambangan dan Penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. , hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur mengingat kontribusi kategori pertambangan dan penggalian yang sebesar 52,59 persen. Jika tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian, pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 adalah sebesar 6,56 persen.

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2015

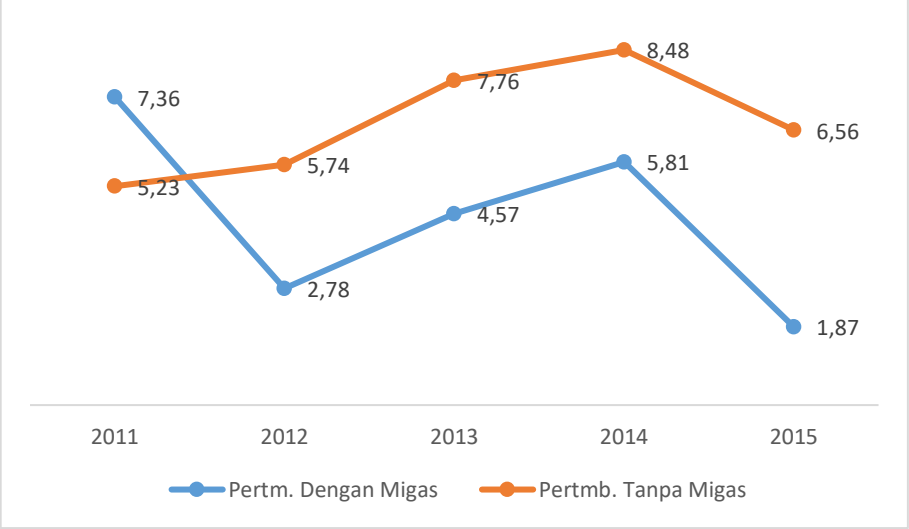

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Sedangkan besaran kontribusi kategori lain dalam pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur sebagai berikut kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,11 persen, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,57 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 9,39 persen, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,09 persen,

kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,83 persen, kategori Jasa Lainnya sebesar 6,78 persen, kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,05 persen, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,62 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 5,02 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 4,53 persen, kategori Real Estate sebesar 4,17 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,62 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,23 persen, kategori industri Pengolahan sebesar 2,68 persen, serta kategori Konstruksi sebesar 2,66 persen.

Tabel 1.4.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2011–2015

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,21	4,52	5,14	9,67	5,62
2.	Pertambangan dan Penggalian	8,60	0,21	2,42	5,35	(0,42)
3.	Industri Pengolahan	5,49	18,09	10,90	(0,70)	2,68
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	11,53	13,77	6,43	7,09
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,13	1,28	0,25	2,85	4,53
6.	Konstruksi	5,03	10,37	24,09	4,40	2,66
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,74	7,84	10,18	11,56	13,11
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,13	5,82	8,84	7,83	3,62
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,59	6,33	7,50	16,19	9,57
10.	Informasi dan Komunikasi	7,41	5,08	5,57	10,46	6,05
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14,01	10,44	9,95	5,93	3,23
12.	Real Estate	6,58	4,54	5,45	1,70	4,17
13.	Jasa Perusahaan	2,97	3,61	1,66	5,38	6,83
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	2,59	3,21	12,29	9,39
15.	Jasa Pendidikan	3,21	3,21	3,97	2,46	5,02
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,00	4,04	9,24	15,26	13,43
17.	Jasa lainnya	3,17	3,18	4,67	5,45	6,78
Laju Pertumbuhan		**7,36**	**2,78**	**4,57**	**5,81**	**1,87**

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

1.4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (current price) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang

dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi . PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2015 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2015 Mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2014 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2015 tetap mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2015 dengan migas yaitu sebesar Rp 17.786.297,57 juta dan tanpa migas sebesar Rp 7.269.765,94 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 15.840.297,64 juta dan tanpa migas sebesar Rp 5.185.197,11 juta.

Gambar 1.3.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas
Tahun 2011-2015

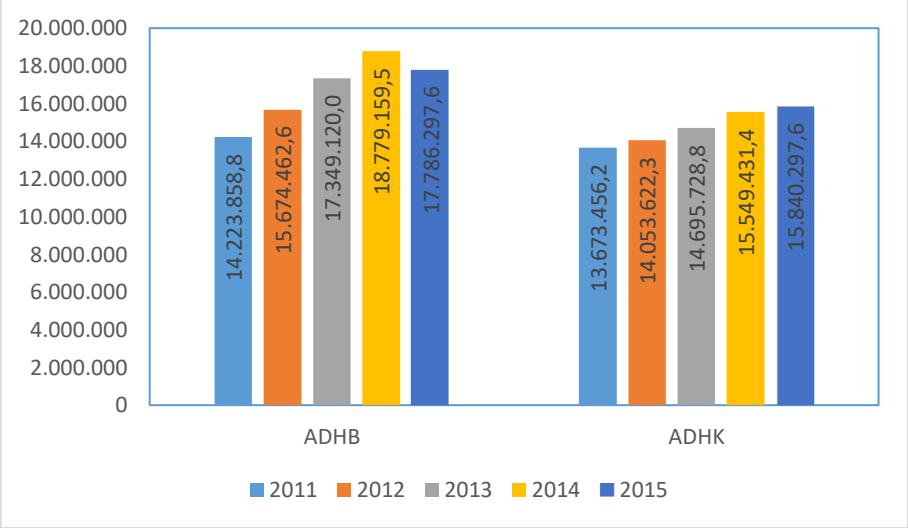

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.4.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas
Tahun 2011-2015

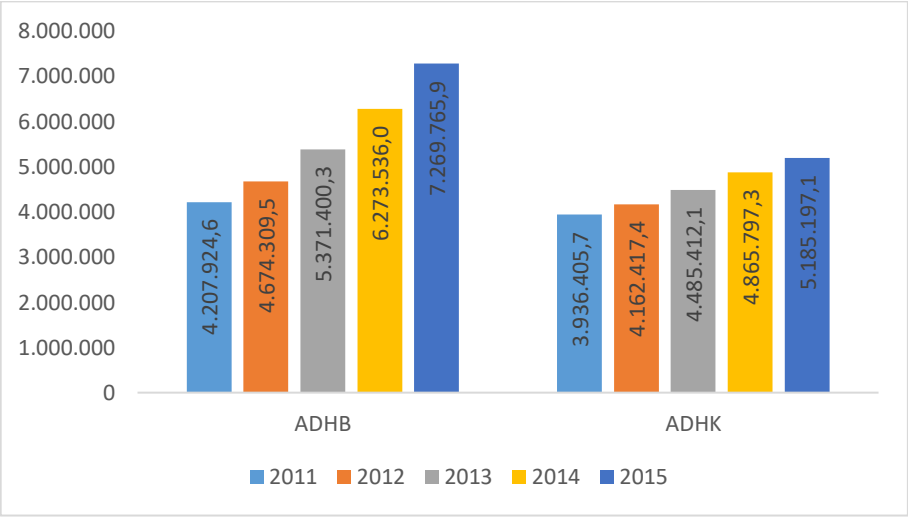

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha. Di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sektor pengalian dan pertambangan masih mendominasi dalam kontribusi struktur eknomi.

1.4.3.3. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2015 struktur ekonomi masih berbasis pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencatat sebesar 52,59 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,13 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 8,12 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,86 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,03 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 1.5.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur
Tahun 2015

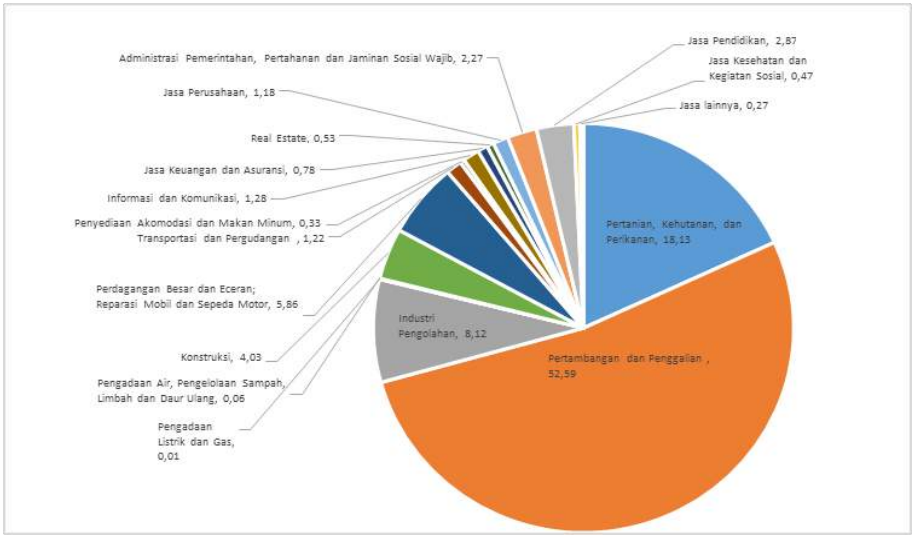

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

1.4.3.4. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat

tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 PDRB Perkapita ADHB mengalami penurunan. Sedangkan PDRB Perkapita ADHK periode 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar Rp. 83.241.904 pertahun atau sebesar Rp. 6.936.825 perbulan mengalami penurunan sebesar *minus* 5,99 persen dari tahun 2014. Sementara PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2015 Rp. 74.134.402 pertahun atau Rp. 6.177.867 perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 1,87 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 1.6.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2015

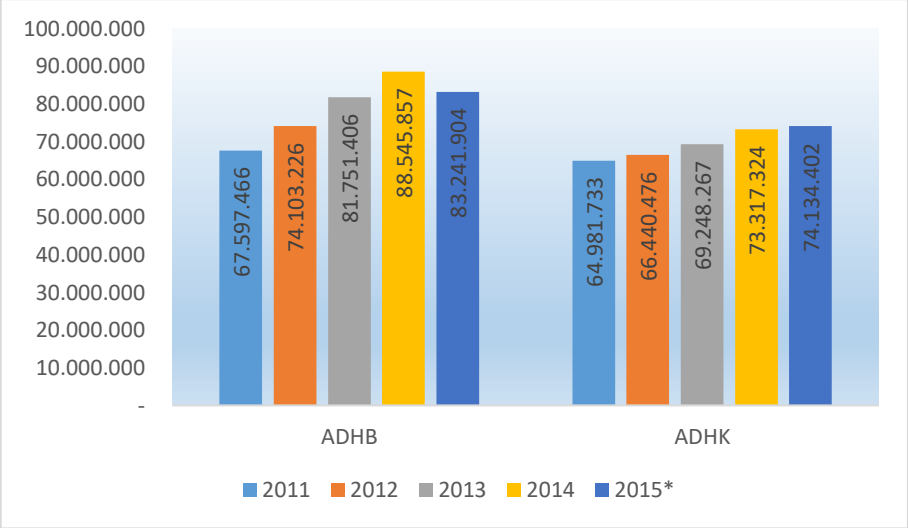

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 1.7.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2011-2015 (persen)

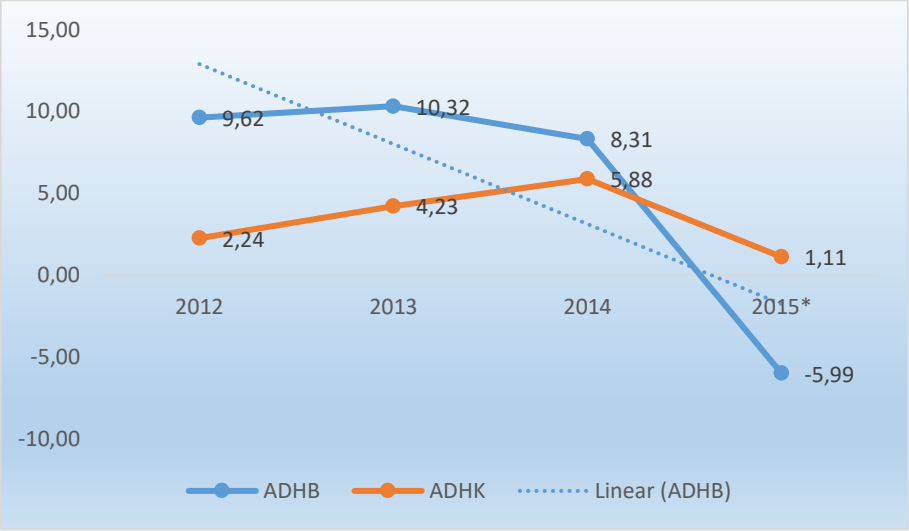

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

1.4.3.5. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 menunjukkan angka yang Fluktuatif dan cenderung menurun mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini pada tahun 2011 sebesar 0.295 menurun menjadi 0.294 pada tahun 2015. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna. Grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 1.8.
Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2011-2015

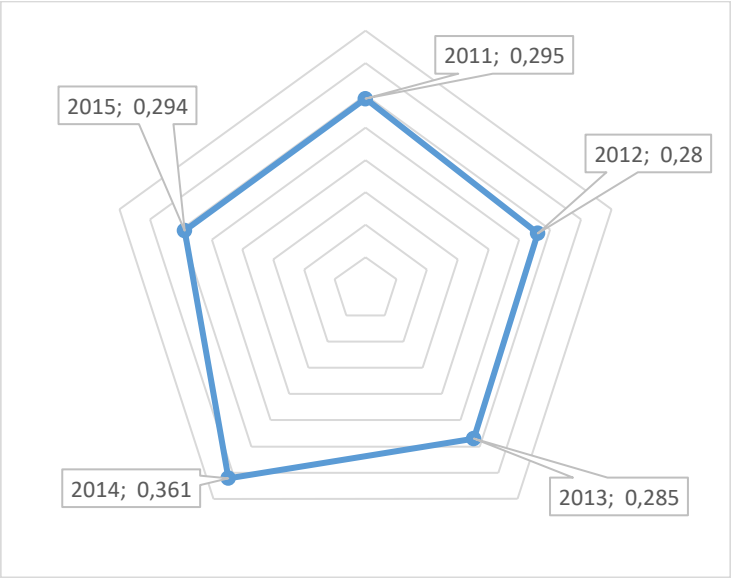

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

2.2.1.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2010 sampai dengan 2011 menunjukan tren angka menurun. Sedangkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah 24.600 orang kemudian meningkat hingga pada tahun 2015 berjumlah 40.180 orang. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk miskin adalah sebesar 3,61 persen per tahun.

Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2010 berjumlah Rp. 244.160 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi Rp. 301.563. Adapun rata-rata laju pertumbuhan pendapatan keluarga miskin adalah sebesar 4,32 persen per tahun.

Gambar 1.9.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015

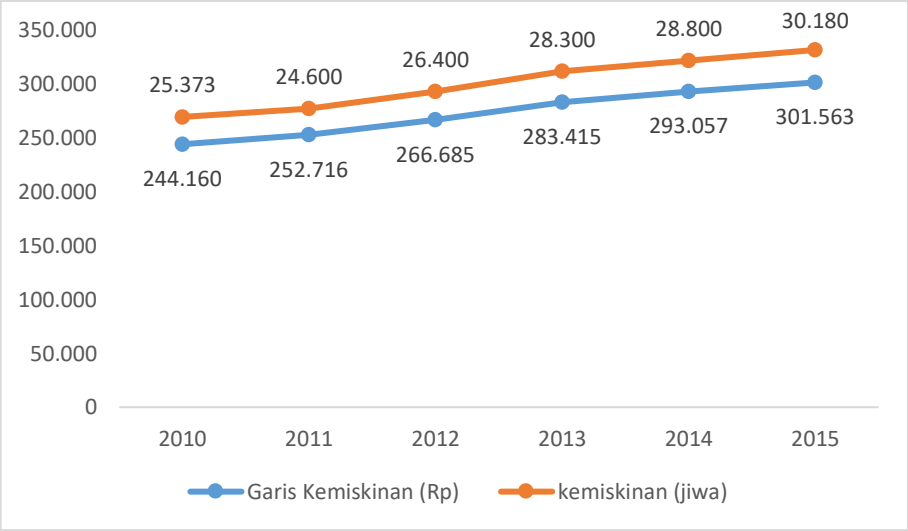

Sumber : TMP2K, 2016

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbec (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Gambar 1.10.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2015

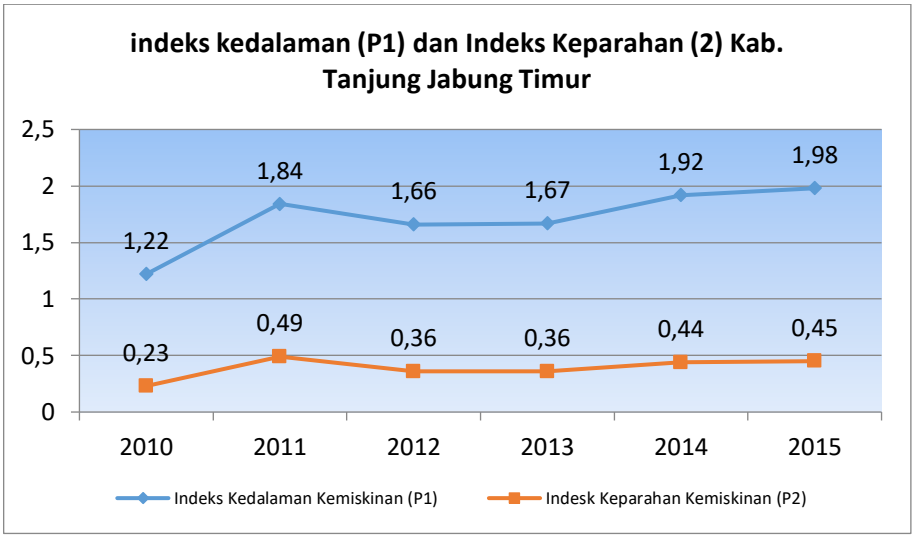

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2016

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berpluktuatif meningkat selama periode 2010 sampai dengan 2015. dimana pada tahun 2010 P1 berada di posisi 1,22 persen kemudian pada tahun 2014 bertambah menjadi 1,98 persen. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,23 tahun 2010 menjadi 0,45 pada tahun 2015. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kebijakan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016. Gambaran tentang Kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terdiri dari :

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

B. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2016

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya memuat program-program unggulan OPD yang terkait langsung dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya *(performance maintenance).*

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategis, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.

b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.

d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isu strategis daerah.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 beserta perubahannya merupakan penjabaran dari pelaksanaan transisi antara RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011 – 2016 dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 – 2021.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, adalah:

"**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)"**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Kelima misi tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2016-2021) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan
		Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten
		Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk
	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi
		Meningkatnya produksi tanaman palawija
		Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan
		Meningkatnya Populasi Ternak
		Meningkatnya produksi daging
		Meningkatnya pendapatan petani
	Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat
	Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
		Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan
	Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM

Misi	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing
	Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi
Misi III : Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar
	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	meningkatnya status kesehatan masyarakat
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah
	Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan
	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat
		Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat
	Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran
	Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai	Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur

Misi	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
	luhur budaya bangsa kepada masyarakat	budaya bangsa terhadap masyarakat
	Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparat pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik
	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa
	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana tabel di atas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;

8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;
9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;
31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penananam modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

2.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

Arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2016 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Program kegiatan yang direncanakan harus berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
2. Tetap fokus kepada usulan prioritas kecamatan, terutama infrastruktur lintas desa – lintas kecamatan;
3. Implementasi pelaksanaan terhadap beberapa perda strategis, seperti LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Perda Jalan, Perda Pendidikan Berkualitas, Perda Bangunan dan Gedung;
4. Selektif dalam memberikan rekomendasi perizinan kepada investor terkait alih fungsi lahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
5. Pemberian TKD berdasarkan kesulitan tempat bertugas (sangat sangat terpencil, sangat terpencil, terpencil dan biasa) dengan maksud agar aparatur di tempat tugas tersebut dapat lebih meningkatkan kinerja, serta lebih fokus dalam menjalankan tupoksi nya;
6. Penuntasan beberapa program kegiatan yang terkait dengan visi misi “SAMUDRA” seperti pengurangan angka kemiskinan, bantuan pompong, benih pertanian, peternakan, perikanan, bedah rumah samudra, pendidikan dan kesehatan berkualitas dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 dan Renstra OPD Tahun 2016 – 2021.
8. Peningkatan Pemberdayaan dan Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
9. Penyelesaian serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan Daerah.
11. Pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah termasuk dana BOS.
12. Pengalokasian anggaran kesehatan secara bertahap menuju 10% dari total belanja APBD di luar gaji.

13. Dengan terus meningkatnya Dana Desa setiap tahunnya diharapkan dapat mempercepat proses pemerataan pembangunan infrastruktur perdesaan.
14. Penataan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
15. Pengembangan pendidikan beragama sampai tingkat terbawah seperti Madrasah Diniyah, Insentif pegawai SARA, Qori dan Qori'ah.

Selanjutnya Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2016 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2016
I.	1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas) 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional. 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional. 8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis. 9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi.	1. Tata Kelola Pemerintahan 2. Infrastruktur 3. Pendidikan 4. Kesehatan 5. Ekonomi Kerakyatan 6. Penanggulangan Kemiskinan 7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup 8. Hukum, sosial, budaya dan Seni olah raga

1. Tata Kelola Pemerintahan

1) Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintah pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel melalui penetapan SOP, Standar Pelayanan Minimal (SPM), ISO dan Evaluasi Kinerja Kepala Daerah, dan Renja OPD berbasis kinerja yang terukur secara kuantitatif;
3) Penyempurnaan implementasi manajemen kepegawaian berbasis *System Merried* dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai;
4) Memperkuat dan mengoptimalkan pemerintahan dan unit pengelola teknis di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa;
5) Perlakuan khusus untuk PNS yang dinas didaerah *remote area*.

2. Infrastruktur

1) Pembangunan jalan poros ekonomi seperti ruas jalan zone V dan ruas jalan Sabak Timur – Nipah Panjang dengan kekuatan jalan; MST > 8 ton;
2) Pembangunan tanggul dan jaringan irigrasi;
3) Memperluas dan meningkatkan jalan produksi desa dan jembatan;
4) Pemenuhan sarana fasilitas keselamatan jalan;
5) Pemenuhan air minum dan sarana sanitasi penduduk;
6) Perluasan jaringan listrik interkoneksi ke semua kecamatan dan 70 % desa;
7) Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik seperti untuk daerah *remote area* dengan PLTS.

3. Pendidikan

1) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, menengah maupun tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang merata;
3) Regulasi peraturan wajib belajar 12 tahun melalui penyusunan PERDA;
4) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan siswa SMA dan SMK/sederajat melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan (laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga dan praktikum);
5) Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal;
6) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini;
7) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;
8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;

9) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
10) Pemenuhan kebutuhan guru di daerah sangat terpencil di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan berbak;
11) Perlakuan khusus untuk sekolah di remote area (khususnya di Kecamatan Sadu, Mendahara Ilir dan Berbak);
12) Pemantapan tatakelola BOS sehingga efisien dan efektif;
13) Pembangunan dan rehabilitasi rumah dinas guru;
14) Meningkatkan akses pelatihan dan keterampilan kerja melalui pembinaan dan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
15) Meningkatkan APM SD/sederajat menjadi sebesar 95,89 %;
16) Meningkatkan APM SMP/sederajat menjadi sebesar 80,10 %;
17) Meningkatkan APM SMA/sederajat menjadi sebesar 64,20 %;
18) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan paket A, B dan C;
19) Memantapkan pengelolaan dan proses belajar Pendidikan Tinggi kerjasama Universitas Jambi dengan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur.

4. Kesehatan

1) Meningkatkan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif yang terpadu, ditandai dengan:
   a. Meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi sebesar 85 persen;
   b. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) menjadi sebesar 90 persen;
   c. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan menjadi sebesar 85 persen dan imunisasi campak menjadi sebesar 90 persen;
   d. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi sebesar 90 persen;
   e. Menurunnya persentase balita gizi buruk secara bermakna, dan semua balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar;
   f. Terlaksananya penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah;
   g. Meningkatnya persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) menjadi sebesar 70 persen;
   h. meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) menjadi sebesar 70 persen;

i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

2) Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi sebesar 85 persen;
3) Semua penduduk miskin memiliki kartu Jaminan Kesehatan;
4) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, yang ditandai dengan :
   a. meningkatnya persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan menjadi sebesar 75% dan yang disembuhkan menjadi sebesar 86%; dan
   b. meningkatnya angka penemuan kasus malaria menjadi sebesar 1,75 per 1.000 penduduk.
5) Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan KB;
6) Meningkatnya sarana kesehatan yang merata melalui penyediaan dan peningkatan kualitas layanan di Puskesmas dan satelitnya serta RSUD yang terakreditasi;

5. Ekonomi Kerakyatan dan Ketahanan Pangan

1) Mempercepat Pengembangan kawasan agropolitan, dengan membentuk satgas pengembangan;
2) Penguatan modal, saprodi dan komposter;
3) Penguatan dan optimalisasi lembaga penyuluhan Daerah dan BP3K di kecamatan/Desa, melalui peraturan tatalaksana dan tenaga penyuluh; pemenuhan peralatan kerja, serta menjadikan BP3K sebagai Demplot dan sekolah lapangan bagi siswa dan petani;
4) Optimalisasi BBI Dendang dan TPI Nipah Panjang, PPI Teluk Majelis, Pabrik Es, tambak dan keramba rakyat;
5) Pelaksanaan perluasan lahan pertanian, dan perikanan sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan dan Tata Ruang;
6) Meningkatkan produksi pertanian dan produktifitas petani;
7) Ketersediaan pupuk dan pengembangan pupuk organik melalui perbaikan mekanisme distribusi pupuk;
8) Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan khususnya jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan produksi di daerah sentra produksi;
9) Bantuan modal kerja Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000,- per desa;
10) Penyiapan sarana untuk mendidik tenaga profesional melalui lanjutan pembangunan BLK, peralatan dan infrastruktur, serta pelatihan keterampilan yang berkualitas;

11) Pemberdayaan UMKM melalui kemudahan memperoleh modal usaha, bimbingan dan peralatan;
12) Optimalisasi fungsi koperasi (KUD) pembentukan lembaga ekonomi mikro (Bumdes), serta kemudahan memperoleh modal usaha;
13) Memberikan kemudahan berusaha dan investasi melalui peningkatan pelayanan terpadu;
14) Pengembangan ekonomi pedesaan melalui pengembangan pasar kecamatan, dan bantuan modal kerja;
15) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya yang berbasis ekonomi kerakyatan;
16) Pengembangan komoditas unggulan pada sektor pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan;
17) Menciptakan kawasan sentra produksi yang berdaya saing;
18) Pengembangan usaha agroindustri;
19) Pengembangan kelembagaan keuangan mikro;
20) Meningkatnya persentase penduduk diatas garis kemiskinan tahun 2015 sebesar 92,75 %;
21) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2015 sebesar 6,57.
22) Mengembangkan kawasan destinasi, sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.

6. Penanggulangan Kemiskinan

1) Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan pembentukan modal bentuk natura untuk peningkatan pendapatan (bibit sapi, tanaman, palawija, saprodi, kapal dan alat tangkap, dan sebagainya) bagi keluarga miskin dan hampir miskin.
2) Menggerakan perekonomian pedesaan, dengan meningkatkan ADD secara bertahap hingga mencapai 10% dari dana perimbangan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa. Berbagai kegiatan pembangunan yang dikerjakan dengan teknologi sederhana, padat karya serta dengan nilai dibawah Rp. 200 juta harus dilaksanakan dengan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan dibiayai melalui ADD.
3) Mengurangi beban keluarga miskin dan hampir miskin untuk memperoleh pelayanan publik (seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan) dan bantuan perbaikan lingkungan dan perumahan yang layak, santunan kematian.

4) Mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan keluarga miskin dan keluarga dengan kondisi khusus.
5) Meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan
6) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

7. Penataan Zonasi dan Lingkungan Hidup

1) Penyiapan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Wilayah
2) Mengurangi lahan dan DAS kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan, normalisasi saluran/sungai, pembangunan tanggul serta peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut dengan pelibatan masyarakat secara aktif.
3) Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lingkungan.
4) Tersedianya data dan informasi kualitas SDA dan LH.

8. Hukum, Sosial, Budaya dan Seni Olahraga

1) Meningkatkan kualitas legislasi melalui program legislasi daerah (penyusunan rencana PERDA) di pendidikan dan Perda-Perda lain;
2) Meningkatkan penegakan hukum, HAM dan pemberantasan korupsi melalui penyuluhan/sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan PERDA terkait HAM dan pemberantasan korupsi;
3) Pembinaan dan penggalian seni budaya daerah melalui pembangunan secara bertahap sanggar seni dan budaya di Kecamatan;
4) Apresiasi seni budaya agar kelestariannya tetap terjaga;
5) Pengelolaan cagar budaya dengan baik;
6) Mengenalkan seni budaya dan pariwisata melalui web-site (www.tanjabtimkab.go.id);
7) Pembinaan cabang olah raga sejak dini dan cabang olahraga prestasi;
8) Menjalin kerjasama dengan Kota/Kabupaten dalam Provinsi dan luar Provinsi untuk menarik minat masyarakat, diantaranya melalui paket bersama dan pengembangan *"Sister City";*
9) Meningkatnya kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan taqwa, seni budaya dan industri kreatif;
10) Terselenggaranya paket riset-riset dasar, terapan dan paket riset insentif.

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan

Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat laporan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang meliputi dari target dan realisasinya serta kebijakan keuangan daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian suatu daerah.

Sampai dengan tahun 2016 sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergantung kepada dana perimbangan (yang bersumber dari APBN) seperti dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

Meskipun begitu, secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2016 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan, ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan PAD dan serapan belanja daerah tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru

agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Garis besar kebijakan untuk penerimaan dapat dijelaskan sebagi berikut :

a. Membangunan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi. Untuk itu, prinsip pengenaan retribusi haruslah dijaga, bahwa retribusi harus sesuai dengan pendefinisiannya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak distortif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

b. Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat. Sebagai daerah yang relatif baru, dibutuhkan rancangan jangka panjang pemerintah daerah guna dapat menggali dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang bersumber dari daerah itu sendiri.

c. Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menggali sumbangan pihak ketiga.

d. Menetapkan peraturan yang dapat dijadikan payung hukum dalam meningkatkan penerimaan daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kebijakan tersebut diatas diambil sebagai upaya mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

a. Jumlah petugas pendata dan penagih pada bagian pendapatan dan UPTD masih sangat kurang.

b. Masih ada wajib pajak/retribusi yang belum memahami tentang pajak dan retribusi serta rendahnya kesadaran kewajibannya terhadap pajak dan retribusi daerah.

c. Dasar hukum berupa Perda yang menjadi payung hukum pemungutan pajak, retribusi daerah dan ada beberapa tarif yang belum direvisi/diperbaharui sesuai dengan ketentuan.

d. Masih rendahnya penerimaan BPHTB dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan turun waris.

Selain melaksanakan garis besar kebijakan untuk penerimaan, solusi yang diambil adalah :

a. Penambahan personil yang khusus ditugaskan sebagai petugas pendata dan pemungut/penagih pajak dan retribusi daerah.

b. Mengadakan mobil operasional pajak keliling.

c. Baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 2 zona yang dianggap strategis.

d. Melakukan revisi tarif atas Perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daearah.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 telah melampaui target yang telah ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 1,88%. Penyumbang kontribusi pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pandapatan Asli daerah dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 4.767.877.261,59 atau meningkat 12,17% dari target yang telah ditetapkan, dan Dana Perimbangan dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 21.801.802.514,00 atau meningkat sebesar 2,30% dari target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	+/-	%
1.	**PENDAPATAN**	**1.071.104.197.795,51**	**1.091.271.329.948,85**	**20.167.132.153,34**	**1,88**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**39.167.861.222,26**	**43.935.738.483,85**	**4.767.877.261,59**	**12,17**
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	12.759.204.791,61	12.399.377.006,85	(359.827.784,76)	(2,82)
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	6.398.921.758,00	4.368.648.180,25	(2.030.273.577,75)	(31,73)
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.800.000.000,00	4.960.217.704,08	160.217.704,08	3,34
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	15.209.734.672,65	22.207.495.592,67	6.997.760.920,02	46,01
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**946.571.991.750,00**	**968.373.794.264,00**	**21.801.802.514,00**	**2,30**
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	117.920.891.750,00	169.194.985.646,00	51.274.093.896,00	43,48
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	533.829.506.000,00	533.829.506.000,00	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	294.821.594.000,00	265.349.302.618,00	(29.472.291.382,00)	(10,00)
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**85.364.344.823,25**	**78.961.797.201,00**	**(6.402.547.622,25)**	**(7,50)**
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	577.353.500,00	577.353.500,00	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.286.508.706,00	30.086.019.701,00	(6.200.489.005,00)	(17,09)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49.077.836.117,25	48.298.424.000,00	(779.412.117,25)	(1,59)
1.3.5.	Bantuan Keuangan	-	-	-	-

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Jika dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah tahun 2015, total realisasi pendapatan daerah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015–2016*

Uraian	Realisasi		Bertambah (berkurang)	
	2015	2016	(Rp)	%
PENDAPATAN	**920.195.435.376**	**1.091.271.329.948,85**	**171.075.894.573,22**	**18,59**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**38.473.606.893**	**43.935.738.483,85**	**5.462.131.590,55**	**14,20**
Pendapatan Pajak Daerah	10.159.525.804	12.399.377.006,85	2.239.851.203,18	22,05
Pendapatan Retribusi Daerah	6.850.625.261,08	4.368.648.180,25	(2.481.977.080,83)	(36,23)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.497.072.677,45	4.960.217.704,08	(536.854.973,37)	(9,77)
Lain-lain PAD Yang Sah	15.966.383.151,10	22.207.495.592,67	6.241.112.441,57	39,09
DANA PERIMBANGAN	**733.466.795.933,00**	**968.373.794.264,00**	**234.906.998.331,00**	**32,03**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	191.245.874.933,00	169.194.985.646,00	(22.050.889.287,00)	(11,53)
Dana Alokasi Umum (DAU)	432.097.281.000,00	533.829.506.000,00	101.732.225.000,00	23,54
Dana Alokasi Khusus (DAK)	110.123.640.000,00	265.349.302.618,00	155.225.662.618,00	140,96
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**148.255.032.549,33**	**78.961.797.201,00**	**(69.293.235.348,33)**	**(46,74)**
Pendapatan Hibah	310.459.659,33	577.353.500,00	266.893.840,67	85,97
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.203.188.890,00	30.086.019.701,00	(6.117.169.189,00)	(16,90)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107.341.384.000,00	48.298.424.000,00	(59.042.960.000,00)	(55,00)
Bantuan Keuangan	4.400.000.000,00	-	(4.400.000.000,00)	(100,00)

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 telah mencapai Rp 43.935.738.483,85 atau mengalami penambahan sebesar Rp. 5.462.131.590,55 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 38.473.606.893, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah yang merupakan komponen utama PAD hanya terealisasi sebesar Rp. 12.399.377.006,85 atau hanya sebesar 97,18% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan tidak tercapainya pendapatan pajak daerah tersebut berasal dari komponen Pajak hiburan yang tidak terealisasi sama sekali, Pajak Reklame yang hanya mencapai 73,08%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang hanya mencapai 32,24%, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang hanya mencapai 94,64%, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hanya mencapai 33,44%. secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.1.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**12.759.204.791,61**	**12.399.377.006,85**	**(359.827.784,76)**	**97,18**
1.1.1.06.	Pajak Hotel	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	180,00
1.1.1.07.	Pajak Restoran	2.320.500.000,00	3.512.117.202,10	1.191.617.202,10	151,35
1.1.1.08.	Pajak Hiburan	3.020.000,00	-	(3.020.000,00)	-
1.1.1.09.	Pajak Reklame	98.000.000,00	71.614.262,00	(26.385.738,00)	73,08
1.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	5.150.000.000,00	5.994.048.911,00	844.048.911,00	116,39
1.1.1.12.	Pajak Air Tanah	5.000.000,00	6.744.470,00	1.744.470,00	134,89
1.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	63.752.000,00	13.752.000,00	127,50
1.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.075.000.000,00	346.544.492,75	(728.455.507,25)	32,24
1.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.700.000.000,00	1.608.884.694,00	(91.115.306,00)	94,64
1.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.352.684.791,61	786.670.975,00	(1.566.013.816,61)	33,44

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 4.368.648.180,25 atau setara 68,27% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan tidak tercapainya pendapatan Retribusi daerah tersebut berasal dari komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan yang hanya mencapai 60,56%, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang hanya mencapai 7,50%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang hanya mencapai 66,28%, Retribusi Terminal yang hanya mencapai 20,04%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga yang hanya mencapai 48,33%, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang hanya mencapai 82,80%. secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.1.2.	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**6.398.921.758,00**	**4.368.648.180,25**	**(2.030.273.577,75)**	**68,27**
1.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.175.000.000,00	3.134.187.500,00	(2.040.812.500,00)	60,56
1.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	35.000.000,00	55.930.500,00	20.930.500,00	159,80
1.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000,00	5.910.000,00	2.910.000,00	197,00
1.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	40.000.000,00	40.500.000,00	500.000,00	101,25
1.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	107.500.000,00	146.425.000,00	38.925.000,00	136,21
1.1.2.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000,00	75.000,00	(925.000,00)	7,50
1.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	14.568.530,00	14.568.530,00	-
1.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400.000.000,00	265.125.000,00	(134.875.000,00)	66,28
1.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan	3.500.000,00	3.520.000,00	20.000,00	100,57

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.1.2.18.	Retribusi Terminal	35.000.000,00	7.014.000,00	(27.986.000,00)	20,04
1.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	20.000.000,00	40.788.400,00	20.788.400,00	203,94
1.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	20.000.000,00	24.160.332,00	4.160.332,00	120,80
1.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	15.000.000,00	7.250.000,00	(7.750.000,00)	48,33
1.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	182.500.000,00	151.114.248,25	(31.385.751,75)	82,80
1.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	361.421.758,00	472.079.670,00	110.657.912,00	130,62

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 4.960.217.704,08 atau setara 103,34% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan tercapainya pendapatan Retribusi daerah tersebut berasal dari komponen Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN yang semula tidak ditargetkan. secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.1.3.	**PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**	**4.800.000.000,00**	**4.960.217.704,08**	**160.217.704,08**	**103,34**
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.800.000.000,00	-	(4.800.000.000,00)	-
1.1.3.02.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	-	4.960.217.704,08	4.960.217.704,08	-

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 22.207.495.592,67 atau setara 146,01% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan terjadinya Pelampauan dari target pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut berasal dari seluruh komponen Lain-Lain PAD Yang Sah kecuali Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang hanya sebesar 65,94% dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya yang hanya sebesar 96,26%. secara rinci realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**15.209.734.672,65**	**22.207.495.592,67**	**6.997.760.920,02**	**146,01**
1.1.4.01.	**Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan**	**500.872.000,00**	**330.272.675,00**	**(170.599.325,00)**	**65,94**
1.1.4.01.01.	Penjualan Hasil Pertanian	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	120,00
1.1.4.01.02.	Penjualan Pabrik ES	-	7.000.000,00	7.000.000,00	-
1.1.4.01.03.	Pendapatan PDAM	250.000.000,00	147.312.675,00	(102.687.325,00)	58,93
1.1.4.01.06.	Penjualan Hasil Benih Perikanan	25.000.000,00	3.000.000,00	(22.000.000,00)	12,00
1.1.4.01.08.	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	195.872.000,00	136.960.000,00	(58.912.000,00)	69,92
1.1.4.02.	**Hasil Penjualan Aset Lainnya**	**-**	**59.970.000,00**	**59.970.000,00**	**-**
1.1.4.02.01.	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	59.970.000,00	59.970.000,00	-
1.1.4.03.	**Penerimaan Jasa Giro**	**2.510.872.919,00**	**3.727.341.838,25**	**1.216.468.919,25**	**148,45**
1.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	2.500.000.000,00	3.652.976.581,04	1.152.976.581,04	146,12
1.1.4.03.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	10.872.919,00	74.365.257,21	63.492.338,21	683,95
1.1.4.04.	**Pendapatan Bunga**	**2.500.000.000,00**	**3.413.016.095,07**	**913.016.095,07**	**136,52**
1.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito Bank 9 Jambi	2.500.000.000,00	3.342.849.315,07	842.849.315,07	133,71
1.1.4.04.03.	Pendapatan Bunga Deposito BNI	-	70.166.780,00	70.166.780,00	-
1.1.4.07.	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**-**	**93.355.067,00**	**93.355.067,00**	**-**
1.1.4.07.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	93.355.067,00	93.355.067,00	-
1.1.4.08.	**Pendapatan Denda Pajak**	**-**	**23.166.973,00**	**23.166.973,00**	**-**
1.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	23.166.973,00	23.166.973,00	-
1.1.4.13.	**Pendapatan dari Pengembalian**	**4.816.842.633,65**	**9.666.088.444,35**	**4.849.245.810,70**	**200,67**
1.1.4.13.02.	Pend. Dari Kelebihan Pembyr Gaji & Tujangan	20.000.000,00	10.459.000,00	(9.541.000,00)	52,30
1.1.4.13.03.	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembyr Perjln Dinas	-	36.970.000,00	36.970.000,00	-
1.1.4.13.04	Pendapatan Dari Kegiatan SKPD	-	1.473.595.648,92	1.473.595.648,92	-
1.1.4.13.05.	Pendapatan Dari Pengembalian Temuan Pemeriksaan	4.596.842.633,65	8.017.450.105,48	3.420.607.471,83	174,41
1.1.4.13.06.	Pendapatan Dari Pengembalian Taspen	200.000.000,00	89.198.060,00	(110.801.940,00)	44,60
1.1.4.13.08.	Pendapatan Dari Kegiatan SKPD	-	38.415.629,95	38.415.629,95	-
1.1.4.15.	**Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan**	**-**	**195.872.000,00**	**195.872.000,00**	**-**
1.1.4.15.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	-	195.872.000,00	195.872.000,00	-
1.1.4.19.	**Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**	**4.881.147.120,00**	**4.698.412.500,00**	**(182.734.620,00)**	**96,26**
1.1.4.19.02.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.881.147.120,00	4.698.412.500,00	(182.734.620,00)	96,26

3.1.2.2. Pendapatan Dana Perimbangan

Selama tahun 2016 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp. 968.373.794.264,- atau mencapai 102,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 946.571.991.750,-. Dari tiga sumber pendapatan dana perimbangan tersebut, pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 90% atau sejumlah

Rp.265.349.302.618,- dari target sebesar Rp. 294.821.594.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padaTabel 3.7.

Tabel 3.7.
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2015–2016*

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**946.571.991.750,00**	**968.373.794.264,00**	**21.801.802.514,00**	**102,30**
1.2.1.	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	**117.920.891.750,00**	**169.194.985.646,00**	**51.274.093.896,00**	**143,48**
1.2.1.01.	**Bagi Hasil Pajak**	**67.980.449.750,00**	**99.521.604.128,00**	**31.541.154.378,00**	**146,40**
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	354.060.000,00	428.201.748,00	74.141.748,00	120,94
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	305.084.000,00	153.910.953,00	(151.173.047,00)	50,45
1.2.1.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	61.284.263.250,00	88.957.921.260,00	27.673.658.010,00	145,16
1.2.1.01.07.	Biaya Pungut PBB	1.530.200.250,00	4.069.710.585,00	2.539.510.335,00	265,96
1.2.1.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	4.506.842.250,00	5.911.859.582,00	1.405.017.332,00	131,18
1.2.1.02.	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**49.940.442.000,00**	**69.673.381.518,00**	**19.732.939.518,00**	**139,51**
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.424.209.000,00	835.791.675,00	(588.417.325,00)	58,68
1.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	26.062.700,00	9.045.900,00	(17.016.800,00)	34,71
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	1.164.357.200,00	892.405.500,00	(271.951.700,00)	76,64
1.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	288.646.439,00	288.646.439,00	-
1.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	925.814.900,00	163.379.100,00	(762.435.800,00)	17,65
1.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	14.378.904.900,00	26.663.698.506,00	12.284.793.606,00	185,44
1.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	32.021.093.300,00	40.820.414.398,00	8.799.321.098,00	127,48
1.2.2.	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**533.829.506.000,00**	**533.829.506.000,00**	**-**	**100,00**
1.2.2.01.	**Dana Alokasi Umum**	**533.829.506.000,00**	**533.829.506.000,00**	**-**	**100,00**
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	533.829.506.000,00	533.829.506.000,00	-	100,00
1.2.3.	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**294.821.594.000,00**	**265.349.302.618,00**	**(29.472.291.382,00)**	**90,00**
1.2.3.01.	**Dana Alokasi Khusus**	**294.821.594.000,00**	**265.349.302.618,00**	**(29.472.291.382,00)**	**90,00**
1.2.3.01.01.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	141.448.618.000,00	141.448.617.922,00	(78,00)	100,00
1.2.3.01.02.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	13.814.938.000,00	13.814.937.714,00	(286,00)	100,00
1.2.3.01.03.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	-	476.900.000,00	476.900.000,00	-
1.2.3.01.04.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	1.734.180.000,00	910.444.000,00	(823.736.000,00)	52,50
1.2.3.01.05.	DAK Bidang Keluarga Berencana	1.467.053.000,00	12.849.828.000,00	11.382.775.000,00	875,89
1.2.3.01.06.	DAK Bidang Kehutanan	-	480.606.000,00	480.606.000,00	-
1.2.3.01.08.	DAK Bidang Kesehatan	35.011.185.000,00	23.628.410.316,00	(11.382.774.684,00)	67,49
1.2.3.01.09.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	2.446.890.000,00	2.446.890.000,00	-	100,00
1.2.3.01.11.	DAK Bidang Transportasi Perdesaan	1.586.290.000,00	1.586.290.000,00	-	100,00
1.2.3.01.12.	DAK Bidang Perdagangan	4.404.519.000,00	4.404.518.903,00	(97,00)	100,00
1.2.3.01.13.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	1.602.020.000,00	1.121.414.000,00	(480.606.000,00)	70,00
1.2.3.01.15.	DAK Bidang Pertanian	7.492.180.000,00	5.993.744.000,00	(1.498.436.000,00)	80,00
1.2.3.01.18.	DAK Bidang Pendidikan	7.704.720.000,00	7.704.720.000,00	-	100,00
1.2.3.01.20	DAK Bidang Kesehatan Non Fisik	4.689.510.000,00	4.946.985.000,00	257.475.000,00	105,49
1.2.3.01.21.	DAK Bidang Pendidikan Non Fisik	3.540.000.000,00	3.540.000.000,00	-	100,00
1.2.3.01.22.	DAK Bidang Keluarga Berencana Non Fisik	514.950.000,00	257.475.000,00	(257.475.000,00)	50,00
1.2.3.01.23.	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	66.269.541.000,00	38.861.521.763,00	(27.408.019.237,00)	58,64
1.2.3.01.24.	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.095.000.000,00	876.000.000,00	(219.000.000,00)	80,00

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

3.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya.

Tabel 3.8.
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5=4-3)*	*(6=4/3*100)*
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**85.364.344.823,25**	**78.961.797.201,00**	**(6.402.547.622,25)**	**92,50**
1.3.1.	**Pendapatan Hibah**	**-**	**577.353.500,00**	**577.353.500,00**	**-**
1.3.1.03.	**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri**	**-**	**577.353.500,00**	**577.353.500,00**	**-**
1.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	577.353.500,00	577.353.500,00	-
1.3.3.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	**36.286.508.706,00**	**30.086.019.701,00**	**(6.200.489.005,00)**	**82,91**
1.3.3.01.	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi**	**36.286.508.706,00**	**30.086.019.701,00**	**(6.200.489.005,00)**	**82,91**
1.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kenderaan Bermotor (DBH-PKB)	5.352.104.411,00	5.847.931.424,70	495.827.013,70	109,26
1.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kend.Bermotor (DBH-BBNKB)	8.749.140.714,00	6.302.164.418,95	(2.446.976.295,05)	72,03
1.3.3.01.04	Badi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBNKB)	15.549.603.020,00	13.523.324.016,22	(2.026.279.003,78)	86,97
1.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pengembangan & Pemenfaatan Air Permukaan	2.499.761,00	3.107.145.649,13	3.104.645.888,13	124.297,71
1.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.633.160.800,00	1.305.454.192,00	(5.327.706.608,00)	19,68
1.3.4.	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	**49.077.836.117,25**	**48.298.424.000,00**	**(779.412.117,25)**	**98,41**
1.3.4.01.	**Dana Penyesuaian**	**49.077.836.117,25**	**48.298.424.000,00**	**(779.412.117,25)**	**98,41**
1.3.4.01.04.	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi	1.875.505.117,25	1.096.093.000,00	(779.412.117,25)	58,44
1.3.4.01.06.	Dana Desa	47.202.331.000,00	47.202.331.000,00	-	100,00
1.3.5.	**Bantuan Keuangan**	**-**	**-**		**-**
1.3.5.01.	**Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya**	**-**	**-**		**-**
1.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-		-

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Jika dilihat dari tabel 3.8 diatas, penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 78.961.797.201,00 atau 92,50 persen dari target yang telah ditetapkan, tidak tercapainya target pendapatan tersebut karena masih terdapatnya kurang salur dari seluruh komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, kecuali pada sub komponen Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kenderaan Bermotor (DBH-PKB) yang terealisasi sebesar 109,26%, Bagi Hasil dari Pengembangan & Pemenfaatan Air Permukaan sebesar 124.297,71% dan dana desa sebesar 100%.

Selanjutnya Target pendapatan daerah pada tahun 2016 yang dilaksanakan oleh 25 organisasi Perangkat Daerah Pemungut dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2016

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	Dinas Kesehatan	5.206.147.120,00	4.974.365.000,00	(231.782.120,00)	95,55
2	Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah	4.850.000.000,00	2.858.235.000,00	(1.991.765.000,00)	58,93
3	Dinas Pekerjaan Umum	579.000.000,00	297.642.675,00	(281.357.325,00)	51,41
4	Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan	20.000.000,00	20.320.000,00	320.000,00	101,60
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.000,00	75.000,00	(925.000,00)	7,50
6	Dinas Perhubungan,Komunikasi Dan Informasi	165.500.000,00	198.077.862,00	32.577.862,00	119,68
7	Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan	250.000.000,00	287.481.600,00	37.481.600,00	114,99
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga	15.000.000,00	7.250.000,00	(7.750.000,00)	48,33
9	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12.865.204.791,61	23.873.927.041,11	11.008.722.249,50	185,57
10	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	100.000.000,00	135.345.123,00	35.345.123,00	135,35
11	Kecamatan Muara Sabak Barat	31.742.691,00	28.443.443,00	(3.299.248,00)	89,61
12	Kecamatan Muara Sabak Timur	14.693.262,00	16.196.000,00	1.502.738,00	110,23
13	Kecamatan Mendahara	9.177.078,00	13.010.014,25	3.832.936,25	141,77
14	Kecamatan Mendahara Ulu	9.127.537,00	2.252.800,00	(6.874.737,00)	24,68
15	Kecamatan Geragai	18.068.916,00	19.204.114,00	1.135.198,00	106,28
16	Kecamatan Kuala Jambi	7.528.814,00	2.961.330,00	(4.567.484,00)	39,33
17	Kecamatan Dendang	14.050.546,00	5.540.000,00	(8.510.546,00)	39,43
18	Kecamatan Berbak	7.221.882,00	6.385.000,00	(836.882,00)	88,41
19	Kecamatan Rantau Rasau	25.833.897,00	12.989.200,00	(12.844.697,00)	50,28
20	Kecamatan Nipah Panjang	43.338.823,00	14.468.919,00	(28.869.904,00)	33,39
21	Kecamatan Sadu	13.138.312,00	7.107.725,00	(6.030.587,00)	54,10
22	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	120,00
23	Dinas Peternakan	3.500.000,00	3.520.000,00	20.000,00	100,57
24	Dinas Kelautan Dan Perikanan	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	40,00
25	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	40.000.000,00	40.500.000,00	500.000,00	101,25
	JUMLAH	**24.344.273.669,61**	**32.871.297.846,36**	**8.527.024.176,75**	**135,03**

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

3.1.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Tabel 3.10.
Perkembangan Pembiayaan Periode 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	**Realisasi**	**(Rp)**	**%**
(1)	***(2)***	***(3)***	***(4)***	***(5=4-3)***	***(6=4/3*100)***
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(59.165.842.982,16)**	**27.166.446.135,85**	**86.332.289.118,01**	**(45,92)**
3.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**61.665.842.982,16**	**61.665.842.982,16**	**-**	**100,00**
3.1.1.	**Penggunaan SiLPA**	**61.665.842.982,16**	**61.665.842.982,16**	**-**	**100,00**
3.1.1.01.	**Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya**	**61.665.842.982,16**	**61.665.842.982,16**		**100,00**
3.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	61.665.842.982,16	61.665.842.982,16	-	100,00
3.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.500.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**(500.000.000,00)**	**80,00**
3.2.2.	**Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**		**100,00**
3.2.2.02.	**Penyertaan Modal pada BUMD**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**		**100,00**
3.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
3.2.4.	**Pemberian Pinjaman Daerah**	**500.000.000,00**	**-**	**(500.000.000,00)**	**-**
3.2.4.02.	**Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah**	**500.000.000,00**	**-**		**-**
3.2.4.02.01.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**59.165.842.982,16**	**59.665.842.982,16**	**500.000.000,00**	**100,85**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**86.832.289.118,01**	**86.832.289.118,01**	**-**

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2016, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 61.665.842.982,16 terealisasi mencapai sebesar 100%. Dari sisi pengeluaran pembiayan tahun 2016, anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000.000 dan terealisasi mencapai 100%, sementara anggaran Pemberian Pinjaman Daerah yang ditargetkan sebesar 500.000.000 tidak terealisasi sama sekali. sehingga pembiayaan netto tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 59.665.842.982,16 atau 100,85%.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan

strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran, dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2. Target dan Realisai Belanja

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2016, anggaran belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dialokasikan sebesar Rp. 1.130.270.040.777,67 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 492.372.303.560,67 atau sebesar 43,56% dari total target belanja Daerah, sedangkan untuk Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 637.897.737.217,00 atau sebesar 56,44% dari total alokasi belanja daerah. Dari alokasi belanja daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.064.104.883.813,00 atau sebesar 91,76%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.465.192.065.689,00 sebesar 43,72% dari target anggaran dan untuk Belanja Langsung terealisasi Rp. 598.912.818.124,00 atau sebesar 56,28% dari target anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.	BELANJA	1.130.270.040.777,67	1.064.104.883.813,00	(66.165.156.964,67)	94,15
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	492.372.303.560,67	465.192.065.689,00	(27.180.237.871,67)	94,48
2.2.	BELANJA LANGSUNG	637.897.737.217,00	598.912.818.124,00	(38.984.919.093,00)	93,89

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : SIPKD Kab. Tanjung Jabung Timur

3.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun 2016 belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 492.372.303.560,67 dan terealisasi sebesar Rp. 465.192.065.689,00 atau 94,48% lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit). Belanja pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai dan TKD yang ditargetkan sebesar Rp. 390.324.857.529,50 terealisasi sebesar Rp. 371.325.171.336,00 atau 95,13%. Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 13.523.667.500,00 terealisasi sebesar Rp. 7.784.500.000,00 atau 57,56%. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.052.048.829,00 atau 52,60%. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menganggarkan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa tahun 2016 sebesar Rp. 1.565.962.003,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.745.432.551,00 atau 111,46%. Selain itu juga dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol sebesar Rp. 82.874.180.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 82.687.473.589,00 atau 99,77%. Anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2016 disediakan anggaran sebesar Rp. 2.083.636.528,17

dan teralisasi sebesar Rp. 597.439.384,00 atau 28,67%. Hal ini disebabkan penggunaan belanja ini dilakukan sangat selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.	**BELANJA**	**1.130.270.040.777,67**	**1.064.104.883.813,00**	**(66.165.156.964,67)**	**94,15**
2.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**492.372.303.560,67**	**465.192.065.689,00**	**(27.180.237.871,67)**	**94,48**
2.1.1.	Belanja Pegawai	390.324.857.529,50	371.325.171.336,00	(18.999.686.193,50)	95,13
2.1.4.	Belanja Hibah	13.523.667.500,00	7.784.500.000,00	(5.739.167.500,00)	57,56
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	1.052.048.829,00	(947.951.171,00)	52,60
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.565.962.003,00	1.745.432.551,00	179.470.548,00	111,46
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	82.874.180.000,00	82.687.473.589,00	(186.706.411,00)	99,77
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.083.636.528,17	597.439.384,00	(1.486.197.144,17)	28,67

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : SIPKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Belanja Tidak Langsung menurut SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	248.674.448.902,84	242.864.898.983,00	(5.809.549.919,84)	97,66
2.	DINAS KESEHATAN	22.953.124.942,11	22.123.010.092,00	(830.114.850,11)	96,38
3.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	10.058.959.901,93	8.850.577.775,00	(1.208.382.126,93)	87,99
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	4.430.310.386,37	4.206.924.267,00	(223.386.119,37)	94,96
5.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.786.007.212,11	1.290.259.867,00	(495.747.345,11)	72,24
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.048.966.599,54	1.863.201.717,00	(185.764.882,54)	90,93
7.	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	533.891.295,37	444.509.917,00	(89.381.378,37)	83,26
8.	DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMASI	2.349.435.649,93	2.233.965.538,00	(115.470.111,93)	95,09
9.	KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	996.396.145,39	931.974.177,00	(64.421.968,39)	93,53
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.654.573.399,56	1.575.476.575,00	(79.096.824,56)	95,22
11.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	5.205.280.710,79	4.872.031.807,00	(333.248.903,79)	93,60
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.698.307.988,54	2.568.959.193,00	(129.348.795,54)	95,21
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.633.514.343	1.517.074.365,00	(116.439.978,24)	92,87
14.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1.622.488.939,40	1.484.597.960,00	(137.890.979,40)	91,50
15.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	2.488.392.255,25	2.358.237.907,00	(130.154.348,25)	94,77
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	804.774.478,26	693.722.943,00	(111.051.535,26)	86,20
17.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.209.675.781,89	1.079.599.691,00	(130.076.090,89)	89,25
18.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	489.831.702,00	400.032.358,00	(89.799.344,00)	81,67
19.	SEKRETARIAT DPRD	2.563.217.502,32	2.298.692.294,00	(264.525.208,32)	89,68
20.	SEKRETARIAT DAERAH	7.611.147.226,33	5.312.704.514,00	(2.298.442.712,33)	69,80
21.	DPRD	4.723.312.352,00	4.323.363.189,00	(399.949.163,00)	91,53
22.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8.355.396.969,44	6.485.945.550,00	(1.869.451.419,44)	77,63
23.	PPKD	102.047.446.031,17	93.866.894.353,00	(8.180.551.678,17)	91,98
24.	INSPEKTORAT	2.084.726.119,67	1.992.715.152,00	(92.010.967,67)	95,59
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	5.807.373.956,22	5.668.971.552,00	(138.402.404,22)	97,62
26.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	954.174.968,97	856.669.997,00	(97.504.971,97)	89,78
27.	SEKRETARIAT DP KORPRI	440.168.345,32	314.649.002,00	(125.519.343,32)	71,48
28.	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	3.344.091.222,74	3.159.254.849,00	(184.836.373,74)	94,47
29.	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	2.955.421.900,50	2.636.099.326,00	(319.322.574,50)	89,20
30.	KECAMATAN MENDAHARA	2.144.961.319,54	1.776.377.921,00	(368.583.398,54)	82,82
31.	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.430.870.635,13	1.367.034.520,00	(63.836.115,13)	95,54
32.	KECAMATAN GERAGAI	1.806.304.363,15	1.719.934.603,00	(86.369.760,15)	95,22
33.	KECAMATAN KUALA JAMBI	1.302.682.022,04	1.222.854.077,00	(79.827.945,04)	93,87
34.	KECAMATAN DENDANG	1.295.001.980,24	1.220.587.962,00	(74.414.018,24)	94,25
35.	KECAMATAN BERBAK	1.430.031.460,41	1.256.443.837,00	(173.587.623,41)	87,86
36.	KECAMATAN RANTAU RASAU	2.349.257.460,64	2.130.120.420,00	(219.137.040,64)	90,67
37.	KECAMATAN NIPAH PANJANG	3.133.557.528,81	2.878.629.013,00	(254.928.515,81)	91,86

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
38.	KECAMATAN SADU	2.160.355.506,76	1.892.188.816,00	(268.166.690,76)	87,59
39.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	956.366.142,16	805.402.759,00	(150.963.383,16)	84,21
40.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	1.996.574.946,32	1.868.236.006,00	(128.338.940,32)	93,57
41.	KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA	640.299.703,04	598.971.494,00	(41.328.209,04)	93,55
42.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	3.143.132.324,99	2.982.938.493,00	(160.193.831,99)	94,90
43.	DINAS PETERNAKAN	2.306.299.983,37	2.175.191.144,00	(131.108.839,37)	94,32
44.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	5.720.323.093,90	5.405.552.670,00	(314.770.423,90)	94,50
45.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2.589.577.304,07	2.467.852.813,00	(121.724.491,07)	95,30
46.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.744.643.716,38	1.649.858.154,00	(94.785.562,38)	94,57
47.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.996.757.923,22	1.896.184.408,00	(100.573.515,22)	94,96
48.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.700.448.917,30	1.602.691.669,00	(97.757.248,30)	94,25
	JUMLAH	**492.372.303.560,67**	**465.192.065.689,00**	**(27.180.237.871,67)**	**94,48**

3.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

selanjutnya belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 637.897.737.217,00 dan terealisasi sebesar Rp. 598.912.818.124,00 atau 93,89 % lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit).

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**637.897.737.217,00**	**598.912.818.124,00**	**(38.984.919.093,00)**	**93,89**
2.2.1.	Belanja Pegawai	53.264.203.750,00	51.426.919.750,00	(1.837.284.000,00)	96,55
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.928.798.151,40	181.708.104.844,00	(16.220.693.307,40)	91,80
2.2.3.	Belanja Modal	386.704.735.315,60	365.777.793.530,00	(20.926.941.785,60)	94,59

Untuk belanja pegawai dalam belanja langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 53.264.203.750,00 terealisasi sebesar Rp. 51.426.919.750,00 atau 96,55%, sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 197.928.798.151,40 terealisasi sebesar Rp. 181.708.104.844,00 atau 91,80% dan untuk belanja modal yang ditargetkan Rp. 386.704.735.315,60 terealisasi sebesar Rp. 365.777.793.530,00 atau 94,59%. untuk lebih jelasnya belanja langsung pada masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	39.955.733.050,00	38.418.406.745,00	1.537.326.305,00	96,15
2.	DINAS KESEHATAN	48.125.957.606,00	42.909.180.780,00	5.216.776.826,00	89,16
3.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	24.064.220.000,00	22.927.924.856,00	1.136.295.144,00	95,28
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	292.241.966.624,20	275.182.971.758,00	17.058.994.866,20	94,16
5.	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	7.942.846.550,00	7.783.627.433,00	159.219.117,00	98,00
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.132.011.290,00	5.692.699.270,00	439.312.020,00	92,84
7.	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.160.374.000,00	1.032.775.100,00	127.598.900,00	89,00
8.	DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMASI	11.812.285.000,00	9.484.966.556,00	2.327.318.444,00	80,30
9.	KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	2.964.717.300,00	2.923.347.211,00	41.370.089,00	98,60
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.707.827.350,00	3.668.308.314,00	39.519.036,00	98,93
11.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4.062.484.400,00	4.001.982.752,00	60.501.648,00	98,51
12.	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.519.522.000,00	4.438.446.295,00	81.075.705,00	98,21
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.454.220.400	1.323.847.569,00	130.372.831,00	91,03
14.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1.613.410.600,00	1.553.174.215,00	60.236.385,00	96,27
15.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA	9.384.197.050,00	8.733.334.695,00	650.862.355,00	93,06
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.166.250.400,00	2.077.870.904,00	88.379.496,00	95,92
17.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.844.697.000,00	2.830.776.751,00	13.920.249,00	99,51
19.	SEKRETARIAT DPRD	23.580.911.253,00	21.734.808.278,00	1.846.102.975,00	92,17
20.	SEKRETARIAT DAERAH	35.660.860.300,00	32.170.243.145,00	3.490.617.155,00	90,21
22.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.702.871.150,00	9.049.392.755,00	653.478.395,00	93,27
24.	INSPEKTORAT	3.713.021.900,00	3.705.758.927,00	7.262.973,00	99,80
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	3.574.789.300,00	3.409.600.970,00	165.188.330,00	95,38
26.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1.383.299.000,00	1.361.886.674,00	21.412.326,00	98,45
27.	SEKRETARIAT DP KORPRI	535.075.900,00	345.619.470,00	189.456.430,00	64,59
28.	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	3.093.488.374,05	2.897.756.848,00	195.731.526,05	93,67
29.	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1.565.232.137,95	1.561.537.906,00	3.694.231,95	99,76
30.	KECAMATAN MENDAHARA	1.138.012.162,18	1.109.472.843,00	28.539.319,18	97,49
31.	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.302.181.242,96	1.294.923.171,00	7.258.071,96	99,44
32.	KECAMATAN GERAGAI	1.253.174.488,59	1.221.742.215,00	31.432.273,59	97,49
33.	KECAMATAN KUALA JAMBI	1.521.149.575,47	1.507.622.150,00	13.527.425,47	99,11
34.	KECAMATAN DENDANG	1.166.402.163,63	1.159.847.160,00	6.555.003,63	99,44
35.	KECAMATAN BERBAK	1.161.007.541,77	1.089.335.050,00	71.672.491,77	93,83
36.	KECAMATAN RANTAU RASAU	1.163.628.815,96	1.158.403.721,00	5.225.094,96	99,55
37.	KECAMATAN NIPAH PANJANG	1.579.162.850,75	1.572.506.083,00	6.656.767,75	99,58
38.	KECAMATAN SADU	1.347.198.220,49	1.269.857.700,00	77.340.520,49	94,26
39.	KANTOR KETAHANAN PANGAN	3.459.527.300,00	3.297.798.039,00	161.729.261,00	95,33
40.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	4.582.200.500,00	4.164.872.743,00	417.327.757,00	90,89
41.	KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA	1.497.437.200,00	1.448.878.424,00	48.558.776,00	96,76
42.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	16.110.952.950,00	15.424.517.729,00	686.435.221,00	95,74

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
43.	DINAS PETERNAKAN	4.610.146.720,00	4.551.241.370,00	58.905.350,00	98,72
44.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN	6.315.956.150,00	5.574.320.027,00	741.636.123,00	88,26
45.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	2.644.313.200,00	2.420.525.710,00	223.787.490,00	91,54
46.	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	17.900.869.700,00	17.730.550.614,00	170.319.086,00	99,05
47.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.518.336.000,00	12.414.857.538,00	103.478.462,00	99,17
48.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.663.810.500,00	9.281.299.660,00	382.510.840,00	96,04
	JUMLAH	**637.897.737.217,00**	**598.912.818.124,00**	**38.984.919.093,00**	**93,89**

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Dari tabel 3.15 di atas memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) OPD yang tingkat realisasinya berada di bawah 90 persen yaitu Dinas Kesehatan dengan realisasi 89,16%, Sekretariat DP. Korpri dengan realisasi 64,59% dan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan dengan realisasi 88,26%. Realisasi Belanja Langsung menurut Jenis Belanja per OPD dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
1.	**DINAS PENDIDIKAN**	**39.955.733.050,00**	**38.418.406.745,00**	**(1.537.326.305,00)**	**96,15**
	Belanja Pegawai	13.994.015.000,00	13.387.689.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	11.173.130.350,00	10.815.049.705,00		
	Belanja Modal	14.788.587.700,00	14.215.668.040,00		
2.	**DINAS KESEHATAN**	**48.125.957.606,00**	**42.909.180.780,00**	**(5.216.776.826,00)**	**89,16**
	Belanja Pegawai	2.480.430.000,00	2.412.180.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	21.909.413.756,00	18.361.393.639,00		
	Belanja Modal	23.736.113.850,00	22.135.607.141,00		
3.	**RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH**	**24.064.220.000,00**	**22.927.924.856,00**	**(1.136.295.144,00)**	**95,28**
	Belanja Pegawai	2.151.355.000,00	2.131.472.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	8.079.212.390,00	7.803.762.246,00		
	Belanja Modal	13.833.652.610,00	12.992.690.610,00		
4.	**DINAS PEKERJAAN UMUM**	**292.241.966.624,20**	**275.182.971.758,00**	**(17.058.994.866,20)**	**94,16**
	Belanja Pegawai	1.718.340.000,00	1.582.408.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	21.474.663.219,65	19.636.523.261,00		
	Belanja Modal	269.048.963.404,55	253.964.040.497,00		
5.	**DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**	**7.942.846.550,00**	**7.783.627.433,00**	**(159.219.117,00)**	**98,00**
	Belanja Pegawai	1.900.860.000,00	1.864.345.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.367.936.550,00	3.258.857.333,00		
	Belanja Modal	2.674.050.000,00	2.660.425.100,00		
6.	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**6.132.011.290,00**	**5.692.699.270,00**	**(439.312.020,00)**	**92,84**
	Belanja Pegawai	1.670.055.000,00	1.620.215.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.678.880.990,00	3.296.757.270,00		
	Belanja Modal	783.075.300,00	775.727.000,00		
7.	**KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.160.374.000,00**	**1.032.775.100,00**	**(127.598.900,00)**	**89,00**

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Pegawai	114.050.000,00	99.511.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.034.779.000,00	921.719.100,00		
	Belanja Modal	11.545.000,00	11.545.000,00		
8.	**DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**11.812.285.000,00**	**9.484.966.556,00**	**(2.327.318.444,00)**	**80,30**
	Belanja Pegawai	1.310.850.000,00	1.256.560.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	4.936.425.000,00	4.185.459.556,00		
	Belanja Modal	5.565.010.000,00	4.042.947.000,00		
9.	**KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN**	**2.964.717.300,00**	**2.923.347.211,00**	**(41.370.089,00)**	**98,60**
	Belanja Pegawai	155.025.000,00	154.956.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.060.240.300,00	1.048.018.786,00		
	Belanja Modal	1.749.452.000,00	1.720.372.425,00		
10.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**3.707.827.350,00**	**3.668.308.314,00**	**(39.519.036,00)**	**98,93**
	Belanja Pegawai	756.600.000,00	754.885.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	947.314.350,00	911.968.314,00		
	Belanja Modal	2.003.913.000,00	2.001.455.000,00		
11.	**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**	**4.062.484.400,00**	**4.001.982.752,00**	**(60.501.648,00)**	**98,51**
	Belanja Pegawai	585.770.000,00	580.318.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.749.361.400,00	2.713.006.884,00		
	Belanja Modal	727.353.000,00	708.657.868,00		
12.	**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**4.519.522.000,00**	**4.438.446.295,00**	**(81.075.705,00)**	**98,21**
	Belanja Pegawai	637.670.000,00	633.820.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.186.331.400,00	2.134.479.325,00		
	Belanja Modal	1.695.520.600,00	1.670.146.970,00		
13.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**1.454.220.400,00**	**1.323.847.569,00**	**(130.372.831,00)**	**91,03**
	Belanja Pegawai	303.950.000,00	301.950.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	999.286.600,00	872.214.759,00		
	Belanja Modal	150.983.800,00	149.682.810,00		
14.	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**	**1.613.410.600,00**	**1.553.174.215,00**	**(60.236.385,00)**	**96,27**
	Belanja Pegawai	251.260.000,00	250.402.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.328.023.600,00	1.268.645.215,00		
	Belanja Modal	34.127.000,00	34.127.000,00		
15.	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA**	**9.384.197.050,00**	**8.733.334.695,00**	**(650.862.355,00)**	**93,06**
	Belanja Pegawai	624.325.000,00	588.228.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	5.410.983.550,00	5.206.930.747,00		
	Belanja Modal	3.348.888.500,00	2.938.175.948,00		
16.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**2.166.250.400,00**	**2.077.870.904,00**	**(88.379.496,00)**	**95,92**
	Belanja Pegawai	1.142.443.000,00	1.123.497.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.012.557.400,00	951.023.904,00		
	Belanja Modal	11.250.000,00	3.350.000,00		
17.	**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**2.844.697.000,00**	**2.830.776.751,00**	**(13.920.249,00)**	**99,51**
	Belanja Pegawai	774.240.000,00	771.740.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.733.167.000,00	1.723.255.751,00		
	Belanja Modal	337.290.000,00	335.781.000,00		
18	**SEKRETARIAT DPRD**	**23.580.911.253,00**	**21.734.808.278,00**	**(1.846.102.975,00)**	**92,17**
	Belanja Pegawai	1.615.070.000,00	1.517.019.800,00		

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Barang dan Jasa	14.867.326.000,00	13.324.553.478,00		
	Belanja Modal	7.098.515.253,00	6.893.235.000,00		
19	**SEKRETARIAT DAERAH**	**35.660.860.300,00**	**32.170.243.145,00**	**(3.490.617.155,00)**	**90,21**
	Belanja Pegawai	3.831.100.000,00	3.735.558.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	27.617.986.400,00	24.324.118.197,00		
	Belanja Modal	4.211.773.900,00	4.110.566.948,00		
20	**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**9.702.871.150,00**	**9.049.392.755,00**	**(653.478.395,00)**	**93,27**
	Belanja Pegawai	2.069.411.750,00	1.948.589.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	6.845.750.444,00	6.349.359.755,00		
	Belanja Modal	787.708.956,00	751.444.000,00		
21	**INSPEKTORAT**	**3.713.021.900,00**	**3.705.758.927,00**	**(7.262.973,00)**	**99,80**
	Belanja Pegawai	349.310.000,00	349.228.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.922.561.900,00	2.915.771.954,00		
	Belanja Modal	441.150.000,00	440.758.973,00		
22	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.574.789.300,00**	**3.409.600.970,00**	**(165.188.330,00)**	**95,38**
	Belanja Pegawai	842.710.000,00	822.370.950,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.591.260.900,00	2.446.824.020,00		
	Belanja Modal	140.818.400,00	140.406.000,00		
23	**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**	**1.383.299.000,00**	**1.361.886.674,00**	**(21.412.326,00)**	**98,45**
	Belanja Pegawai	371.080.000,00	370.592.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	887.723.500,00	869.812.674,00		
	Belanja Modal	124.495.500,00	121.482.000,00		
24	**SEKRETARIAT DP KORPRI**	**535.075.900,00**	**345.619.470,00**	**(189.456.430,00)**	**64,59**
	Belanja Pegawai	140.930.000,00	81.986.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	344.496.900,00	217.975.970,00		
	Belanja Modal	49.649.000,00	45.657.500,00		
25	**KECAMATAN MUARA SABAK BARAT**	**3.093.488.374,05**	**2.897.756.848,00**	**(195.731.526,05)**	**93,67**
	Belanja Pegawai	1.058.785.000,00	1.052.881.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.161.979.900,00	979.858.048,00		
	Belanja Modal	872.723.474,05	865.017.800,00		
26	**KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR**	**1.565.232.137,95**	**1.561.537.906,00**	**(3.694.231,95)**	**99,76**
	Belanja Pegawai	423.975.000,00	423.975.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	895.447.137,95	891.752.906,00		
	Belanja Modal	245.810.000,00	245.810.000,00		
27	**KECAMATAN MENDAHARA**	**1.138.012.162,18**	**1.109.472.843,00**	**(28.539.319,18)**	**97,49**
	Belanja Pegawai	367.975.000,00	366.932.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	647.004.162,18	619.840.398,00		
	Belanja Modal	123.033.000,00	122.700.445,00		
28	**KECAMATAN MENDAHARA ULU**	**1.302.181.242,96**	**1.294.923.171,00**	**(7.258.071,96)**	**99,44**
	Belanja Pegawai	411.175.000,00	411.172.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	646.282.000,00	639.716.171,00		
	Belanja Modal	244.724.242,96	244.035.000,00		
29	**KECAMATAN GERAGAI**	**1.253.174.488,59**	**1.221.742.215,00**	**(31.432.273,59)**	**97,49**
	Belanja Pegawai	400.505.000,00	400.505.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	618.860.000,00	588.062.215,00		
	Belanja Modal	233.809.488,59	233.175.000,00		
30	**KECAMATAN KUALA JAMBI**	**1.521.149.575,47**	**1.507.622.150,00**	**(13.527.425,47)**	**99,11**
	Belanja Pegawai	543.735.000,00	543.650.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	803.313.275,47	790.149.150,00		
	Belanja Modal	174.101.300,00	173.823.000,00		

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
31	**KECAMATAN DENDANG**	**1.166.402.163,63**	**1.159.847.160,00**	**(6.555.003,63)**	**99,44**
	Belanja Pegawai	456.515.000,00	456.515.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	569.577.163,63	564.393.660,00		
	Belanja Modal	140.310.000,00	138.938.500,00		
32	**KECAMATAN BERBAK**	**1.161.007.541,77**	**1.089.335.050,00**	**(71.672.491,77)**	**93,83**
	Belanja Pegawai	336.470.000,00	330.170.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	635.629.041,77	573.215.050,00		
	Belanja Modal	188.908.500,00	185.950.000,00		
33	**KECAMATAN RANTAU RASAU**	**1.163.628.815,96**	**1.158.403.721,00**	**(5.225.094,96)**	**99,55**
	Belanja Pegawai	404.435.000,00	404.435.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	624.719.600,00	620.613.721,00		
	Belanja Modal	134.474.215,96	133.355.000,00		
34	**KECAMATAN NIPAH PANJANG**	**1.579.162.850,75**	**1.572.506.083,00**	**(6.656.767,75)**	**99,58**
	Belanja Pegawai	615.475.000,00	615.475.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	768.737.850,75	762.811.083,00		
	Belanja Modal	194.950.000,00	194.220.000,00		
35	**KECAMATAN SADU**	**1.347.198.220,49**	**1.269.857.700,00**	**(77.340.520,49)**	**94,26**
	Belanja Pegawai	349.175.000,00	349.175.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	747.823.000,00	672.390.700,00		
	Belanja Modal	250.200.220,49	248.292.000,00		
36	**KANTOR KETAHANAN PANGAN**	**3.459.527.300,00**	**3.297.798.039,00**	**(161.729.261,00)**	**95,33**
	Belanja Pegawai	674.580.000,00	668.810.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.666.297.300,00	2.510.825.039,00		
	Belanja Modal	118.650.000,00	118.163.000,00		
37	**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**	**4.582.200.500,00**	**4.164.872.743,00**	**(417.327.757,00)**	**90,89**
	Belanja Pegawai	897.284.000,00	825.947.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.522.616.500,00	3.183.816.743,00		
	Belanja Modal	162.300.000,00	155.109.000,00		
38	**KANTOR PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI, ARSIP DAN PENGOLAHAN DATA**	**1.497.437.200,00**	**1.448.878.424,00**	**(48.558.776,00)**	**96,76**
	Belanja Pegawai	284.880.000,00	279.392.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	859.957.200,00	821.173.424,00		
	Belanja Modal	352.600.000,00	348.313.000,00		
39	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN**	**16.110.952.950,00**	**15.424.517.729,00**	**(686.435.221,00)**	**95,74**
	Belanja Pegawai	887.460.000,00	792.686.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	8.841.735.900,00	8.423.612.690,00		
	Belanja Modal	6.381.757.050,00	6.208.219.039,00		
40	**DINAS PETERNAKAN**	**4.610.146.720,00**	**4.551.241.370,00**	**(58.905.350,00)**	**98,72**
	Belanja Pegawai	1.122.450.000,00	1.116.683.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.397.619.020,00	2.357.667.266,00		
	Belanja Modal	1.090.077.700,00	1.076.891.104,00		
41	**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**	**6.315.956.150,00**	**5.574.320.027,00**	**(741.636.123,00)**	**88,26**
	Belanja Pegawai	1.588.525.000,00	1.526.490.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.424.654.000,00	2.855.699.027,00		
	Belanja Modal	1.302.777.150,00	1.192.131.000,00		
42	**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**	**2.644.313.200,00**	**2.420.525.710,00**	**(223.787.490,00)**	**91,54**
	Belanja Pegawai	488.250.000,00	449.690.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	1.973.563.200,00	1.788.610.710,00		

No.	Uraian	Tahun 2016 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Modal	182.500.000,00	182.225.000,00		
43	**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**17.900.869.700,00**	**17.730.550.614,00**	**(170.319.086,00)**	**99,05**
	Belanja Pegawai	396.550.000,00	370.902.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	3.162.815.700,00	3.065.524.802,00		
	Belanja Modal	14.341.504.000,00	14.294.123.812,00		
44	**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**12.518.336.000,00**	**12.414.857.538,00**	**(103.478.462,00)**	**99,17**
	Belanja Pegawai	1.327.750.000,00	1.290.710.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	11.009.597.300,00	10.943.789.538,00		
	Belanja Modal	180.988.700,00	180.358.000,00		
45	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**9.663.810.500,00**	**9.281.299.660,00**	**(382.510.840,00)**	**96,04**
	Belanja Pegawai	437.405.000,00	411.205.000,00		
	Belanja Barang dan Jasa	2.791.756.000,00	2.497.100.660,00		
	Belanja Modal	6.434.649.500,00	6.372.994.000,00		
	JUMLAH	**637.897.737.217,00**	**598.912.818.124,00**	**(38.984.919.093,00)**	**93,89**

** Data Sementara (unaudit)*
Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016. Laporan bab ini memberikan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan realisasinya, serta permasalahan solusi penyelesaian masalah. Secara umum bab ini terdiri dari :

1. *Urusan pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*
2. *Urusan pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar*
3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*
4. *Urusan Penunjang Pemerintahan*
5. *Urusan Pendukung Staf Kepala Daerah, Pendukung Staf DPRD;*
6. *Urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Program dan kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang Pemerintahan.

4.1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dinas pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pendidikan. Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pada Tahun 2016 Dinas Pendidikan melaksanakan 13 program dan 85 kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.197.152.250,00	2.098.868.136,00	(98.284.114,00)	95,52
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	829.933.050,00	495.389.000,00	(334.544.050,00)	59,69
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.996.000,00	34.996.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	346.812.500,00	346.363.500,00	(449.000,00)	99,87
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	62.650.000,00	62.645.000,00	(5.000,00)	99,99
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40.000.000,00	39.488.000,00	(512.000,00)	98,72
7	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	5.341.596.750,00	5.336.171.100,00	(5.425.650,00)	99,89
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	19.791.241.702,00	18.513.816.659,00	(1.277.425.043,00)	93,54
9	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH/PERGURUAN TINGGI	4.666.825.650,00	4.607.961.150,00	(58.864.500,00)	98,73
10	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.480.157.000,00	1.470.202.000,00	(9.955.000,00)	99,32
11	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA	438.000.000,00	379.301.000,00	(58.699.000,00)	86,59
12	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.893.575.000,00	4.222.676.000,00	329.101.000,00	108,45
13	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	832.793.148,00	810.529.200,00	(22.263.948,00)	97,32
	JUMLAH	**39.955.733.050,00**	**38.418.406.745,00**	**(1.537.326.305,00)**	**96,15**

Sumber : SIPKD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 7 (tujuh) program teknis yang meliputi :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya serta sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya Pembangunan Sanitasi Dan Air Bersih; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik; Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini; Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini; Pembangunan Gedung Baru; Bantuan Operasional Paud (BOP).

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Taman Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir; Pembangunan Perpustakaan; Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Sekolah; Pengadaan Meubelair Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, Dan Penjaga Sekolah; Pelatihan Penyusunan Kurikulum; Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS); Penyelenggaraan Paket A; Penyelenggaraan Paket B; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa; Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan; Pengadaan Buku Kepustakaan; Pengadaan Peralatan Pendidikan; Pengadaan Media Pendidikan.

c. Program Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi

Program ini merupakan proses pedidikan Menengah/Perguruan Tinggi yang dilaksanakan secara sekuensial. Dalam upaya untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu : Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktek; Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM); Penyelenggaraan Paket C; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa; Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan; Pembangunan Taman Dan Lapangan Upacara.

d. Program Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki. Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal; Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal; Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan; Pengembangan Pendidikan Keaksaraan; Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak yang memiliki kelemahan fisik dan mental. Untuk mencapai sasaran dari program ini, dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Makan Dan Minum Siswa Dan Pengurus SDLB.

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidik sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi PTK; Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan (BOS).

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Penyusunan Perencanaan Dan Program.

Angka Melek Huruf mencapai 95,04% yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk usia diatas 15 tahun keatas sebagian besar telah dapat membaca dan menulis, ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Angka melek huruf di 11 kecamatan sebesar 95,04%, angka melek huruf terendah di kecamatan Mendahara yaitu 94,82% sedang tertinggi di kecamatan Muara Sabak Timur yaitu 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2.
Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15 Th yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 th Keatas	Angka Melek Huruf (%)	Angka Melek Huruf
1	Muara Sabak Barat	11.372	11.592	98,10	11.372
2	MuaraSabakTimur	23.006	23.006	100,00	23.006
3	Mendahara	18.046	19.032	94,82	18.046
4	Mendahara Ulu	11.032	11.524	95,73	11.032
5	Geragai	15.746	16.131	97,61	15.746
6	Dendang	10.508	10.829	97,04	10.508
7	Kuala Jambi	10.005	10.310	97,04	10.005
8	Sadu	8.975	8.998	99,74	8.975
9	Nipah Panjang	17.922	18.619	96,26	17.922
10	Berbak	7.004	7.018	99,80	7.004
11	Rantau Rasau	17.140	17.157	99,90	17.140
	Jumlah	**146.571**	**154.216**	**95,04**	**146.571**

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Pembebasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP maupun SMA/SMK selalu diatas 95%.

Tabel 4.3.
Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016

NO	Uraian	2016		
		Peserta	Siswa Lulus	%
	SD/M1	3.445	3.431	99,59
	SMP/MTs	2.244	2.209	98,44
	SMA/SMK/MA	2.315	2.315	100,00

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.4.
Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2016

NO	Uraian	Siswa Lulus	Siswa Melanjutkan	%
1	SD ke SMP	3.431	3.324	96,88
2	SMP Ke SMA	2.209	2.149	97,28

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Dari berbagai kombinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2016, tergambar capaian Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5.
capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi
1	Angka Melek Huruf	97,75%
2	Angka rata-rata lama sekolah	6,84 %
3	Harapan Lama Sekolah	11,32 %
4	APK PAUD	54,11%
5	APM SD /Sederajat	97,10%
6	APM SMP /Sederajat	84,27%
7	APK SD /Sederajat	112,87%
8	APK SMP /Sederajat	95,66%
9	Angka Partisipasi Sekolah SD	97,12%
10	Angka Partisipasi Sekolah SMP	72,72%
11	Jumlah peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	97,09%
12	Jumlah peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	97,78%
13	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	94,18%
14	Rasio guru/murid SD sederajat	61,39%
15	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	61,29%
16	Rasio guru/murid SMP sederajat	63,94%

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi
17	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%
18	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,32%
19	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,59%
20	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,44%
21	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100,55%
22	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101,00%
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	76,51%
24	Persentase Rasio Ideal rombel SD	97,09%
25	Persentase Rasio Ideal rombel SMP	97,78%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan;
2. Peningkatan Mutu Pendidikan;
3. Penuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
4. Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP;
5. Melaksanakan pemutakhiran data dan kegiatan pelatihan pendataan pangkalan data induk (PADATI) bagi kelompok kerja data (KK Data DIK);
6. Pelaksana kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

4.2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Kesehatan. Pada Tahun 2016 Dinas

Kesehatan melaksanakan 22 program dan 135 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kesehatan tertera dalam tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2016

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.145.409.150,00	1.982.392.029,00	(163.017.121,00)	92,40
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.400.102.000,00	3.894.144.498,00	(505.957.502,00)	88,50
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	31.300.000,00	25.230.000,00	(6.070.000,00)	80,60
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	352.664.000,00	326.216.400,00	(26.447.600,00)	92,50
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.643.212.500,00	2.276.716.884,00	(366.495.616,00)	86,13
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	5.994.642.100,00	5.327.672.105,00	(666.969.995,00)	88,87
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	183.726.000,00	180.195.000,00	(3.531.000,00)	98,07
9	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	203.696.000,00	193.595.100,00	(10.100.900,00)	95,04
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	151.836.500,00	147.076.500,00	(4.760.000,00)	96,86
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	794.760.000,00	756.850.099,00	(37.909.901,00)	95,23
12	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	217.700.000,00	210.200.000,00	(7.500.000,00)	96,55
13	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	18.257.450.450,00	17.320.928.131,00	(936.522.319,00)	94,87
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DAN BALITA	49.800.000,00	42.025.000,00	(7.775.000,00)	84,38
15	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	69.618.500,00	68.828.500,00	(790.000,00)	98,86
16	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	214.527.750,00	213.847.750,00	(680.000,00)	99,68
17	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	811.724.500,00	798.901.549,00	(12.822.951,00)	98,42
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	407.217.000,00	386.927.300,00	(20.289.700,00)	95,01
19	PROGRAM PERIZINAN PRAKTEK KESEHATAN	12.050.000,00	11.700.000,00	(350.000,00)	97,09
20	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	6.475.011.156,00	4.877.964.735,00	(1.597.046.421,00)	75,33
21	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	4.097.000.000,00	3.847.769.200,00	(249.230.800,00)	93,91
22	PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	592.510.000,00	-	(592.510.000,00)	-
	JUMLAH	**48.125.957.606,00**	**42.909.180.780,00**	**(5.216.776.826,00)**	**89,16**

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 17 (tujuh belas) program teknis yang meliputi :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Obat-Obatan; Sosialisasi, Pembinaan Dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya; Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut; Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi; Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan.

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat; Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat; Pembinaan Desa Siaga; Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin; Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS); Pengawasan Kwalitas Air Minum; Pelatihan Pengelola Kesling Puskesmas Dan Kesehatan Kerja.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, TB, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan neoplasma. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah; Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik; Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah.

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat penduduk miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Katarak; Pelayanan Pengobatan Dokter Spesialis Di Puskesmas; Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK).

h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Puskesmas; Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas.

j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus bagi lanjut usia dan balita, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Dan Balita.

k. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program ini bertujuan untuk menjamin kesehatan makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga serta obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan,

Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga; Pembinaan Pengawasan Peredaran Obat Dan Obat Tradisional Di Masyarakat; Penyelarasan Pengadaan Obat BPJS Puskesmas.

l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi; Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP); Pelatihan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK); Pelatihan Manajemen PWS KIA Bagi Bidan Desa; Pelatihan Kelas Ibu Balita Dan Ibu Hamil.

m. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Kebijakan Kesehatan Peningkatan Perencanaan Puskesmas; Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten; Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Terpadu.

n. Program Pengembangan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk lebih memperluas jangkauan pola hidup sehat yang ada di masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Asuhan Keperawatan Pada Keluarga Dan Kelompok Masyarakat; Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas; Pengembangan Organisasi IBI Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

n. Program Perizinan Praktek Kesehatan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan.

o. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat kepastian dalam fasilitas kesehatan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin

Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan.

o. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Izin Praktek Kesehatan.

p. Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Sabak Barat; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Sabak Timur; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Simbur Naik; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Lambur; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Dendang; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan

Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Mendahara; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Berbak; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Sungai Jambat; Penyediaan Dana Jaminan Persalinan Puskesmas Air Hitam Laut.

Adapun realisasi tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No	Uraian	Capaian
I	**PELAYANAN DASAR**	
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	90,74%
2	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	83,91%
3	cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,91%
4	Cakupan pelayanan ibu nifas	94,79%
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	82,27%
6	Cakupan kunjungan bayi	95,49%
7	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95,70%
8	Cakupan pelayanan anak balita	85,43%
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	91,36%
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%
11	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	95,38%
12	Cakupan peserta KB Aktif	85,32%
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	27,53%
II	**PELAYANAN RUJUKAN**	
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	25,81%
2	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberi sarana kesehatan	100%
III	**PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB**	
1	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0%
IV	**PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
1	Cakupan desa siaga aktif	45,16%

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada indikator sasaran yaitu :

Tabel 4.8.
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Daerah	Capaian
1	Angka Usia Harapan Hidup	65,43
2	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21.29/ 1000 KH
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	21.55/ 1000 KH
4	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21.03/ 1000 KH
5	Prevalensi kekurangan gizi (standar WHO, 2005)	0,46%
6	Prevalensi kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak balita	11%
7	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada balita	28%
8	Prevalensi tekanan darah tinggi	13,4%
9	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun	12%
10	Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	20%
11	Cakupan penemuan dan penganan TBParu BTA+	100,0%
12	Cakupan penemuan dan pengangan DBD	100%
13	Prevalensi Penyakit Kusta	0.88/ 1000
14	Angka Kesembuhan TB Paru BTA+	60,8%
15	Jumlah Puskesmas	17 unit
16	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	8 unit
17	Jumlah Pustu	59 unit
18	Jumlah Polindes	28 unit
19	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	27,27%
20	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	6
21	Persentase RS yang terakreditasi	100,00%
22	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	95%
23	Jumlah posyandu	277 unit
24	Jumlah Kematian Ibu	8
25	Angka Kematian Bayi per 1000 KH	21.29/ 1000 KH
26	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4)	90,74
27	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	32,42
28	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	95,49
29	Persentase anak usia 0-59 bln yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	85,4
30	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan	50%
31	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	103,7%
32	Persentase penderita TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100%
33	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	27,53
34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin	26,00
35	Persentase ASI Eksklusif	58,04
36	Persentase keluarga yang mengikuti program keluarga berencana (KB)	80,56
37	Persentase penderita hipertensi mendapat pengobatan secara teratur	
38	Persentase penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantarkan	50
39	Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	61,12
40	Persentase keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	64,75

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena masih terbatasnya kualitas SDM kesehatan untuk menjalankan program – program yang telah di rencanakan;
2. Jumlah tenaga medis dan tenaga farmasi serta gizi di puskesmas masih kurang;
3. Kondisi geografis yang mengakibatkan masih tingginya berbagai mobilitas penyakit seperti filariasis, malaria dan DBD;
4. Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas sehingga untuk mendapatkan data masih sulit;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan;
2. Mengusulkan penerimaan CPNSD dan PTT tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan, penempatan dokter dan tenaga farmasi serta gizi di puskesmas;
3. Mencegah mata rantai penularan penyakit melalui nyamuk dengan fogging, abatesasi dan penyuluhan, sedangkan yang sudah terkena dilakukan pengobatan sesuai dengan program;
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada puskesmas tentang sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas;
5. Melakukan sosialisasi untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS.

4.3. RSUD Nurdin Hamzah

RSUD Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RSUD Nurdin Hamzah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum;
2. Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Kesehatan. Pada Tahun 2016, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan 10 program dan 36 kegiatan. Secara terperinci

jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja RSUD Nurdin Hamzah tertera dalam tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.536.229.300,00	3.463.826.080,00	(72.403.220,00)	97,95
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	795.447.500,00	702.092.800,00	(93.354.700,00)	88,26
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	146.423.500,00	141.137.500,00	(5.286.000,00)	96,38
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.754.000,00	30.722.000,00	(32.000,00)	99,89
5	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	9.888.000,00	9.688.000,00	(200.000,00)	97,97
6	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	166.530.000,00	163.933.600,00	(2.596.400,00)	98,44
7	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	17.900.807.060,00	16.958.492.060,00	(942.315.000,00)	94,73
8	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	1.063.983.640,00	1.056.296.882,00	(7.686.758,00)	99,27
9	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	308.625.000,00	297.425.000,00	(11.200.000,00)	96,37
10	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	105.532.000,00	104.310.934,00	(1.221.066,00)	98,84
	JUMLAH	24.064.220.000,00	22.927.924.856,00	(1.136.295.144,00)	95,28

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan obat dan sarana kefarmasian. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.

b. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pasien serta upaya peningkatan akreditasi Rumah Sakit. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan.

c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tujuan dari program ini adalah Pengembangan Tipe Rumah Sakit dengan penambahan gedung Rawat inap dan penambahan peralatan kesehatan serta pemenuhan bahan medis pakai habis dan Obat-obatan dan sarana rujukan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat-Obatan; Pengadaan Bahan-Bahan Logistik; Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit;

Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah; Pengembangan Tipe Rumah Sakit; Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit.

d. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara aset rumah sakit, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit; Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit.

e. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan.

f. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan strategi menajemen guna upaya peningkatan manajerial pelayanan rumah sakit, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Kebijakan Kesehatan; Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten; Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Terpadu.

Jumlah data pasien yang mendapatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10.
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2015-2016

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien (orang)	
		2015	2016
1	Instalasi Gawat Darurat	3.632	3.458
2	Poliklinik Penyakit Dalam	1.080	1.222
3	Poliklinik Anak	809	639
4	Poliklinik Kebidanan	1.604	1.441
5	Poliklinik Umum	361	305
6	Poliklinik gigi	406	374
7	Poliklinik Bedah	962	840
8	Poliklinik THT	556	646
9	Poliklinik Mata	725	667
10	Poliklinik Paru	562	601
11	Poliklinik Syaraf	688	175
12	Rawat Inap Penyakit Dalam	443	336
13	Rawat Inap Kebidanan	268	235
14	Rawat Inap Anak	405	239
15	Rawat Inap Bedah	627	575
16	Rawat Inap VIP	279	219
17	Perinatologi	65	81
18	ICU	-	44
	Jumlah	**13.472**	**12.097**

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur

Tabel 4.11.
Jumlah Pasien Perbulan RSU Nurdin Hamzah
Tahun 2015-2016

No.	Bulan	Jumlah Pasien (orang)	
		2015	2016
1	Januari	1.130	1.191
2	Februari	1.080	944
3	Maret	1.239	1.123
4	April	1.276	1.063
5	Mei	1.288	954
6	Juni	1.132	719
7	Juli	833	755
8	Agustus	1.054	996
9	September	986	980
10	Oktober	1.232	1.093
11	November	1.051	1.139
12	Desember	1.171	1.140
	Jumlah	13.472	12.097

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur

Tabel 4.12.
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2015-2016

No.	Jenis Pelayanan	2015	2016
1	Rawat Jalan	11.385	10.368
2	Rawat Inap	2.087	1.729
	Jumlah	13.472	12.097

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur

Berikut kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini :

Tabel 4.13.

Data Efisiensi Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2016

Indikator Pelayanan	Capaian	Angka Ideal
Bor (Bed Occupancy Rate)	23,23%	60-85%
ALOS (Average Length Of Stay)	2 Hari	6-9 Hari
BTO (Bed Turn Over)	31 X	50 Kali
TOI (Turn Over Interval)	9 Hari	1-3 hari
NDR (Net Death Rate)	1,19%	Tidak Lebih dari 55/1000
GDR (Gross Death Rate)	3,69%	< 25/1000

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Adapun keberhasilan RSU Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 antara lain :

1. Perubahan type rumah sakit dari type D menjadi Type C
2. Telah lulus akreditasi tingkat perdana

Secara Umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSU Nurdin Hamzah Kabupeten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme penyusunan perencanaan rumah sakit akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pemutkahiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan rumah sakit akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan secara berkesinambungan;
4. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.4. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 14 program dan 42 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pekerjaan Umum tertera dalam tabel 4.14 dibawah ini.

Tabel 4.14.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.741.270.000,00	1.647.398.001,00	(93.871.999,00)	94,60
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	14.814.349.002,90	12.612.648.458,00	(2.201.700.544,90)	85,13
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	48.900.000,00	46.900.000,00	(2.000.000,00)	95,91
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	220.000.000,00	192.320.195,00	(27.679.805,00)	87,41
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	193.850.000,00	168.881.900,00	(24.968.100,00)	87,11
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	182.500.000,00	126.449.779,00	(56.050.221,00)	69,28
7	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	194.212.940.134,30	184.457.023.617,00	(9.755.916.517,30)	94,97
8	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	4.067.179.750,00	3.813.766.950,00	(253.412.800,00)	93,76
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	300.000.000,00	249.212.400,00	(50.787.600,00)	83,07
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	39.411.657.850,00	37.069.305.200,00	(2.342.352.650,00)	94,05
11	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	55.000.000,00	54.970.000,00	(30.000,00)	99,94
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	9.228.593.337,00	8.880.836.435,00	(347.756.902,00)	96,23
13	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	4.993.371.000,00	3.925.150.750,00	(1.068.220.250,00)	78,60
14	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	22.772.355.550,00	21.938.108.073,00	(834.247.477,00)	96,33
	JUMLAH	292.241.966.624,20	275.182.971.758,00	(17.058.994.866,20)	94,16

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang meliputi :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan; Pembangunan Jalan; Perencanaan Pembangunan Jembatan; Pembangunan Jembatan; Rehab Jembatan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini dimaksudkan untuk membangun saluran drainase dan gorong-gorong guna meningkatkan daya tampung limpahan air permukaan dan mengurangi kawasan genangan air. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat berupa Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.

e. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah.

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum.

g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk pengembangan wilayah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Sanitasi Permukiman Di Daerah.

h. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan.

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2016, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.15.
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	Panjang Jalan Kabupaten	993,88 Km
2	Jalan Kabupaten Dalam Kondisi mantap	77,94%
3	Cakupan rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	54,04%
4	Terhubungnya seluruh sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dalam kondisi baik	73,60%
5	Jalan desa yang dilalui roda empat	233,70 Km
6	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk	467,855 Km
7	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	20,42%
8	Peningkatan jumlah infrastruktur irigasi	122,88 km
9	Persentase jaringan Irigasi dalam kondisi balk	73,72%
10	Tersedianya Infrastruktur pertanian dan perikanan yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian	Pemb tanggul: 180.849.9 M
		Rehab Irigasi 13.687,5M
		Pintu air :8Unit
		Op: 186.516,14M
11	Ada komunikasi/transportasi dua arah yang efektif	70%
12	Persentase Peningkatan rumah sehat	60,34%
13	Akses sanitasi layak	64,75%

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2016 dalam aspek Belanja Langsung adalah :

1. Besarnya biaya perawatan alat berat karena usia alat lebih dari 9 (sembilan) tahun;
2. Harga sewa lebih tinggi dari standar harga sewa di Propinsi Jambi;
3. Kurangnya tenaga operator sehingga masih ada pengawas yang merangkap sebagai operator.

Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2016 dalam aspek Belanja Langsung adalah :

1. Menganggarkan biaya perawatan sesuai dengan yang dibutuhkan dan mulai merencanakan untuk peremajaan alat;
2. Melakukan perubahan harga sewa pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
3. Mengusulkan pembangunan workshop untuk tempat alat berat didaerah zona 2.

4.5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Tatakota dan Kebersihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tatakota dan Kebersihan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tatakota dan Kebersihan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 2 (dua) bidang urusan yaitu : 1). Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2). bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Pada Tahun 2016, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 10 program dan 26 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan tertera dalam tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.954.569.576,00	2.912.900.158,00	(41.669.418,00)	98,58
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.095.790.000,00	1.065.336.050,00	(30.453.950,00)	97,22
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.100.000,00	69.750.650,00	(1.349.350,00)	98,10
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	48.500.000,00	(1.500.000,00)	97,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.500.000,00	14.907.000,00	(1.593.000,00)	90,34
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	156.050.000,00	137.215.800,00	(18.834.200,00)	87,93
7	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	44.500.000,00	43.198.000,00	(1.302.000,00)	97,07
8	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	1.762.361.974,00	1.737.297.975,00	(25.063.999,00)	98,57
9	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	892.975.000,00	885.987.600,00	(6.987.400,00)	99,21
10	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	899.000.000,00	868.534.200,00	(30.465.800,00)	96,61
	JUMLAH	7.942.846.550,00	7.783.627.433,00	(159.219.117,00)	98,00

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini dimaksudkan untuk memonitoring dan mengevaluasi tata ruang di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

b. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini dimaksudkan dalam upaya pemanfaatan ruang sehingga lebih efektif, efiesien dan berestetika. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bangunan Dan Gedung; Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan; Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota; Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman.

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program pengendalian dan pemanfaatan ruang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan.

d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang

diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran; Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Adapun permasalahan yang ditimbulkan dari dampak realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, antara lain :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik Kuantitas maupun Kualitas sehingga sangat mempengaruhi operasional kinerja pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
2. Sarana dan Prasarana Kantor, Operasional kendaraan, maupun peralatan Pemadam Kebakaran dan Kebersihan yang terbatas.

Oleh karena hal tersebut perlu adanya upaya pemecahan masalah, seperti :

1. Perlu penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan agar kinerja lebih baik di tahun selanjutnya.
2. Penambahan anggaran dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana baik prasarana kantor maupun bidang Penataan Kota, bidang penanggulangan kebakaran serta bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.

4.6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat*. Pada Tahun 2016, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tertera dalam tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.17.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.459.226.050,00	1.441.348.304,00	(17.877.746,00)	98,77
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	136.600.100,00	129.817.100,00	(6.783.000,00)	95,03
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	92.529.200,00	91.992.100,00	(537.100,00)	99,41
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	93.307.050,00	56.307.250,00	(36.999.800,00)	60,34
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.721.000,00	4.985.000,00	(9.736.000,00)	33,86
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
7	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	349.867.000,00	333.421.150,00	(16.445.850,00)	95,29
	JUMLAH	2.166.250.400,00	2.077.870.904,00	(88.379.496,00)	95,92

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 1 (satu) program teknis yang meliputi :

a. Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah

Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah merupakan program sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Tujuan dari program ini adalah menciptakan keadaan lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-Orang Penting Dan Penjagaan Aset-Aset Daerah; Citra Praja Wibawa; Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah; Pengendalian Keamanan Lingkungan;

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini :

Tabel 4.18.
Kegiatan Penertiban Tahun 2016

No.	Uraian Kegiatan Penertiban/Lokasi	Perda/Peraturan Perundangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban	Keterangan
1	Pasar Senin Catur Rahayu	-	9 kali	aman dan tertib
2	Pasar Rabu Sido Mukti	-	9 kali	aman dan tertib
3	Pasar Jumat Rantau Indah	-	9 kali	aman dan tertib
4	Pemantauan Pasar Desa Bangun Karya	-	7 kali	aman dan tertib
5	Pasar Tradisional Kec.Ma. Sabak Barat	perda nomor 6 tahun 2014 tentang pemberdayaan pasar	4 kali	aman dan tertib
6	Peninjauan dan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan kadaluarsa	perda nomor 2 tahun 2015 tentang pelarangan dan penertiban penyakit	2 kali	aman dan tertib

Tabel 4.19.
Kegiatan Pengamanan 2016

No.	Uraian Kegiatan Pengamanan	Lokasi	Instansi Terkait	Keterangan
1	Pengamanan Musrenbang Kecamatan Dendang yang dihadiri oleh Asisten I anggota DPRD Dapil I dan Instansi terkait pada tanggal 15 - 02 - 2016	Aula Kantor Camat	Polsek Kecamatan Dendang	Aman Terkendali
2	Pengamanan Rapat Sengketa Lahan antara Sdr Madelang dengan Sdr Sukri di Desa Jati Mulyo pada tanggal 18 - 02 - 2016	Ruangan Camat Dendang	-	Telah diadukan Sdr Sukri warga Desa Jati Mulyo oleh Sdr Madelang
3	Pengamanan Kunjungan Kerja anggota DPRD dalam masa Reses, menijau bangunan BBI dan PDAM	Desa Kota Kandis Dendang Kel. Rantau Indah	-	Aman dan Terkendali
4	Pengamanan Kunjungan Bapak Bupati dalam rangka Halal Bi Halal pada tanggal 29 Juli2016	Desa Sido Mukti	Polri dan LLSDP Kec. Dendang	Aman Terkendali
5	Pengamanan Kunjungan Ibu Bupati dalam rangka Pembinaan PKK	Desa Kota Kandis Dendang	Linmas Desa	Aman Terkendali
6	Upacara Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI	Desa Kota Kandis	Polri, LLSDP dan Linmas Kec. Dendang	Aman Terkendali
7	Pengamanan Pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2016 pada tanggal 16 November 2016	Desa Kota Kandis Desa Kota Kandis Dendang Desa Jati Mulyo Desa Catur Rahayii	-	Aman Terkendali

Tabel 4.20.
Penegakan Perda 2016

NO.	PERATURAN DAERAH/KEPUTUSAN DALAM DAERAH		PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
	JENIS	Jumlah	JENIS	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Penertiban Hewan Ternak Liar	2 Kali	Pelanggaran tentang melepaskan hewan ternak	1	Dinas Peternakan Kecamatan Kel. Parit Culum I Kel. TalangBabat Kel. Rano	Aman
2	Razia Minuman Keras	2 Kali	Pelanggaran menjual Minuman keras.			Aman

Anggaran yang dialokasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengamanan aset daerah, penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban masyarakat.

Adapun keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 antara lain :

a. Keadaan lingkungan yang relatif aman dari gangguan keramaian dan kebisingan
b. Tingkat pelanggaran perda yang relative rendah.

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan Perda serta aset–aset Pemda yang ada di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan-pelatihan dan Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pedidikan Dasar (Diksar) dan pendidikan dan latihan (Diklat) serta Mensosialisasikan pentingnya penegakan Perda;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam usaha penegakan Peraturan Daerah;
4. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4.7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, selama tahun 2016 telah dilaksanakan total 12 (dua belas) program yang terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 6 (enam) program pembangunan serta 42 (empat puluh dua) kegiatan yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan rutin dan 20 (dua puluh) kegiatan pembangunan.

Tabel 4.21.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	691.683.500,00	689.788.356,00	(1.895.144,00)	99,72
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	327.450.000,00	325.907.908,00	(1.542.092,00)	99,52
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.050.000,00	10.050.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.000.000,00	7.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	130.000.000,00	128.907.270,00	(1.092.730,00)	99,15
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.710.000,00	(290.000,00)	98,55
7	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	563.964.000,00	563.660.917,00	(303.083,00)	99,94
8	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	241.083.500,00	240.039.000,00	(1.044.500,00)	99,56
9	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	236.273.000,00	234.881.800,00	(1.391.200,00)	99,41
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	80.604.000,00	80.314.000,00	(290.000,00)	99,64
11	PROGRAM PENINGKATAN PEMBARATASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	73.748.000,00	73.708.000,00	(40.000,00)	99,94
12	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	462.841.000,00	456.809.500,00	(6.031.500,00)	98,69
	JUMLAH	2.844.697.000,00	2.830.776.751,00	(13.920.249,00)	99,51

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pada saat pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada. Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan; Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamana Lingkungan; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan meningkatkan pengamalan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang saat ini mulai menurun, hal ini ditandai dengan menyebarnya ideologi/faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, meningkatnya radikalisme, terorisme dan konflik SARA. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan meningkatkan pengamalan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang saat ini mulai menurun, hal ini ditandai dengan menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air, tergerusnya karakter/jati diri bangsa dan kearifan lokal, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan menyebarnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pelajar Tingkat SLTA; Lomba Cipta Karya Tulis Ilmiah Dan Seminar Empat Pilar Kebangsaan Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan; Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas, LSM Dan OKP;

d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggainya. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarkat; Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM);

e. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Merupakan program sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011-2015 dan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkoba.

Penyuluhan Pencagahan Penggunaan Narkoba, Minuman Keras, Prostitusi, Premanisme Dan Perjudian;

f. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); Penanganan Gangguan Keamanan; Bimbingan Teknis Tentang Bantuan Keuangan Parpol; Kegiatan Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik; Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan- Undangan Tentang Undang- Undang Bidang Politik; Koordinasi Kegiatan Orang Asing, Lsm Asing Dan Tenaga Kerja Asing;

Berikut jumlah anggaran dan realisasi bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2016.

Tabel.4.22.
Jumlah Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Parpol TA. 2016

NO	NAMA PARPOL	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)	403.743.200	403.743.200	100%
2.	Partai GOLKAR	60.146.000	60.146.000	100%
3.	PDIP	63.913.200	63.913.200	100%
4.	Partai HANURA	55.787.200	55.787.200	100%
5.	Partai DEIMOKRAT	68.938.400	68.938.400	100%
6.	Partai GERINDRA	43.214.000	43.214.000	100%
7.	PBB	34.863.600	34.863.600	100%
8.	Partai NASDEM	62.158.800	62.158.800	100%
	Jumlah Total	**792.764.400**	**792.764.400**	**100%**

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpollinmas Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.23.
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpollinmas Tahun 2016

No.	indikator kinerja	target	realisasi	persentase
1	persentase tingkat keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat	100%	100%	100%
2	Indeks Aspek kebebasan sipil	86,8	86,8	100%
3	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	72	72	100%
4	Persentase pos kamling yang aktif	72,05%	72,05%	100%
5	Indeks Aspek hak-hak politik	58,3	58,3	100%

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpollinmas Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cendrung dinamis, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya;
2. KondisI ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpencar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubungi yang berakibat belum tercapainya salah satu kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Masih terdapat rumah ibadah yang belum memiliki izin pendirian sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama;
4. Masih terdapat tapal batas antar wilayah, hak guna lahan antara warga dan perusahaan yang belum terselesaikan sehingga dapat menlmbulkan terjadinya konflik;
5. Belum optimainya pos ronda sehingga menyebabkan keterbatasan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat;
6. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus partai politik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, hal ini menyebabkan sering terlambatnya penyerahan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang di hadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain:

1. Mengajukan permintaan penambahan personil kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama struktural eselon IV/a;
2. Menata dan Menginventarisir kembali keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan organisasi lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan Wakil

Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;

4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian tapal batas antar wiiayah dan hak guna lahan antar warga dan perusahan;
5. Memberdayakan Satgas Linmas Kabupaten 31 Orang, Satgas Linmas Kec. 110 Orang, Satgas Linmas Desa/Kel. 465 orang untuk deteksi dini dalam membantu menciptakan kemanan dan kenyamanan lingkungan sekaligus evakuasi dan penanggulangan bencana serta mengaktifkan pos ronda yang ada dlingkungan masyarakat.
6. Mengadakan Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) kepada pengurus partai politik tentang Penggunaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban daña Bantuan Keuangan kepada partai politik.

4.8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas pokok termasuk dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Sosial* dan; urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Tenaga Kerja dan Transmigrasi*. Selama Tahun 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 15 program dan 43 kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 4.24 dibawah ini.

Tabel 4.24.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	823.238.900,00	806.894.650,00	(16.344.250,00)	98,01
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.460.805.600,00	1.415.478.500,00	(45.327.100,00)	96,89
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.360.000,00	18.360.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.200.000,00	79.010.600,00	(189.400,00)	99,76
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	124.550.000,00	124.289.000,00	(261.000,00)	99,79
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	106.250.000,00	106.184.150,00	(65.850,00)	99,93
7	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	290.605.000,00	289.145.000,00	(1.460.000,00)	99,49
8	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	80.000.000,00	79.940.000,00	(60.000,00)	99,92
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	170.000.000,00	169.302.000,00	(698.000,00)	99,58
10	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	110.162.500,00	110.161.825,00	(675,00)	99,99
12	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	588.412.500,00	580.534.800,00	(7.877.700,00)	98,66
13	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	27.075.000,00	27.075.000,00	-	100,00
14	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	60.862.500,00	60.862.500,00	-	100,00
15	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	550.000.000,00	541.208.270,00	(8.791.730,00)	98,40
	JUMLAH	4.519.522.000,00	4.438.446.295,00	(81.075.705,00)	98,21

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pelaksanaan kegiatan ini yaitu melaksanakan Pelatihan dari dana APBD Kabupaten dan Pelatihan dari dana APBD Provinsi, bertujuan memberikan pelatihan bagi pencari kerja dengan mengembangkan keahlian yang dimiliki. Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan transmigrasi dari dana APBD Kabupaten telah melatih 12 (Dua Betas) orang untuk pelatihan menjahit/ bordir dan 20 (dua puluh) orang untuk pelatihan otomotif. APBD Provinsi melalui Dana Dekonsentrasi telah melatih 564 (lima ratus enam puluh empat) orang yakni dengan pelatihan menjahit pakaian dasar, pelatihan customed pakaian wanita dan anak, pelatihan instalasi listrik penerangan, pelatihan teknis las listrik, pelatihan perawatan dan perbaikan **sepeda motor** dan pelatihan *basic office tools* .

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Penyebarluasan Informasi bursa Tenaga Kerja

Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi bursa tenaga kerja kepada pencari kerja dengan memberikan informasi secara on line dan membuat spanduk atau leaflet.

2.) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah melatih 18 (delapan belas) orang yang tergabung dalam kelompok kerja Dasawisma.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitas atau memberikan solusi pada perusahaan - perusahaan yang mengalami masalah dengan pemerintah, perusahaan yang bermasalah dengan perusahaan lain dan perusahaan yang bermasalah dengan tenaga kerjanya.

2.) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat mengenai berbagai peraturan dalam pelaksanaan ketenagakerjaan.

3.) Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja, serta tercapaianya hubungan kerja yang baik antara perusahaan dengan Tenaga Kerja Lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA).

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Memiliki 1 (Satu) Kegiatan :

1.) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penghasilan usaha keluarga miskin (Rawan Sosial Ekonomi), terpenuhinya kehidupan yang layak secara ekonomi dan sosial bagi keluarga miskin. Pada Tahun Anggaran 2016 tersalurkanya bantuan usaha bagi keluarga miskin.

e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Penanganan masalah - masalah Strategis yang Menyangkut tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tanggap cepat darurat dalam penanggulangan bencana, anggota TAGANA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Tahun 2016 berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) Orang dan berperan aktif membantu kejadian luar biasa/bencana serta penyaluran bantuan terhadap korban bencana.

2.) Pemberian Bantuan UEP Bagi Lansia Prosuktif

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keberfungsian sosial lansia produktif dan meningkatkan paran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan lansia. Pada tahun 2016 ini terlaksana pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi lansia produktif.

3.) Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)

Kegiatan ini meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan peringatan hari Pahlawan yang bertujuan meningkatkan atau menjunjung tinggi nilai dan jasa perjuangan pahlawan.

4.) Penanganan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Warga Harapan (PKH)

Kegiatan ini meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga terwujudnya kesejahteraan keluarga melalui kegiatan program keluarga harapan (PKH). Pada tahun 2016 terlaksananya program keluarga harapan sesuai dengan target dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.

f. Program Pembinaan Anak Telantar

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Pemberian Bantuan UEP dan Pelatihan/kursus

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri. Pada tahun anggaran 2016 telah melaksanakan bimbingan teknis atau kursus di PSBRW Harapan Mulia sebanyak 2 Kelompok.

g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pada tahun 2016 program ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.

h. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kawasan transmigrasi, serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membangun kawasan kebun buah skala orchad.

2.) Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi

Kegiatan ini mensosialisasikan tentang kepemilikan sertifikasi lahan transmigrasi milik masyarakat, dengan memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki sertifikat atau lahan transmigrasi milik masyarakat yang bermasalah kepemilikannya.

Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan urusan wajib pada Kegiatan Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 4.25.
Capaian Kinerja Dinas Sosnakertrans berdasarkan Urusan Wajib
Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2016

No	Uraian	Capaian Tahun 2016
1	Berfungsinya ruang teori BLK	1 Unit
2	Jumlah tenaga kerja yang terserap	355 orang
3	UMR	Rp1.502.230
4	Jumlah pelatihan	7 Kali
5	Jumlah perusahaan yang dimonitor terkait peraturan Per UU Ketenagakerjaan	16 Perusahaan
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64,75%
7	Angka kesempatan kerja	355 orang
8	Meningkatnya peran organisasi yang ditempatkan	1 Organisasi
9	Jenis dan jumlah kegiatan	6 Jenis bantuan
10	Jumlah keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi	3 KK
11	Jumlah lansia yang dilayani	1 orang
12	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih	100 orang
13	Menurunnya angka anak telantar pertahun	0
14	Para penyandang cacat diseluruh kecamatan	0
15	Jumlah eks penyandang sosial yang dilatih keterampilan berusaha	100 orang
16	Jumlah penyandang cacat yang direhabilitasi panti	1 orang
17	Persentase penurunan eks penyandang penyakit sosial ditempat terindikasi penyebaran	0
18	Persentase perlindungan dan pembinaan anak telantar (Jumlah anak telantar yang berhasil dilayani, dilindungi, dan dibina)	20 orang
19	Penanganan bencana yang cepat dan tepat	korban dapat diselamatkan mencapai 100%
20	Masyarakat yang mengalami musibah mendapat santunan	100% dari jumlah masyarakat terkena musibah

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan urusan pilihan pada Kegiatan Tahun Anggaran 2016, dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.26.
Capaian Kinerja Dinas Sosnakertrans berdasarkan Urusan Pilihan
Kab. Tanjung Jabung Timur TA. 2016

No	Uraian	Capaian Tahun 2016
1.	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan di Kecamatan	1 Mini Tractor
2.	Sosialisasi Sertifikasi Lahan Kawasan Kota Terpadu Mandiri	3 Kawasan
3.	Evaluasi Dokumen Lingkungan Kawasan KTM	3 Kawasan

Sumber : LKPJ Dinas Sosnakertrans Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Program Kegiatan pada Tahun 2016, antara lain :

1. Belum adanya penyusun perencanaan ketenagakerjaan.
2. Kurangnya ketersediaan infrastruktur/ tenaga ahli di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Transportasi pengawas yang belum tersedia sehingga sulit untuk menjangkau perusahaan - perusahaan yang jauh;
4. Belum optimalnya jaringan internet dan perangkatnya untuk Kegiatan Bursa Kerja Online (BKOL), sehingga tidak dapat mensupport Bursa Online Nasional;
5. Masih kurangnya bantuan pada Tahun 2016 yang dapat diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial disebabkan pengurangan anggaran pada saat APBDP;
6. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Karang Taruna dalam organisasi masyarakat guna mendukung kegiatan penanganan PMKS;
7. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan tidak terbentuknya Kampung Siaga Bencana;
8. Kurangnya data pendukung guna sertifikasi lahan transmigrasi;
9. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pada fasilitas umum yang telah dibangun pada pusat KTM Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti: jalan utama kawasan KTM dan jalan ke kebun buah yang belum diaspal, dan pemeliharaan gedung pusat bisnis dan gedung UPTD KTM.

Solusi yang bisa membantu dalam permasalahan yang terdapat Program Kegiatan Tahun 2016, antara Lain :

1. Melakukan Peningkatan SDM Staf mengikuti Bimtek Penyusunan perencanaan tenaga kerja;
2. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk instruktur di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Menyediakan transportasi yang sesuai dengan kondisi alam bagi Pengawas untuk kelancaran dalam pengawasan tenaga kerja di setiap Perusahaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Meningkatkan Jaringan Internet dan pembaruan perangkat komputer sehingga dapat mendukung kegiatan Bursa Online Nasional;

5. Untuk dapat ditambahkan anggaran bantuan kepada seluruh Penyandang Masalah Kesejahteraaan Sosial (PMKS);
6. Melakukan Peningkatan SDM Karang Taruna melalui Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Karang Taruna guna peran aktif Karang Taruna dalam Penanganan PMKS;
7. Untuk dapat dianggarkan kembali kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Simulasi/Pembentukan Lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB);
8. Melaksanakan Kegiatan pengumpuian data - data guna sertifikasi atau ex. Trans yang telah memiliki sertifikat;
9. Pengadaan Mini Traktor guna mendukung sarana operasional pembersihan Kebun Buah di kawasan KTM Geragai.

4.9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasi pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Sosial*. Pada Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 10 program dan 28 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertera dalam tabel 4.27 dibawah ini.

Tabel 4.27.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	559.140.900,00	536.137.696,00	(23.003.204,00)	95,88
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	119.800.000,00	115.897.750,00	(3.902.250,00)	96,74
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.600.000,00	11.531.444,00	(68.556,00)	99,40
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	-
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42.885.000,00	40.806.350,00	(2.078.650,00)	95,15
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	55.000.000,00	54.464.200,00	(535.800,00)	99,02
7	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT	49.037.500,00	48.768.750,00	(268.750,00)	99,45
8	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	159.985.000,00	148.460.970,00	(11.524.030,00)	92,79
9	PROGRAM TANGGAP DARURAT	389.460.000,00	309.087.209,00	(80.372.791,00)	79,36
10	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	60.312.000,00	58.693.200,00	(1.618.800,00)	97,31
	JUMLAH	**1.454.220.400,00**	**1.323.847.569,00**	**(130.372.831,00)**	91,03

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga teknis Masyarakat

Tujuan program ini untuk memperkuat kesiapsiagaan tenaga dalam penanggulangan bencana khususnya tenaga yang berasal dari relawan masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana.

b. Program Pencengahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Tujuan program ini sebagai upaya pemerintah dalam mencegah maupun mengurangi resiko bencana yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Bencana; Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana; Pencegahan Dan Pengurangan Resiko Bencana; Fasilitasi Dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana.

c. Program Tanggap Darurat

Tujuan program ini sebagai upaya penanganan bencana pada saat terjadi, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana; Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Latihan Bersama Penanggulangan Bencana.

d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan program ini sebagai upaya penanganan pasca bencana, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam, untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada Bab VI dalam dokumen LKPJ ini.

Dalam menjalankan program/kegiatan pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif;
2. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan;
3. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisionai, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana;
4. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, PUSDATIN;
5. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian;
6. Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang belum tercipta secara baik;
7. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsif sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar;
8. Belum terdapatnya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi;
9. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana dan personil.

Permasalahan yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dicarikan solusi pemecahannya, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya :

1. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang bias terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penanggulangan bencana;

3. Mengajukan permohonan peralatan dasar dalam penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur;
4. Mengajukan penambahan anggaran untuk penanggulangan bencana, karena dana dari APBD sangat kurang untuk penangulangan bencana ini;
5. Mengajukan permintaan pertambahan personil Kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Badan Kepegawaian Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama strukturan esolan IV;
6. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) serta relawan penanggulangan bencana sehingga TRC dan relawan ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur;
7. Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat.

4.10. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 2 (dua) bidang urusan yaitu : 1). Bidang urusan *pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 2).* Bidang urusan *pengendalian penduduk dan keluarga berencana*. Pada Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan 15 program dan 44

kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tertera dalam tabel 4.28 dibawah ini.

Tabel 4.28.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	632.912.100,00	625.213.500,00	(7.698.600,00)	98,78
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	399.005.000,00	394.787.984,00	(4.217.016,00)	98,94
3	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	4.296.000,00	4.296.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	21.030.100,00	20.970.000,00	(60.100,00)	99,71
6	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.937.500,00	29.737.500,00	(11.200.000,00)	72,64
7	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	445.225.000,00	433.225.000,00	(12.000.000,00)	97,30
8	KELUARGA BERENCANA	2.184.127.200,00	2.159.215.868,00	(24.911.332,00)	98,85
9	KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	42.675.000,00	42.675.000,00	-	100,00
10	PELAYANAN KONTRASEPSI	31.825.000,00	31.745.000,00	(80.000,00)	99,74
11	PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	167.987.500,00	167.843.900,00	(143.600,00)	99,91
12	PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)	16.925.000,00	16.815.000,00	(110.000,00)	99,35
13	PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS DAN HIV AIDS	21.914.000,00	21.833.000,00	(81.000,00)	99,63
14	PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
15	PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	28.625.000,00	28.625.000,00	-	100,00
	JUMLAH	4.062.484.400,00	4.001.982.752,00	(60.501.648,00)	98,51

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 11 (sebelas) program teknis yang meliputi :

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) diberbagai bidang pembangunan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan Dan Anak; Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak.

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah.

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mendorong terakomodasinya peran serta perempuan dalam pembangunan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera (P2WKSS); Gerakan Sayang Ibu; Kegiatan Gerakan Organisasi Wanita (GOW); Kegiatan Dharma Wanita Persatuan.

d. Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alkon Bagi Keluarga Miskin; Pelayanan Kie (Konsumsi, Informasi & Edukasi; Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu; Pembinaan Keluarga Berencana; Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan KR; Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling; Penyediaan Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB.

e. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi Dan Kie Tentang KRR Dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan); Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat.

f. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan keluarga berencana kesehatan manunggal dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi metode operasi wanita dan metode operasi pria. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan KB Metode Operasi; Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon).

g. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasiltasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB; Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB; Koordinasi Pengelola Program; Pengelola Data Dan Informasi Program KB.

h. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Program ini ditujukan untuk memberi pelayanan kepada remaja dalam kesehatan reproduksi remaja. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling.

i. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Dan HIV/AIDs.

j. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

k. Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan.

Hasil kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2016 dapat dilihat antara lain dengan membandingkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi mengalami pertumbuhan negatif sebesar *minus* 19,34 % dari tahun 2015; PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi mengalami pertumbuhan sebesar 68,74% dari tahun 2015; Peserta KB baru mengalami pertumbuhan sebesar *minus* 49,51% dari tahun 2015; dan KB aktif tumbuh sebesar 0,01% dari tahun 2015. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.29.
Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Sampai dengan Tahun 2016

No	Uraian	Capaian Tahun 2016
1	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif	34.848 Akseptor
2	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efesien/alat kontrasepsi	1.981 Akseptor
3	Peserta KB baru	7.071 Akseptor
4	Peserta KB Aktif	84.39%

Sumber : LKPJ Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, 2016

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam capaian kinerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia, masih menjadi kendala sampai tahun 2016;
2. Sarana dan prasarana pelayanan KB yang dapat dimobilisasi secara cepat belum ada;
3. Sulitnya melaksanakan pelayanan KB dan penggerakan masyarakat perempuan diwilayah terpencil;
4. Minimnya instrumen dan pemahaman program bagi tenaga ditingkat lapangan khususnya dibidang pemberdayaan perempuan;

5. Rendahnya kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat maupun oleh korban kekerasan.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melakukan/Mengikutsertakan beberapa tenaga lapangan dalam pelatihan-pelatihan baik di Kabupaten maupun di Provinsi;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB;
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan penyebaran luasan informasi melalui Brosur, Spanduk dan selebaran;
4. Melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna meningkatkan kinerja petugas lapangan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang KB;
5. Melakukan Advokasi kepada pimpinan wilayah dan organisasi yang berada ditingkat kecamatan maupun di kelurahan dan desa dalam melaksanakan kegiatan KB dan kasus-kasus kekerasan yang ada diwilayah kecamatan maupun di kelurahan dan desa.

4.11. Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Pangan*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan ketahanan pangan dalam pembangunan daerah, selama tahun 2016 telah dilaksanakan total 6 (enam) program yang terdiri dari 5 (lima) program, rutin dan 1 (satu) program pembangunan serta 30 (tiga puluh) kegiatan yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan rutin dan 10 (sepuluh) kegiatan pembangunan.

Tabel 4.30.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Ketahanan PanganTahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	993.380.000,00	933.019.756,00	(60.360.244,00)	93,92
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	346.750.000,00	340.835.100,00	(5.914.900,00)	98,29
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	16.650.000,00	15.750.000,00	(900.000,00)	94,59
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	18.000.000,00	17.550.000,00	(450.000,00)	97,50
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	18.805.000,00	(1.195.000,00)	94,02
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.064.747.300,00	1.971.838.183,00	(92.909.117,00)	95,50
	JUMLAH	3.459.527.300,00	3.297.798.039,00	(161.729.261,00)	95,33

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberkelanjutan ketahanan pangan sampai ketingkat rumah tangga. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Pengembangan Cadangan Pangan Daerah; Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pengembangan Lumbung Pangan Desa; Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional & Propinsi; Koordinasi Perumusan Program KP; Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; Penilaian Lomba-Lomba Ketahanan Pangan.

Sampai dengan tahun 2016, Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.31.
Keragaman dan Ketersediaan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH)

No	**Kelompok Pangan**	**Gram / Kap/ Hari**	**Kalori**	**%**	**% AKE*)**	**Bobot**	**Skor Aktual**	**Skor AKE**	**Skor Maks**	**Gap skor AKE dan Skor Maks**	**Skor PPH**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
1	Padi-padian	309,3	1188	58,5	59,9	0,5	29,2	30	25	5	25
2	Umbi-umbian	46,4	51	2,5	2,6	0,5	1,3	1,3	2,5	-1,2	1,3
3	Pangan Hewani	121,9	192	9,4	9,7	2	18,9	19,3	24	-4,7	19,3
4	Minyak dan Lemak	33,5	301	14,8	15,2	0,5	7,4	7,6	5	2,6	5
5	Buah/Biji Berminyak	8	43	2,1	2,2	0,5	1,1	1,1	1	0,1	1
6	Kacang-kacangan	14,2	38	1,9	1,9	2	3,7	3,8	10	-6,2	3,8
7	Gula	27,4	100	4,9	5	0,5	2,5	2,5	2,5	0	2,5
8	Sayur dan Buah	189,5	94	4,6	4,7	5	23	23,6	30	-6,4	23,6
9	Lain-lain	165,3	26	1,3	1,3	0	0	0	0	0	0
	Total		**2031**	**100**	**102,5**		**87**	**89,2**	**100**		**81.5**

Sumber : LKPJ Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.32.
Jumlah Alokasi Bantuan Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(keadaan s/d Desember 2016)

No	KECAMATAN/ DESA	Kk Yang Mengajukan Bantuan						Rulisasi Kk Yang Menerima Bantuan Hasil Verifikasi					
		Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin			Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin		
		Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)
		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kec. Rantau Rasau	186	626					186	652	5.868			
2	Kec. Berbak	239	803					239	817	7.353			
	Jumlah	**425**	**1.429**					**425**	**1.469**	**13.221**			

Sumber : LKPJ Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 4.1.
Perkembangan Harga Komoditi Pangan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

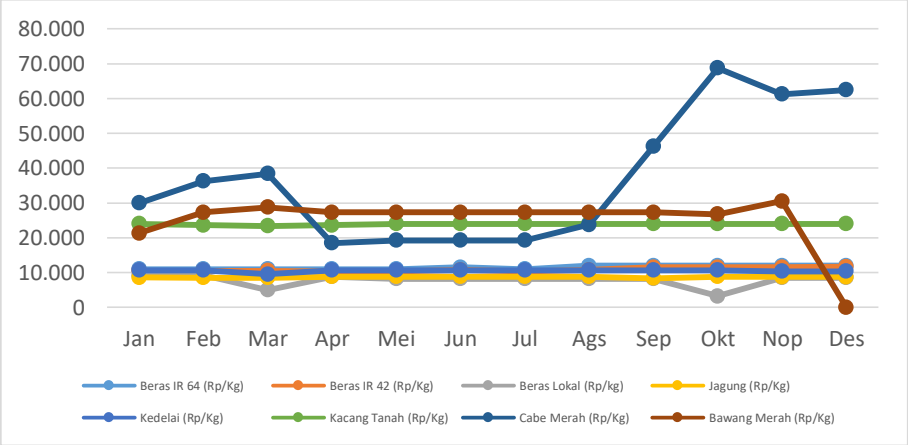

Sumber : LKPJ Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 4.2.
Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

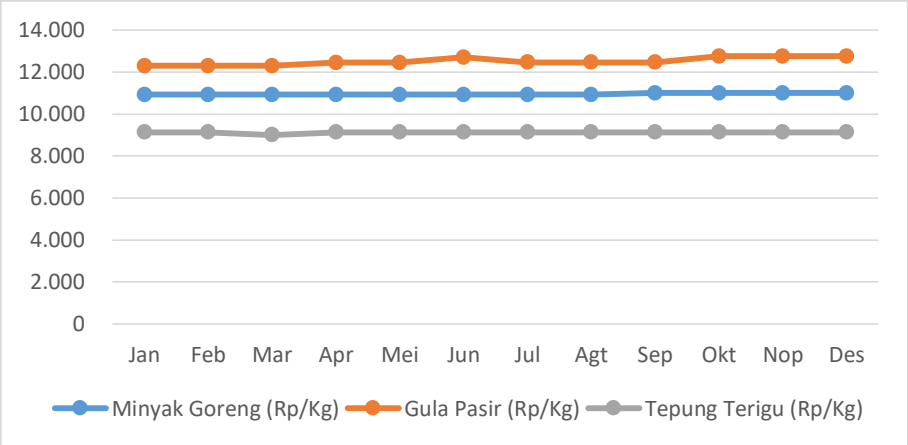

Sumber : LKPJ Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Gambar 4.3.
Perkembangan Harga Bahan Pangan Hewani
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

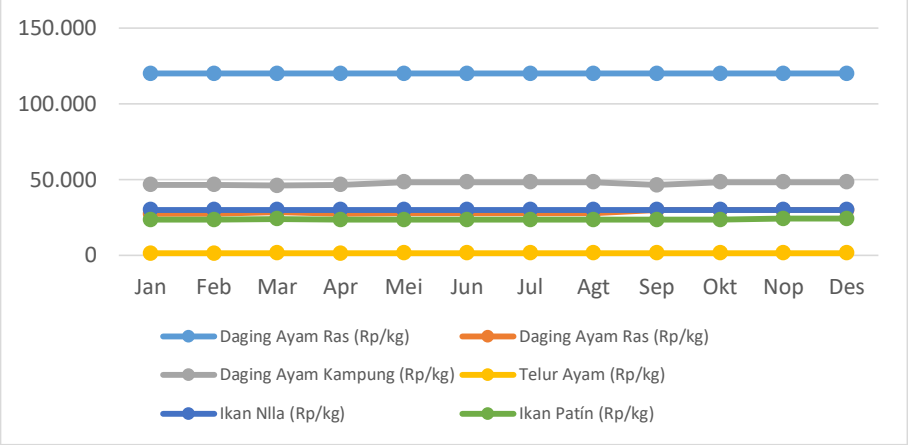

Sumber : LKPJ Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2016 disebabkan oleh faktor intemal dan eksternal antara lain :

A. Faktor internal antara lain :
   1. Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kuantitas;
   2. Kurangnya Sarana dan prasarana serta kelengkapan organisasi;
   3. Sistem kerja yang belum sepenuhnya berjalan optimal;
   4. Administrasi yang belum sepenuhnya tertib dan taat aturan;
   5. Masih kurangnya ketersediaan dana langsung untuk pemberdayaan masyarakat berupa modal usaha kelompok di desa rawan pangan.

B. Faktor eksternal antara lain :
   1. diversifikasi pangan cenderung mengalami perlambatan
   2. Masih adanya produk rumah tangga yang menggunakan bahan pangan yang tidak boleh digunakan;
   3. Masih lemahnya koordinasi lembaga yang terkait dengan Ketahanan Pangan dan stake holder Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan;
   4. Belum termanfaatkan secara optimal Pangan Lokal yang ada bagi usaha promosi komoditas unggulan daerah;
   5. Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi sebagai berikut.

A. Solusi Faktor internal antara lain ;
   1. Mengusulkan penambahan pegawai serta mengikutsertakan aparatur Kantor Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan;

2. Pemenuhan sarana dan prasarana serta kelengkapan organisasi;
3. Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan menerapkan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku;
4. Memperbaiki administrasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. Solusi Faktor Eksternal antara lain ;
1. Perlunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan dan peningkatan ketahanan pangan dengan mengedepankan aspek ketersediaan distribusi/ konsumsi serta keamanan pangan;
2. Meningkatkan intensitas pengambilan bahan sampel jajanan maupun makanan untuk diuji di Balai POM dan peningkatan kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan;
3. Mendorong dan memfasilitasi kecukupan, ketersediaan pangan tingkat Kabupaten/Kota;
4. Melaksanakan secara intensif koordinasi lintas pelaku dan sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan terhadap penyelesaian masalah-masalah ketahanan pangan yang terjadi di masyarakat serta memfasilitasi peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder dalam mewujudkan ketahanan pangan;
5. Mengoptimalkan dukungan anggaran maupun sarana untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah rawan pangan.

4.12. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *Lingkungan Hidup*. Pada Tahun 2016, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup melaksanakan 7 program dan

27 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tertera dalam tabel 4.33 dibawah ini.

Tabel 4.33.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun Anggaran 2016

NO.	PENDAPATAN	250.000.000,00	287.481.600,00	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	644.645.300,00	634.403.313,00	(10.241.987,00)	98,41
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	113.500.000,00	112.832.581,00	(667.419,00)	99,41
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	8.200.000,00	8.200.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	60.000.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.992.000,00	(8.000,00)	99,96
6	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH	261.202.000,00	259.878.200,00	(1.323.800,00)	99,49
7	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.857.170.000,00	1.828.041.117,00	(29.128.883,00)	98,43
	JUMLAH	2.964.717.300,00	2.923.347.211,00	(41.370.089,00)	98,60

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 2 (dua) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan meliputi:

1. Kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).
   Pada tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Memperoleh penghargaan pertama Kabupaten terbaik dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SILHD). Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan Buku Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup menurut media lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup, data

   upaya atau kegiatan untuk mengatasi permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk melengkapi analisis. Sedangkan Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubalian kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk mengatasinya (respon).

2. Pemantauan Kepekaan Polusi Udara

   Kegiatan ini merupakan wujud dari perjanjian antara Pemda Kabupaten Tanjung Jabung Tlmur dengan BMKG Pusat terhadap alat pemantau udara. Output dari kegiatan ini adalah telah dibangunnya 1 unit pos jaga yang akan digunakan sebagai tempat pengawasan dan pemantauan terhadap alat tersebut.

3. Pelaksanaan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

   Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2016 menetapkan tema : "*Go Wild For Life*", selanjutnya disesuaikan dengan konteks Indonesia maka tema hari lingkungan hidup tahun 2016 adalah "Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Langka untuk Kehidupan". Pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup dilaksanakan di wilayah KTM Mandiri Kecamatan Geragai pada tanggal 23 November 2016, pada momen ini dihadiri oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang pada saat itu menyerahkan 8 unit sekat kanal desa catur rahayu Kecamatan Dendang sekaligus penandatanganan berita acara serah terima, serta penyerahan penghargaan kalpataru dan berbagai hadiah lomba.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan meliputi :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan;

Adapun sasaran kegiatan ini adalah menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas air. Adapun perhitungan kualitas air rata-rata pertahun sebagai standar kinerja yang digunakan adalah parameter Fisika, Kimia dan Bakteriologi sebagai parameter kunci yang dihitung. Jumlah titik pantau pada tahun 2016 terdiri dari DAS berjumlah 3, Sungai berjumlah 5 yang berlokasi di 11 Kecamatan.

Tabel 4.34.
Hasil Pemantauan kualitas air rata-rata pertahun

No	Nama		Gol	Kualifikasi Mutu Air
	Desa	Kecamatan		
1.	DAS LAGAN			
	- Blok A (Lagan Ulu)	Geragai	B	Cemar sedang
	- Lagan Tengah	Geragai		Cemar sedang
	- Lagan Ilir	Kuala Jambi		Cemar sedang
2.	DAS MENDAHARA			
	- Simpang Kiri	Mend. Ulu	B	Cemar sedang
	- Mendahara Tengah	Mendahara		Cemar sedang
	- Mendahara Ilir	Mendahara		Cemar sedang
3.	DAS BATANGHARI			
	- Berbak	Berbak	B	Cemar ringan
	- TPI Nipah Panjang	Nipah Panjang		Cemar sedang
	- Dermaga Puding	Rantau Rasau		Cemar ringan
	- Sabak Indah	Dendang		Cemar sedang
	- Pelabuhan Samudera	Ma.Sabak Barat		Cemar sedang
	- Teluk Majelis	Kuala jambi		Cemar sedang
4.	SUNGAI SADU		B	
	- Parit 10	Sadu		Cemar sedang
	- Simpang Jelita	Nipah Panjang		Cemar sedang
	- Sungai Lokan	Sadu		Cemar sedang
5.	SUNGAI LAMBUR -		B	
	- Lambur I	Ma.Sabak Timur		Cemar sedang
	- Lambur II	Ma.Sabak Timur		Cemar berat
	- Simbur naik	Ma.Sabak Timur		Cemar sedang
6.	SUNGAI KEC. MA.SABAKTIMUR		B	
	- Lambur luar	Ma.Sabak Timur		Cemar berat
	- Sungai ular	Ma.Sabak Timur		Cemar berat
	- Alang-alang	Ma.Sabak Timur		Cemar sedang
7.	SUNGAI PEMUSIRAN		B	
	- Kuala Pemusiran	Nipah Panjang		Cemar sedang
	- Sungai Raya	Nipah Panjang		Cemar sedang
	- Teluk Keladi	Rantau Rasau		Cemar sedang
8.	SUNGAIPANGKAL DURI		B	
	- Parit O	Mendahara		Cemar berat
	- Parit E	Mendahara		Cemar berat
	- Pangkal Duri Ilir	Mendahara		Cemar berat

Sumber : LKPJ Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

2. *Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;*

Pembinaan dan pengawasan industri bertujuan untuk mencapai penurunan beban pencemar. Sasaran pengawasan pengelolaan pengendalian pencemaran lingkungan adalah industri dan/atau kegiatan usalia lainnya yang berpotensi memberikan pencemaran terhadap lingkungan. Industri dan/atau kegiatan usaha yang diawasi pada tahun 2016 berjumlah 42, meliputi sektor perkebunan, minyak dan gas bumi, serta rumah sakit. Berdasarkan evaluasi capaian ketaatan terhadap dokumen lingkungan sudah mencapai 50%.

3. *Pengolahan B3 Dan Limbah B3*

Adapun sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Output dari kegiatan ini adalah surat keputusan ijin pengumpul limbah 83 dan IPAL. Jumlah perusahaan yang memiliki izin TPS limbah 83 ada 4 perusahaan dan yang memiliki izin IPAL sebanyak 2 perusahaan.

Tabel 4.35.
Jumlah Perusahaan yang memiliki izin pengumpul limbah 83 dan IPAL
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Identitas Perusahaan/Instansi	Jenis Industri	Lokasi
1.	PT. Wirakarya Sakti	Hutan tanaman industri	Distrik 7 Kec. Geragai
2.	PT. Kaswari Unggul	Sawit	Kec. Dendang
3.	PT. Sabak Indah	Glue	Kec. Dendang
4.	PT. Petrochina International Jabung	Minyak dan gas bumi	Kec. Geragai

Sumber : LKPJ Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

4. *Koordinasi Pemeriksaan Dokumen Lingkungan;*

Dokumen lingkungan adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL),dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan Audit Lingkungan. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan pada Tahun 2016 berjumlah 64, meliputi Amdal berjumlah 1, UKL UPL berjumlah 11 dan SPPL berjumlah 52.

5. *Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup.*

Kegiatan ini bersumber dari Dana DAK Sub Bidang LH yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan laboratorium, kendaraan operasional kendaraan roda 4 berjumlah 1 unit, kendaraan roda 2 berjumlah 1 unit dan sarana prasarana pendukung SILHD berupa 2 unit komputer, 2 unit printer dan 1 unit UPS.

Keberhasilan yang dicapai Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 antara lain :

1. Juara III Adiwiyata (Sekolah Peduli Lingkungan) tingkat SLTP diralh oleh SMP 12 Kec. Geragai di tingkat Provinsi Jambi;
2. Juara 1 SILHD (Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah) tingkat Provinsi Jambi diralh oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Penghargaan Nirwasita Tantra Award (Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat nominator ke 6 sampai Tahap ke II dari tiga tahapan) di tingkat Nasional;
4. Juara 1 Pemenang Lomba Kalpataru tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 Kategori Pengabdi Lingkunganan. Donal Ade Putra, S.Hut, Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat;
5. Juara II Pemenang Lomba Kalpataru tingkat Provinsi Jambi Tahun 2016 Kategori Penyelamat Lingkungan an. Gapoktan Berbak Jaya Kecamatan Berbak.

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Penguatan data dan informasi antar sektor sebagai media informasi dan up dating data;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang lingkungan untuk melakukan dikiat fungsional khususnya PPLH dan PPNS;
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah, pelaku usaha kegiatan dan skala rumah tangga tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat;
6. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pembentukan pos pengaduan masyarakat sebagai salah satu wadah masyarakat/setiap orang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
8. Terakreditasinya laboratorium pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

4.13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*. Pada Tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertera dalam tabel 4.36 dibawah ini.

Tabel 4.36.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.447.319.350,00	1.414.271.214,00	(33.048.136,00)	97,71
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.130.753.000,00	2.125.486.100,00	(5.266.900,00)	99,75
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.950.000,00	18.050.000,00	(900.000,00)	95,25
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	56.000.000,00	55.868.000,00	(132.000,00)	99,76
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.805.000,00	34.765.000,00	(40.000,00)	99,88
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.868.000,00	(132.000,00)	99,34
	JUMLAH	3.707.827.350,00	3.668.308.314,00	(39.519.036,00)	98,93

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program dan kegiatan pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan.** untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada Bab V dalam dokumen LKPJ ini.

4.14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD/K)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *pemberdayaan masyarakat dan Desa* . Pada Tahun 2016, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan melaksanakan 14 program dan 34 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan tertera dalam tabel 4.37 dibawah ini.

Tabel 4.37.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	395.353.500,00	369.491.030,00	(25.862.470,00)	93,45
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	302.865.000,00	295.361.337,00	(7.503.663,00)	97,52
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17.000.000,00	15.000.000,00	(2.000.000,00)	88,23
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	23.800.000,00	(6.200.000,00)	79,33
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.800.000,00	8.298.000,00	(502.000,00)	94,29
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.300.000,00	19.067.000,00	(7.233.000,00)	72,49
7	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	588.957.500,00	515.851.560,00	(73.105.940,00)	87,58
8	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	645.512.000,00	605.741.500,00	(39.770.500,00)	93,83
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	1.275.412.500,00	1.069.619.400,00	(205.793.100,00)	83,86
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	750.000.000,00	740.177.711,00	(9.822.289,00)	98,69
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA/PRASARANA PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN	60.500.000,00	60.500.000,00	-	100,00
12	PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA	133.600.000,00	126.687.100,00	(6.912.900,00)	94,82
13	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	217.900.000,00	205.461.670,00	(12.438.330,00)	94,29
14	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT	130.000.000,00	109.816.435,00	(20.183.565,00)	84,47
	JUMLAH	4.582.200.500,00	4.164.872.743,00	(417.327.757,00)	90,89

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Penguatan Kapasitas Monitoring Dan Evaluasi PNPM; Pembinaan,Monitoring Dan Evaluasi Dana Alokasi Desa;

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangunan Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan; Pendataan Aset Desa; Pembinaan Dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan; Koordinasi Penguatan Kelembagaan Penanggulangan HIV, AIDs Dan Posyandu.

c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemilihan Kepala Desa; Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan; Penyusunan Profil Desa.

d. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Keluarga.

e. Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan Dan Lingkungan Desa/Kelurahan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan.

f. Program Penguatan Otonomi Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penetapan Dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan.

g. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; Pengelolaan Dan Penataan Pasar Desa.

h. Program Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Capaian kinerja badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target pembentukan BUMDesa sebanyak 10 BUMDesa, dan terealisasi 10 BUMDesa (100%);
2. target berfungsinya BUMDesa sebanyak 5 BUMDesa dan terealisasi 5 BUMDesa (100%);
3. Target pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi alokasi dana desa sebanyak 73 desa dengan realisasi 73 desa;
4. Pemilihan kepala desa di kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan secara serentak pada 45 desa pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan aman dan damai. Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2016;
5. Pelatihan penatausahaan keuangan desa dengan aplikasi SISKEUDES.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa permasalahan internal antara lain terbatasnya personil seperti petugas teknis di bidang-bidang.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan memaksimalkan personil di sekretariat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dengan bimbingan dan pengawasan dari Kepala Badan maupun Kepala Bidang bersangkutan.

Permasalahan selanjutnya adalah terbatasnya Kendaraan Dinas Operasional dalam menjalankan tugas kedinasan ke 73 desa sehingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu maka kendaraan Pribadi ikut dimanfaatkan.

4.15. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 2 (dua) Bidang urusan yaitu : 1). *Perhubungan* dan; 2). Bidang Urusan *Komunikasi dan Informatika*. Pada Tahun 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 14 program dan 45 kegiatan. Secara

terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tertera dalam tabel 4.38 dibawah ini:

Tabel 4.38.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaTahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.829.529.900,00	1.615.266.656,00	(214.263.244,00)	88,28
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.832.900.000,00	1.216.811.900,00	(1.616.088.100,00)	42,95
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	85.900.000,00	82.270.000,00	(3.630.000,00)	95,77
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	-
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68.700.000,00	65.909.000,00	(2.791.000,00)	95,93
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.940.000,00	(60.000,00)	99,70
7	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	2.020.325.000,00	1.787.070.000,00	(233.255.000,00)	88,45
8	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	2.393.000.000,00	2.359.957.000,00	(33.043.000,00)	98,61
9	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	700.750.000,00	662.194.000,00	(38.556.000,00)	94,49
10	PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	59.000.000,00	58.880.000,00	(120.000,00)	99,79
11	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	84.530.000,00	67.570.000,00	(16.960.000,00)	79,93
12	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	1.383.200.100,00	1.312.739.000,00	(70.461.100,00)	94,90
13	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI	244.450.000,00	221.359.000,00	(23.091.000,00)	90,55
14	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
	JUMLAH	11.812.285.000,00	9.484.966.556,00	(2.327.318.444,00)	80,30

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengguna angkutan dalam berlalulintas, mengumpulkan data, updating data, pengaturan arus lalulintas pada hari besar keagamaan, penertiban surat-surat kendaraan baik didarat maupun diperairan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan; Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan Angkutan; Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan; Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal Dan Tahun Baru; Penyelenggaran Forum Lalu Lintas Kab. Tanjung Jabung Timur; Pengawasan Dan Penertiban Angkutan Perairan; Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan.

b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa perhubungan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Dermaga.

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas; Pengawalan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan Dan Pengaturan LLAJ.

d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Inti dari program ini ialah pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa

Program ini bertujuan meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi.

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

g. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi

Program ini bertujuan mengetahui perkembangan komunikasi informasi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informatika Dan Komunikasi; Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi Dan Informatika; Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Monitoring, Evaluasi Fasilitas Dan Sarana Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika.

h. Program Penataan Pelayanan Publik

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pameran Pembangunan Daerah.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah personil, SDM yang dimiliki dan area kerja yang cukup luas sehingga tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas baik administrasi maupun operasional;

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi tersebut yaitu :

1. Penambahan dan Peningkatan SDM Apartur.

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian. Tabel berikut akan menggambarkan capaian sektor perhubungan tahun 2016.

Tabel 4.39.
Capaian Sektor Perhubungan sampai dengan Tahun 2016

No	Uraian	Capaian Tahun 2016
1.	Dermaga (unit)	99
2.	Jumlah Dermaga kayu	68
3.	Jumlah Dermaga yang dibangun/direhab. Menjadi permanen (unit)	29
4.	Angkutan Penyeberangan (unit)	1453
5.	Kantor Pos (unit)	8
6.	Aras penumpang angkutan umum darat (orang)	199.700
7.	Arus penumpang angkutan umum laut (orang)	58.663
8.	Jumlah Angkutan (unit) kedatangan dan keberangkatan	18.070
9.	Jumlah tower (unit)	67

Sumber : Dishubkominfo Kab. Tanjung Jabung Timur

4.16. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *koperasi, usaha kecil, dan menengah*. Pada Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan 9 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran

dan realisasi penyerapan belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertera dalam tabel 4.40 dibawah ini.

Tabel 4.40.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	433.615.100,00	430.652.865,00	(2.962.235,00)	99,31
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	106.089.000,00	101.060.650,00	(5.028.350,00)	95,26
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	139.670.000,00	139.536.750,00	(133.250,00)	99,90
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	80.649.700,00	72.732.200,00	(7.917.500,00)	90,18
7	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	223.386.300,00	208.144.700,00	(15.241.600,00)	93,17
8	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	425.063.500,00	400.638.800,00	(24.424.700,00)	94,25
9	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	173.837.000,00	169.308.250,00	(4.528.750,00)	97,39
	JUMLAH	1.613.410.600,00	1.553.174.215,00	(60.236.385,00)	96,27

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, non diskriminasitif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Kebijakan Tentang UMKM; Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan koperasi/KUD. Dengan manajemen yang profesional diharapkan koperasi dapat berkembang dengan pesat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD; Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi faktor pendukung usaha UMKM. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan; Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk

UMKM Dan Koperasi; Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Untuk UMKM; Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM Dan Koperasi; Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga; Penyelenggara Promosi Produk UMKM; Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal; Pelatihan Produk Koperasi Dan Umkm Hasil Produksi Kebun Buah.

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai wadah kepentingan bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi; Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian; Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

Selama Tahun 2016, hasil yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

1. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Terlaksananya Pelatihan, sosialisasi dan bimtek bagi pengawas, pengurus dan anggota tentang arti pentingnya koperasi dan manfaat serta guna koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan ekonomi masyarakat;
3. Terwujudnya peningkatan kinerja koperasi untuk menuju kepredikat koperasi berprestasi;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi maupun usaha bagi koperasi dan UMKM dalam peningkatan kualitas secara kuantitas maupun jaringan usaha kerjasama dalam memasarkan produk (baik tingkat provinsi, pemerintah pusat antar kabupaten/kota maupun swasta);
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara stimulan guna mempercepat pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
6. Membina dan menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mempromosikan hasil produksi usaha koperasi dan UMKM yang merupakan produk-produk unggulan daerah.

Capaian kinerja Dinas koperasi dan UMKM ditunjukkan dengan berbagai ukuran seperti :1) Jumlah koperasi, 2) Jumlah anggota, 3) Simpanan, 4) Modal, 5) Volume usaha, dan 6) Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pada tahun 2016, koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun non KUD berjumlah 302 unit, sebanyak 105 unit diantaranya termasuk koperasi aktif, selebihnya merupakan koperasi tidak aktif. Jumlah anggota dari 302 unit koperasi tersebut sebanyak 26.214 orang yang terdiri dari 9.408 orang merupakan anggota KUD dan 16.806 orang merupakan anggota Non KUD.

Tabel 4.41.
Jumlah KUD dan Non KUD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016

NO	Kecamatan	Koperasi		Aktif		Tidak Aktif		Anggota	
		KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD
1	Muara Sabak Barat	2	31	-	19	2	12	-	1.834
2	Muara Sabak Timur	5	41	-	9	5	32	3.277	1.942
3	Kuala Jambi	1	20	-	12	1	8	292	576
4	Dendang	6	29	-	14	6	15	675	4.668
5	Mendahara	3	37	-	2	3	35	182	1.937
6	Mendahara Ulu	1	16	1	2	-	14	2.160	1.328
7	Geragai	5	29	-	18	5	11	400	1.469
8	Rantau Rasau	8	11	1	9	7	2	1.166	462
9	Berbak	3	4	-	3	3	1	831	226
10	Nipah Panjang	4	28	-	10	4	18	254	1.489
11	Sadu	3	15	-	5	3	10	171	875
	Jumlah	**41**	**261**	**2**	**103**	**39**	**158**	**9.408**	**16.806**

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

KUD dan Non KUD di kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri sebesar Rp. 10.223.115.139 maupun pihak luar sebesar Rp. 11.589.056.956; volume usaha sebesar Rp. 21.429.863.603 dan sisa hasil usaha sebesar Rp. 1.725.878.879.

Tabel 4.42.

Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016

NO	KECAMATAN	KUD & Non KUD	MODAL		VOLUME USAHA	SHU
			SENDIRI	LUAR		
1	Muara Sabak Barat	33	260.616.160	540.154.250	77.799.400	81.275.086
2	Muara Sabak Timur	46	2.635.757.838	2.755.088.558	7.076.502.849	228.626.727
3	Kuala Jambi	21	1.013.151.425	257.962.985	1.471.951.457	340.330.082
4	Dendang	35	2.375.549.717	2.449.687.605	7.500.918.148	506.766.090
5	Mendahara	40	490.822.860	408.381.003	1.173.893.645	241.901.460
6	Mendahara Ulu	17	2.170.135.867	1.077.908.250	2.533.343.237	19.653.909
7	Geragai	34	579.980.872	1.245.902.692	545.865.387	125.713.835
8	Rantau Rasau	19	103.737.050	517.038.209	134.361.430	48.865.025
9	Berbak	7	35.956.800	749.668.037	74.710.720	12.014.500
10	Nipah Panjang	32	318.672.025	1.177.523.127	682.105.790	50.875.285
11	Sadu	18	238.734.525	409.742.240	158.411.540	69.856.880
	JUMLAH	**302**	**10.223.115.139**	**11.589.056.956**	**21.429.863.603**	**1.725.878.879**

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain:

1. Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM;
2. Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota;
3. Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM;
4. Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi anggota masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan masyarakat;
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah:

1. Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor melalui DIKLAT;
2. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap anggota koperasi;
3. Perlu peningkatan koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan Koperasi dan UMKM;
4. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengelola SDA;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan.

4.17. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *penanaman modal*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan 9 (sembilan) program 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Berikut target dan realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.43.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	469.711.000,00	453.738.222,00	(15.972.778,00)	96,59
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	169.600.000,00	168.056.000,00	(1.544.000,00)	99,08
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.523.000,00	27.523.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	9.000.000,00	8.050.000,00	(950.000,00)	89,44
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.612.500,00	34.279.500,00	(333.000,00)	99,03
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
7	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	197.305.000,00	196.854.500,00	(450.500,00)	99,77
8	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	420.597.500,00	418.827.452,00	(1.770.048,00)	99,57
9	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	34.950.000,00	34.558.000,00	(392.000,00)	98,87
	JUMLAH	1.383.299.000,00	1.361.886.674,00	(21.412.326,00)	98,45

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparasi dan keterjangkauan pelayanan perizinan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik, Sosialisasi Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dan Pelayanan Perizinan di tempat dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

1). Terbangunnya website dengan domain http://dpmptsp.tanjabtimkab.go.id, Melalui website ini, masyarakat yang ingin mengurus perizinan dapat melihat dan mengunduh permohonan dan persyaratan yang berlaku;

2). Terlaksananya sosialisasi pelayanan perizinan kepada petugas pengelola pelayanan perizinan kecamatan sebagai dukungan bagi kelancaran penyelenggaraan perizinan yang dilimpahkan ke Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan sosialisasi secara langsung kepada para pemilik usaha dan bangunan dengan narasumber dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kecamatan Geragai, Kuala Jambi, Rantau Rasau, Nipah Panjang, Mendahara dan Dendang;

3). Tersedianya media informasi pelayanan perizinan berupa brosur, leaflet dan baliho;

4). Terlaksananya penyebaran informasi perizinan melalui media massa (koran) selama 12 (dua belas) bulan;

5). Terlaksananya Pelayanan perizinan ditempat dengan menggunakan mobil pelayanan perizinan keliling sebanyak 4 kali.

Dari 43 jenis perizinan, telah diterbitkan sebanyak 2.611 izin pada tahun 2016. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.44.
Jumlah Izin yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016

NO.	Jenis Izin	Jumlah
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	3
2.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
3.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
4.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
5.	Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	-
6.	Izin Usaha Perluasan atau Izin Perluasan (khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri	-
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 1 Dalam Negeri	-
8.	izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
9.	Izin Mendirikan Bangunan Rumah dengan Luas Lebih dari 150 Meter dan Bangunan bukan Rumah	1.584
10.	Surat Izin Tempat Usaha dengan Lúas Lebih dari 150 Meter^2	216
11.	Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, Menengah dan Besar	231
12.	Tanda Daftar Perusahaan untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Lúas Lebih dari 150 Meter^2	221
13.	Tanda Daftar Gudang untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan Lúas Lebih dari 150 Meter^2	5
14.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-
15.	Izin Usaha Industri	-
16.	Tanda Daftar Industri	2
17.	Izin Gangguan nonMikro	217
18.	Izin Reklame nonMikro	91
19.	lzin Penelitian	1
20.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	21
21.	Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan Jasa Konstruksi	-
22.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya	-
23.	Izin Usaha Peri<ebunan untuk Pengolahan	1
24.	Izin Usaha Perkebunan	1
25.	Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi	-
26.	Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen	-
27.	Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan	-
28.	Izin Usaha Budidaya Hortikultura	-
29.	Izin Usaha Peternakan	-
30.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	-
31.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	-
32.	Izin Mendirikan Klinik	2
33.	Izin Operasional Klinik	1
34.	Izin Toko Obat	-
35.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	-
36.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata	-
37.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata	-
38.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makanan dan Minuman	-
39.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan AI<omodasi	-

NO.	Jenis Izin	Jumlah
40.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan I Hiburan dan Rekreasi	-
41.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Infonnasi Pariwisata	-
42.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata	-
43.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta	-
	Jumlah	2.611

Sumber : LKPJ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan agar pelayanan perizinan dan koordinasi pelaksanaannya dapat terselenggara, melalui kegiatan Penataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Pendaftaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Evaluasi dan Penertiban Pelayanan Perizinan Terpadu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indeks Kepuasan Hasyarakat Pelayanan Perizinan Terpadu dengan capaian kegiatan sebagai berikut :

a. Terimplementasikannya SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan investasi secara Elektronik) yang terintegrasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (1 aplikasi);
b. Termplementasikannya (Sistem Informasi Perizinan Jasa Konstruksi) yang terintegrasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1 aplikasi);
e. Terlaksana kegiatan pendataan pendataan (pembaharuan data) bangunan dan usaha pada 11 (sebelas) kecamatan di lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
d. Terlaksana pengawasan dan penertiban perizinan di beberapa kecamatan dan desa/kelurahan yang dilakukan oleh tim pengawasan terpadu dan penertiban perizinan yang beranggotakan unsur-unsur dari dinas instansi teknis terkait (12 bulan);
e Terlaksana pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pemohon yang telah menerima layanan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (2 periode).

c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program ini bertujuan untuk menyiapkan regulasi yang mendukung optimalisasi penyelenggaraan perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tanun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, secara berkala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penelitian kepuasan

masyarakat yang menerima layanan perizinan mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan izin yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur Bappeda dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tahun 2016, survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2016 sebagai berikut :

a. Semester I (pertama) : 78,699 atau kategori B (baik)

b. Semester II (kedua) : 78.866 atau kategori B (baik)

Dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel 4.45 berikut :

Tabel 4.45.
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik Tahun 2016

No.	Unsur Penilaian	Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
	SEMESTER I				
U1	Persyaratan	3,140	0,349	8,714	B
U2	Prosedur	3,150	0,350 .	8,741	B
U3	Waktu Penilaian	3,140	0,349	8,714	B
U4	Biaya Tarif	3,130	0,347	8 686	B
U5	*Produk* Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,140	0,349	8,714	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3,140	0,349	8,714	B
U7	Prilaku Pelaksana	3,180	0,353	8,825	B
U8	Maklumat Peiayanan	3,160	0 351	8 769	B
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,180	0,353	8,825	B
	Jumlah			**78,699**	
	SEMESTER II				
U1	Persyaratan	3,200	0,355	8,675	B
U2	Prosedur	3,100	0,344	8,602	B
U3	Waktu Pelayanan	3,120	0,346	8,658	B
U4	Biaya Tarif	3,140	0,346	8,714	B
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,140	0,351	8,714	B
U6	Kompetensi Pelaksana	3,180	0,353	8,824	B
U7	Prilaku Pelaksana	3,240	0,362	8,991	B
U8	Maklumat Pelayanan	3,140	0,349	8,714	B
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,140	0,351	8,769	B
	Jumlah			**78,866**	B

Sumber : LKPJ Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung antara lain adalah :

1. kurangnya jumlah personil;
2. Kemampuan dan kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan;

3. Persyaratan dan prosedur perizinan belum sepenuhnya tersosialisasikan dan dipahami oleh sebagian masyarakat;dan
4. Adanya kendala jarak bagi sebagian masyarakat yang jauh dan pusat pemerintahan kabupaten untuk mengurus izin.

Terhadap permasalahan di atas, maka altematif pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

1. Mengusulkan penambahan pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjang Jabung Timur;
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai melalui Diklat Penanaman Modal yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi perizinan kepada para pemilik usaha dan bangunan;
4. Lebih mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada Camat dan pelayanan perizinan ditempat dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

4.18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : 1). Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar dengan bidang urusan *kepemudaan dan olah raga* dan Bidang Urusan *Kebudayaan*, 2). Urusan Pilihan dengan bidang Urusan Pariwisata. Pada Tahun 2016, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 15 program dan 40 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan

realisasi penyerapan belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga tertera dalam tabel 4.46 dibawah ini.

Tabel 4.46.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	857.097.000,00	819.406.572,00	(37.690.428,00)	95,60
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.690.000,00	154.590.000,00	(1.100.000,00)	99,29
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.800.000,00	24.800.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	168.257.650,00	167.817.683,00	(439.967,00)	99,73
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	664.530.000,00	657.684.000,00	(6.846.000,00)	98,96
7	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.100.856.000,00	1.070.922.300,00	(29.933.700,00)	97,28
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.048.003.150,00	980.214.650,00	(67.788.500,00)	93,53
9	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	53.401.000,00	53.041.000,00	(360.000,00)	99,32
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA	1.151.213.750,00	1.111.860.300,00	(39.353.450,00)	96,58
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	3.020.238.500,00	2.608.132.550,00	(412.105.950,00)	86,35
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	855.050.000,00	806.305.650,00	(48.744.350,00)	94,29
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	140.610.000,00	134.239.990,00	(6.370.010,00)	95,46
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	92.450.000,00	92.320.000,00	(130.000,00)	99,85
	JUMLAH	**9.384.197.050,00**	**8.733.334.695,00**	**(650.862.355,00)**	93,06

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata *(tangible)* maupun tidak kasat mata *(intangible).* Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; serta pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; serta fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan dalam pengembangan pemuda. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka; Pembinaan Kepemudaan; Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tanjab Timur.

d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bantuan kegiatan usaha pemuda melalui kegiatan seleksi kegiatan kepemudaan.

e. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga

Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olah raga kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah; pembinaan olahraga tradisional; serta pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat; dan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda).

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga Dan Tempat Rekreasi; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga.

i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik didalam maupun diluar negeri. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri; Pengembangan Tehnologi Informasi Pemasaran Pariwisata.

j. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Obyek Wisata Unggulan.

k. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan kepariwisataan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas dan kualitas pegawai dibidang kebudayaan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah dan BCB;
3. Belum Maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya;
4. Belum terdatanya benda peninggalan sejarah;
5. Masih kurang SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
7. Rendahnya kualitas produk pariwisata;
8. Rendahnya pemberdayaan masyarakat disekitar obyek wisata;
9. Rendahnya kualitas dan kuantitas pemasaran;

Solusi dari permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kecakapan SDM di bidang kebudayaan;
2. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat dalam pelestarian budaya daerah;
3. Memperbanyak pagelaran kesenian untuk menumbuhkan kreativitas seniman dan kelompok kesenian;
4. Melakukan pendataan dan inventarisasi peninggalan sejarah;
5. Peningkatan kemampuan SDM dengan mengikuti pelatihan – pelatihan;
6. Perlu peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
7. Peningkatan dan pengembangan produk pariwisata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan;
9. Meningkatkan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta melaksanakan festival wisata dan kebudayaan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh dinas Budparpora Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dapat dilihat capaian hasil sebagai berikut.

Tabel 4.47.
Jumlah Seni dan Budaya Tahun 2016

No	Uraian	Satuan	2016
1	Jumlah Group Kesenian	Group	58
2	Jumlah Bantuan Perlengkapan Kesenian	Group	11
3	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	8
4	Jumlah Sarana Seni dan Budaya	Buah	4
5	Jumlah Situs dan Cagar Budaya	Lokasi	22

Sumber : LKPJ Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.48.
Situs dan Cagar Budaya yang ada dikabupaten tanjung Jabung Timur
sampai dengan tahun 2016

NO	NAMA	LOKASI	KETERANGAN
1	Situs Syah Arfin	Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
2	Situs Benteng Pertahanan Indonesia	Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
3	Situs Perahu kuno	Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
4	Situs Perahu Kuno	Desa lambur I Kecamatan Sabak Timur	Sudah Dilestarikan
5	Situs Lambur II (Artefak, Keramik)	Desa Lambur II Kecamatan Sabak Timur	Belum Dilestarikan
6	Situs Kota Harapan	Desa Kota Harapan Kecamatan Sabak Timur	Belum Dilestarikan
7	Situs Siti Hawa	Desa Tri Mulyo Kecamatan Rantau rasau	Sudah Dilestarikan
8	Situs Koto Kandis	Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	Sudah Dilestarikan
9	Situs Orang Kayo hitam	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
10	Situs Orang Kayo Pingai	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
11	Situs putri Julan	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
	Kompleks Percandian Orang Kayo Hitam	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
13	Situs Sungai Rambut	Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
14	Kompleks Air Panas	Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai	Belum Dilestarikan
15	Situs Sungai Raya	Desa Sungai raya Kec.Nipah Panjang	Belum Dilestarikan
16	Situs Sungai Jeruk	Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang	Belum Dilestarikan
17	Situs Mendahara	Kecamatan Mendahara	Belum Dilestarikan
18	Situs Syah Ahmad Salim	Kampung Singkep Kecamatan Sabak Barat	Belum Dilestarikan
19	Situs Naga Ukir	Kel . Rano Kecamatan Sabak Barat	Belum Dilestarikan
20	Surau 1893	Rasau Desa Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
21	Situs Lambur I (perahu kuno, batu pipisan, wadah kaca kuno)	Desa Lambur I Kecamatan Ma. Sabak Timur	Sudah Dilestarikan

Sumber : LKPJ Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.49.
Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2016

No	Uraian	Satuan	2016
1	Kunjungan Wisata Domestik	Orang	10.986
2	Kunjungan Wisata Manca Negara	Orang	60
3	Jumlah Kawasan Wisata dengan Sarana Prasarana yang Memadai	Buah	11
4	Jumlah Penginapan dan Home Stay	Buah	7
5	Jumlah Even Promosi Pariwisata	Even	5

Sumber : LKPJ Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

4.19. Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data

Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Perustakaan* dan Bidang Urusan *Kearsipan*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan perpustakaan dalam pembangunan daerah, selama Tahun 2016, Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data melaksanakan 9 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data tertera dalam tabel 4.50 dibawah ini :

Tabel 4.50.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	693.518.100,00	655.804.204,00	(37.713.896,00)	94,56
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	263.690.000,00	263.112.220,00	(577.780,00)	99,78
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12.000.000,00	10.400.000,00	(1.600.000,00)	86,66
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	22.500.000,00	22.500.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	37.859.400,00	37.320.000,00	(539.400,00)	98,57
7	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	224.299.700,00	223.042.000,00	(1.257.700,00)	99,43
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	65.150.000,00	64.947.000,00	(203.000,00)	99,68
9	PENYELEMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	158.420.000,00	151.753.000,00	(6.667.000,00)	95,79
	JUMLAH	1.497.437.200,00	1.448.878.424,00	(48.558.776,00)	96,76

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program pengembangan budaya baca

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat dengan memperluas pengetahuan melalui buku. *Outcome* dari program ini adalah mengembangkan kegemaran membaca masyarakat terutama di tingkat sekolah dasar/sederajat, dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 98,58%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- Lomba bercerita tingkat SD/sederajat dengan *output* menumbuhkembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media dan terealisasi sebesar 98,58%.

b. Program pembinaan perpustakaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan. *Outcome* dari program ini adalah perpustakaan yang kaya akan koleksi buku. Kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan dengan output terpenuhinya kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan teralisasi sebesar 99,84 %.
- Lomba perpustakaan desa dengan output terlaksananya pengembangan koleksi perpustakaan desa/kelurahan dan terinventarisimya koleksi perpustakaan desa/kelurahan dengan baik, terealisasi sebesar 98,90%.
- Lomba perpustakaan sekolah dengan output terlaksananya pengembangan koleksi perpustakaan sekolah dan terinventarisirya koleksi perpustakaan sekolah dengan baik, terealisasi sebesar 100%.
- Pemantauan, pendataan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah dengan output terlaksananya pelaporan perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, terealisasi sebesar 99,77%
- Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan dengan output terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat desa yang terupdate, terealisasi sebesar 96,99%

c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

Outcome dari program ini adalah evaluasi kegiatan pelayanan perpustakaan dan terealisasi sebesar 99,69%. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan indikator *output* perbaikan pelayanan terhadap sektor pelayanan perpustakaan dan terealisasi sebanyak 99,21%.
- Sosialisasi, pembinaan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi dengan indikator *output* berupa masyarakat yang mengerti dan memahami teknologi dan informasi, dan terealisasi sebesar 99,74%.

d. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah yang bemilai sejarah.

Outcome dari program ini adalah terwujudnya penelusuran dan pengolahan literatur arsip sumber sejarah. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah :

- Penelusuran arsip dan pengolahan literatur arsip daerah yang bemilai sejarah dengan indikator *output* terlaksananya kegiatan penelusuran dan pengolahan literartur arsip sumber sejarah, dan terealisasi sebesar 95,79%.

Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung pada tahun 2016 telah memiliki koleksi buku perpustakaan sebanyak 26.681 buku, jumlah pengunjung 9.139 orang, indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,34% dan jumlah alat peraga IPTEK yang ada sebanyak 1 unit.

Tabel 4.51.
Jumlah Sarana dan IKM
Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data
Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan	28.681 Eks
2	Jumlah Pengunjung	9.139 Orang
3	IKM Layanan Perpustakaan	80,34%
4	Jumlah Alat Peraga IPTEK	1 unit

Sumber : LKPJ Kantor Perpustakaan, Dokumen, Arsip dan Pengolahan Data Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan magang dan bintek serta pelatihan guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengolahan buku perpustakaan dan arsip daerah;
2. Mempersiapkan software dan perangkat teknologi seperti komputer agar pelayanan dapat cepat dan tepat;
3. Melaksanakan sosialisasi dan standarisasi pelayanan melalui media cetak, elektronik dan pertemuan langsung ditingkat kecamatan dan kabupaten;
4. Mengusulkan pada anggaran berikutnya untuk penambahan pegawai/pejabat struktural untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lapangan.

4.20. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perikanan*. Selama tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan 11 (sebelas) program yang terdiri dari 5 *(lima)* program rutin dan 6 (enam) program pembangunan serta 30 *(tiga puluh)* kegiatan yang terdiri dari 19 (*sembilan belas)* kegiatan mtin dan 11 *(sebelas)* kegiatan pembangunan.

Tabel 4.52.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.088.516.675,00	1.048.444.072,00	(40.072.603,00)	96,31
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	160.000.000,00	146.372.378,00	(13.627.622,00)	91,48
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	41.000.000,00	38.785.000,00	(2.215.000,00)	94,59
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.855.325,00	97.690.000,00	(3.165.325,00)	96,86
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	63.600.000,00	62.913.100,00	(686.900,00)	98,91
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	5.002.080.100,00	4.992.011.500,00	(10.068.600,00)	99,79
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	512.397.200,00	511.962.138,00	(435.062,00)	99,91
8	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	3.048.778.200,00	3.041.521.800,00	(7.256.400,00)	99,76
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	1.162.657.000,00	1.143.905.550,00	(18.751.450,00)	98,38
11	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	1.283.451.500,00	1.276.252.000,00	(7.199.500,00)	99,43
	JUMLAH	12.518.336.000,00	12.414.857.538,00	(103.478.462,00)	99,17

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 7 (tujuh) program teknis yang meliputi :

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Outcome dan program ini adalah persentase peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap nelayan guna mencapai produksi perikanan dengan target 100% dan teralisasi sebesar 99.88%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Bantuan paket perikanan berupa pengadaan kapal ikan 0,3 GT dan 1 GT bahan fiber beserta perlengkapannya dengan indikator *output* tersedianya kapal Ikan (pompong)

ukuran 0,3 GT dan 1 GT bahan fiber beserta perlengkapanya sebanyak 113 unit dan tereaiisasi sebanyak 113 unit atau sebesar 100% Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir yang kegiatannya berupa Restocking dan Bibit mangrove bertujuan untuk mencegah kelangkaan spesies Ikan tertentu, menjaga ekosistem perairan agar tetap lestari dan berkesinambungan, indikator *output* tersedianya bibit ikan dan bibit mangrove 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.

Tabel 4.53.
Jumlah Bantuan Kapal Nelayan (Pompong) kepada masyarakat nelayan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	KET
1	Mendahara	16	0,3/1 GT
2	Mendahara ulu	2	0,3 GT
3	Geragai	-	
4	Dendang	5	0,3 GT
5	Muara Sabak timur	18	0,3/1 GT
6	Muaro SabaK Barat	-	
7	Kuala Jambi	4	1 GT
8	Rantau Rasau	-	
9	Berbak	41	0,3 GT
10	Nipah Panjang	22	1 GT
11	Sadu	5	1 GT
TOTAL		113	

Sumber : LKPJ DKP kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

b. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan

Program ini bertujuan Peningkatan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perairan Indonesia bebas *illegal fishing* serta kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan yang kegiatannya berupa patroli dan pengawasan nelayan dilaut dengan target 100% dan teralisasi sebesar 99,92% dengan indikator *output* menurunnya tingkat pelanggar hukum pada masyarakat, dengan kegiatannya sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.

c. Program Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumbedaya Laut

Program ini bertujuan Peningkatan ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan dan kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut dengan target 100% dan teralisasi sebesar 100,00% dan indikator *output* meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pendayagunaan sumberdaya laut, yang kegiatannya sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.

d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan tujuan meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya,

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan ekonomi, terpenuhi kebutuhan dan gizi dan protein masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana budidaya perikanan (kolam, tambak dan kermba jaring apung) dengan target. 100% dan teralisasi sebesar 99,75%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- Pendampingan kelompok tani pembudidaya ¡kan guna terbentuknya wadah petani budidaya ikan yang saling melengkapi dengan indikator *output* terbentuknya kelompok petani budidaya ikan atau unit perikanan rakyat (UPR) sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.
- Pengembangan budidaya perikanan berupa kolam, keramba dan tambak guna sebagai pengtiasil benih dan ikan konsumsi, dengan indikator *output* tersedianya lahan/ wadah budidaya ikan (kolam, keramba jaring apung dan tambak) layak teknis sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%
- Rehab hacthery Balai Benih Ikan (BBI) dan operasionalnya, guna memaksimalkan fungsi balai benih ikan sebagai penghasil benih ikan bericualitas dengan indikator *output* tersedianya benih ikan bericualitas dan layak budidaya sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.

e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini tujuan sebagai upaya meningkatkan produktivitas perikanan tangkap yang optimal dengan Outcome dan program ini adalah persentase peningkatan produksi perikanan tangkap dengan target 100% dan teralisasi sebesar 98,39%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

- Pendampingan poda kelompok nelayan perikanan tangkap yang kegiatannya berupa pendampingan dan pembentukan kelompok nelayan (KUB) yang terintegritas dan identitas jetas diwilayah 5 (lima) kecamatan pesisir, dengan indikator *output* terbentuknya kelompok Usaha Bersama (KUB) memiliki kartu nelayan sebanyak 5 paket dan terealisasi sebanyak 5 (lima) paket atau sebesar 100%.
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, kegiatannya berupa bantuan alat tangkap ikan jaring dan kelangkapanya diwilayah 5 (lima) kecamatan pesisir, dengan indikator *output* tersedianya alat tangkap ikan (jaring) beserta periengkapanya sebanyak 5 paket dan terealisasi sebanyak 5 (lima) paket atau sebesar 100%.
- Biaya operasional PPI/TPI, kegiatannya penambahan sarana prasarana dan operasional PPI/TPI yang layak teknis, dengan indikator *output* terpenuhi kelayakan

teknis PPI/TPI sebanyak 1 (satu) paket dalam 1 tahun dan terealisasi sebanyak 1 (satu) paket atau sebesar 100%.

f. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan peningkatkan mutu hasil perikanan, nilai tambah, investasi serta distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, sasaran adalah peningkatan nilai ekspor/pasar produk olahan, outcome dan program ini adalah kualitas dan kuantitas produk olahan 1 paket dalam 1 tahun teraliasi dengan target 100% dan teralisasi sebesar 99,44%. Program ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut:

- Kajian optimaslisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan dengan indikator *output* meningkatnya produk olahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi oleh masyarakat sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.
- Pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produksi perikanan, dengan indikator *output* bahan kimia berbahaya terhadap produk oiahan hasil perikanan yang sesuai standar mutu dan kelayakan konsumsi masyarakat 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.
- Peningkatan sarana pengolahan, pemasaran dan pengembangan distribusi pasar serta operasional pabrik es dan cold storage berupa belanja alat kemasan, dengan indikator *output* sarana pengolahan, pemasaran dan pengembangan distribusi pasar serta pabrik es/cold storage yang layak operasional sebanyak 1 paket dalam 1 tahun yang terealisasi sebanyak 1 paket atau sebesar 100%.

Tabel 4.54.
Jumlah Produksi perikanan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No	Subsektor	2016
1	Perairan Laut	23.491,54
2	Perairan Umum	319
3	Kolam	107,5
4	Tambak	140,9
5	Keramba Jaring Apung (KJA)	67,25
	JUMLAH	**24.126,19**
6	Benih Ikan/ Ekor	472.119

Sumber : LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Adapun Permasalahan yang yang dihadapi oleh dinas Perikanan dan Kelautan saat ini adalah :

1. Masih Rendahnya tingkat kemandirian masyarakat penerima bantuan dimana pola pikir dan budaya yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah;

2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah pesisir kurang berwawasan lingkungan, masyarakat masih menggunakan bahan/alat tangkap yang merusak lingkungan (deskruktif).

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah :

1. Meningkatkan kerjasama yang baik dan Sinergis antar nelayan, Melibatkan petugas terkait dilapangan (Tenaga Penyuluh Perikanan, Pokmaswas) dan koordinasikan sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. menyeleksi/inventarisir permintaan masyarakat dalam pengalokasian dana sesuai dengan kondisi lapangan dan kegiatan terkait bantuan kepada masyarakat.

Strategis pemecahan masalah pembangunan perikanan tahun 2016 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Memiliki Sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perikanan
   - Peningkatan Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pengalihan dan penerapan teknologi sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap:
   - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti PPI, BBM dan perbengkelan dan orientasi penangkapan lebih jauh.
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
4. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti melengkapi fasilitas BBI, penyiapan Keramba Jaring Apung (KJA), kolam masyarakat sebagai upaya ketahanan pangan perikanan dan membentuk kawasan minapolitan yang mandiri.
5. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk hasil perikanan.
6. Peningkatan produk hasil olahan perikanan yang berkualitas, Perluasan distribusi pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
7. Penataan ruang, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian sumberdaya ikan.
8. Pemanfaatan dan Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal terhadap kawasan jenis biota perairan, Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomis tinggi dan penurunan tingkat pelanggaran dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.21. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2016, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan 12 program dan 39 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan tertera dalam tabel 4.55 dibawah ini.

Tabel 4.55.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggran Dinas Pertanian TP
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	725.065.600,00	694.269.087,00	(30.796.513,00)	95,75
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	747.188.255,00	684.431.494,00	(62.756.761,00)	91,60
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.900.000,00	23.400.000,00	(1.500.000,00)	93,97
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	-
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	76.264.700,00	63.609.550,00	(12.655.150,00)	-
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	10.400.000,00	(9.600.000,00)	52,00
7	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	117.560.000,00	78.110.000,00	(39.450.000,00)	66,44
8	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	11.303.423.450,00	11.024.423.052,00	(279.000.398,00)	97,53
9	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	128.550.000,00	124.488.430,00	(4.061.570,00)	96,84
10	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	199.925.000,00	189.049.750,00	(10.875.250,00)	94,56
11	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	2.325.653.100,00	2.148.426.466,00	(177.226.634,00)	92,37
12	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	422.422.845,00	383.909.900,00	(38.512.945,00)	90,88
	JUMLAH	16.110.952.950,00	15.424.517.729,00	(686.435.221,00)	95,74

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani serta motivasi kelompok tani dalam budidaya usaha tani. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan

dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis; dan Penilaian Lomba-Lomba Pertanian.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi; Pengembangan Perbenihan/Pembibitan; Pengelolaan Lahan Dan Air; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija; Pengembangan Sumber- Sumber Air.

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui intensifikasi, Dengan penerapan tehnologi yang tepat sesuai dengan spesifik lokasi (daerah pasang surut) diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian.

e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan; Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan; Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengolahan Lahan; Perluasan Areal Pertanian.

f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarna Pertanian

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi pertanian.

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2016 tercermin dari capaian beberapa indikator, sebagaimana tabel 4.56 berikut :

Tabel 4.56.
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016

Indikator Kinerja	Realisasi
Produksi Padi (Ton)	93.972
Produksi Jagung (Ton)	16.292
Produksi Kedelai (Ton)	986
Produksi cabe merali (Ton)	2.231
Produksi semangka (Ton)	5.017
Produktifitas Padi Ton/Ha)	4,51
Produktifitas Jagung (Ton/Ha)	7,1
Produktifitas Kedelai (Ton/Ha)	1,38
Produktifitas cabe merah (Ton/Hektar)	2,36
Produktifitas Semangka (Ton/Hektar)	5,33

Sumber : LKPJ Dinas Pertanian TP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Pengelolaan Tata Air belum optimal baik pada saat musim kemarau maupun musim penghujan, tahun 2016 lahan persawahan terendam banjir sebagai akibat air pasang (tanaman padi puso seluas 2.2412 hektar);
2. Degradasi lahan Pertanian (menurunnya kesuburan tanah);
3. Pengelolaan dan pemupukan tanah belum optimal;
4. Alsintan terbatas (traktor, thresher) berbanding luas tanam;
5. Akses inovasi teknologi rendah;
6. Kelembagaan petani belum berkembang;
7. Motivasi petani rendah /Petani belum mandiri;
8. Infrastruktur belum baik;
9. Akses permodalan sulit /Petani kurang modal;
10. Harga produk rendah pada musim panen.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Pengelolaan tata air mikro/pembangunan jaringan irigasi, parit cacing, pembangunan dam parit serta pintu air dan optimalisasi lahan;
2. Meningkatkan kesuburan tanah dengan pemupukan berimbang dan ramah lingkungan;
3. Pengolahan tanah yang optimal;
4. Pemenuhan Alsintan;
5. Pelatihan tehnologi pertanian (budidaya).
6. Fasilitasi kelembagaan petani

7. Mengoptimalkan fungsi penyuluh pertanian.
8. Peningkatan Infrastruktur Pertanian.
9. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi petani dan mendorong peran swasta dalam pembangunan pertanian.
10. Intervensi Pemerintah Daerah yang mengharuskan PNSD Kabupaten untuk membeli beras lokal

4.22. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Peternakan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2016, Dinas Peternakan melaksanakan 10 program dan 32 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Peternakan tertera dalam tabel 4.57 dibawah ini.

Tabel 4.57.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Peternakan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	964.539.500,00	960.471.488,00	(4.068.012,00)	99,57
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	684.095.000,00	674.367.900,00	(9.727.100,00)	98,57
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	24.500.000,00	24.500.000,00	-	100,00
4	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	610.838.900,00	588.673.062,00	(22.165.838,00)	96,37
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	282.545.000,00	281.974.000,00	(571.000,00)	99,79
7	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	360.650.000,00	358.721.520,00	(1.928.480,00)	99,46
8	PENINGKATAN PRODUSKI HASIL PETERNAKAN	604.470.000,00	601.694.400,00	(2.775.600,00)	99,54
9	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	150.980.100,00	150.501.100,00	(479.000,00)	99,68
10	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	907.528.220,00	890.337.900,00	(17.190.320,00)	98,10
	JUMLAH	4.610.146.720,00	4.551.241.370,00	(58.905.350,00)	98,72

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis; Penilaian Lomba-Lomba Peternakan; Hari Krida Pertanian (HKP) Dan Pekan Daerah (PEDA).

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan meliputi Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Ternak.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mengetahui masalah peternakan, memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular ternak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menjaga kesehatan ternak, mendistribusikan bibit ternak kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak; Pengembangan Agribisnis Peternakan.

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan bertujuan untuk membantu/memfasilitasi kelompok peternak dalam meningkatkan usahanya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah; Sarana Dan Prasarana Pasar Ternak.

f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak yang ada di masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Keswan Dan Kesmavet; Pembinaan Statistik Monitoring Dan Evaluasi Pertanian.

Jumlah populasi ternak tahun 2016 menurut kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.58.

Populasi Ternak Perkecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	itik	Ayam Buras	Ayam Pedaging
1	Mendahara	72	-	1.797	-	2.766	649.644	-
2	MendaharaUlu	797	15	1.940	13	2.019	28.735	3.255
3	Geragai	3.854	4	3.438	-	2.767	709.827	-
4	Dendanq	2.238	-	6.299	-	2.379	3.846	-
5.	Muara Sabak Barat	2.043	46	2.677	-	2.651	755.500	-
6.	Muara Sabak Tvnur	598	-	7.612	9	1.533	720.212	-
7	Kuala Jambi	94	-	1.736	-	3.344	137.738	-
8	Rantau Rasau	4.686	20	5.067	12	822	603.462	-
9.	Berbak	2.134	-	4.329	16	3.910	9.469	-
10	Nipah Panjang	1.322	-	3.380	1	5.940	1.564	19.736
11.	Sadu	670	-	1.923	-	6.371	9.404	-
Jumlah Tahun 2016*		**18.507**	**85**	**40.198**	51	**33.502**	**3.629.402**	**22.990**
Jumlah Tahun 2015		**16.961**	**58**	**38.379**	**93**	**31.906**	**3.408.462**	**59.425**

Dalam upaya pencapaian program/kegiatan Dinas Peternakan masih terkendala oleh beberapa permasalahan :

1. Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia peternak;
2. Masih rendahnya kualitas bibit ternak;
3. Masih rendahnya mutu produk hasil petemakan;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pasar ternak;
5. Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha petemakan;
6. Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular.

Sedangkan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya aparatur dan sumberdaya peternak melalui kegiatan pelatihan;
2. Mengoptimalkan kegiatan Inseminasi Buatan (IB);
3. Memanfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar temak;
5. Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan;
6. Meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan hewan.

4.23. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2016, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tertera dalam tabel 4.59 dibawah ini.

Tabel 4.59.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.050.073.000,00	1.820.484.450,00	(229.588.550,00)	88,80
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.280.317.150,00	1.198.941.400,00	(81.375.750,00)	93,64
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.300.000,00	65.850.000,00	(7.450.000,00)	89,83
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.500.000,00	2.770.000,00	(32.730.000,00)	7,80
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	319.443.000,00	278.635.600,00	(40.807.400,00)	87,22
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.550.000,00	(450.000,00)	97,75
7	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.851.091.500,00	1.615.124.077,00	(235.967.423,00)	87,25
8	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	58.160.000,00	29.020.000,00	(29.140.000,00)	49,89
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	628.071.500,00	543.944.500,00	(84.127.000,00)	86,60
	JUMLAH	6.315.956.150,00	5.574.320.027,00	(741.636.123,00)	88,26

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan dan peningkatan akses petani terhadap sumberdaya usaha pertanian. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; Operasional UPT BP3K Kecamatan Sadu; Operasional UPT BP3K Kecamatan Nipah Panjang; Operasional UPT BP3K Kecamatan Rantau Rasau; Operasional UPT BP3K Kecamatan Berbak; Operasional UPT BP3K Kecamatan Muara Sabak Timur; Operasional UPT BP3K Kecamatan Muara Sabak Barat; Operasional UPT BP3K Kecamatan Dendang; Operasional UPT BP3K Kecamatan Geragai; Operasional UPT BP3K Kecamatan Mendahara Ulu; Operasional UPT BP3K Kecamatan Mendahara; Operasional UPT BP3K Kecamatan Kuala Jambi; Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan; Jambore Nasional Dan HKP.

b. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

c. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan PKS (Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap) baik bagi penyuluh maupun petani. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan; Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten.

Sampai dengan tahun 2016, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 126 orang penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS sebanyak 47 orang atau 37,30 %, penyuluh swadaya sebanyak 6 orang atau 4,76 %, penyuluh THL-TD sebanyak 71 orang atau 56,35 % dan sisanya sebanyak 2 orang atau 1,59 % merupakan penyuluh THL-TBPP.

Tabel 4.60.
Jumlah Penyuluh dan Status Penyuluh per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Status Penyuluh Tahun 2016				
		PNS	THL-TD	THL-TBPP	Swadaya	Jumlah
1	Mendahara	2	8	-	1	11
2	Mendahara Ulu	4	5		1	10
3	Geragai	8	5			13
4	Dendang	3	6	1		10
5	MuaraSabakTimur	8	8		1	17
6	Muara Sabak Barat	5	7		1	13
7	Kuala Jambi	2	6			8
8	Rantau Rasau	4	6	1	1	12
9	Berbak	2	6			8
10	Nipah Panjang	5	7			12
11	Sadu	4	7		1	12
	Koordinator Penyuluh					-
Jumlah		**47**	**71**	**2**	**6**	**126**

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan sarana prasarana, Gapoktan/Poktan dan komisi penyuluhan tahun 2016 dapat dillihat pada tabel berikut :

Tabel 4.61.
Jumlah sarana prasarana, Gapoktan/Poktan dan komisi penyuluhan
Tahun 2016

No	Uraian	2016
1	Pos Penyuluh (Unit)	0
2	Gapoktan (Unit)	93
3	Poktan (Kelompok)	1002
4	Kelas Kelompok Tani (Klmpk) :	
	1. BDK	0
	2. Pemula	679
	3. Lanjut	221
	4. Madya	97
	5. Utama	5
5	Komisi Penyuluhan	1

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan adalah yaitu Belum validnya data kelompok tani, hal ini menyebabkan bantuan yang didistribusikan kurang tepat sasaran. Untuk itu perlu dilakukan pendataan Kelompok Tani.

4.24. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan urusan pilihan dengan bidang urusan *Pertanian* dan bidang Urusan *Kehutanan*. Pada Tahun 2016, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 9 program dan 27 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertera dalam tabel 4.62 dibawah ini.

Tabel 4.62.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	596.191.300,00	530.776.250,00	(65.415.050,00)	89,02
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	177.525.000,00	137.974.635,00	(39.550.365,00)	77,72
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.420.000,00	34.420.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.500.000,00	17.500.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	11.950.000,00	(8.050.000,00)	59,75
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	403.700.000,00	392.180.000,00	(11.520.000,00)	97,14
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	613.750.000,00	536.236.700,00	(77.513.300,00)	87,37
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	686.226.900,00	674.100.125,00	(12.126.775,00)	98,23
9	PROGRAM PEMBINAAN KAWASAN HUTAN	95.000.000,00	85.388.000,00	(9.612.000,00)	89,88
	JUMLAH	2.644.313.200,00	2.420.525.710,00	(223.787.490,00)	91,54

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan agar terwujudnya keberhasilan peningkatan luas dan produksi tanaman perkebunan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Kawasan Dan Peningkatan Usaha Masyarakat di Bidang Perkebunan.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk perlindungan dari illegal/logging perambahan hutan dan penaggulangan kebakaran hutan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan

melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan; Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan; Pengendalian Hama Tanaman Perkebunan; Penyusunan Perda tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dalam pengembangan pengelolaan hutan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Data Statistik dan Monitoring; Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kehutanan dan Perkebunan; Pendataan, Pengkayaan dan Pemeliharaan Tanaman Turus Jalan.

d. Program Pembinaan Kawasan Hutan

Program ini bertujuan tercapainya tertib usaha kehutanan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi Serta Tertib Usaha Kehutanan.

Pemberian bantuan bibittanaman perkebunan yang dilakukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Luas Tanaman, produksi dan produktivitas hasil Perkebunan Rakyat, tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.63.
Bantuan Bibit Perkebunan untuk Masyarakat

NO	KOMODITI	2016	
		∑ Bibit (batang)	Luas Lahan (Ha)
1	Karet	-	-
2	Lada	-	-
3	Pinang	4,000	5
4	Kakao	-	-
5	Kelapa Dalam	-	-
6	Kopi	4,000	6.5
Jumlah		**8,000**	**11.50**

Sumber : LKPJ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 4.64.
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2016
1	Karet	7,824
2	Kelapa Sawit	33,620
3	Kelapa Dalam	58,609
4	Kelapa Hibrida	69
5	Lada	46
6	Kakao	384
7	Pinang	8,950
8	Kopi Rubusta	3,232
9	Kemiri	9

Sumber : LKPJ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 4.65.
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2016
1	Karet	3,058
2	Kelapa Sawit	45,739
3	Kelapa Dalam	51,117
4	Kelapa Hibrida	54
5	Lada	9
6	Kakao	173
7	Pinang	2,945
8	Kopi Rubusta	1,048
9	Kemiri	2

Sumber : LKPJ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Tabel 4.66.
Produktifitas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2016
1	Karet	849
2	Kelapa Sawit	1,986
3	Kelapa Dalam	1,159
4	Kelapa Hibrida	885
5	Lada	563
6	Kakao	755
7	Pinang	461
8	Kopi Rubusta	472
9	Kemiri	500

Sedangkan luasan kawasan hutan pada wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.67.
Luas Hutan menurut Kawasan

NO	Jenis Hutan/Kawasan	Luas areal (Ha)
1	Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur	4,129.60
2	Taman Nasional Berbak	116,604.80
3	Kawasan Pelestarian Tahura Sekitar Tanjung	2,677.63
4	Hutan Lindung Gambut	24,288.33
5	Hutan Produksi Tetap	54,686.75
6	Hutan Produksi Konservasi	1,334.87

Sumber : LKPJ Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengawasan hutan dan pembinaan sector perkebunan antara lain :

- Masih banyaknya pelaku perambahan hutan dalam kawasan;
- Kurang terbukanya pihak perusahaan terhadap instansi terkait mengenai permasalahan izin dan laporan perkembangan perkebunan.

4.25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *energi dan sumber daya mineral*. Pada Tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan 10 program dan 37 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tertera dalam tabel 4.68 dibawah ini.

Tabel 4.68.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.025.315.700,00	994.484.843,00	(30.830.857,00)	96,99
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	314.782.000,00	314.782.000,00	-	100,00
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.600.000,00	15.600.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	80.000.000,00	78.650.000,00	(1.350.000,00)	98,31
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	161.000.000,00	158.378.523,00	(2.621.477,00)	98,37
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000,00	14.447.000,00	(553.000,00)	96,31
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	350.000.000,00	295.020.354,00	(54.979.646,00)	84,29
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	15.493.362.000,00	15.435.918.979,00	(57.443.021,00)	99,62
9	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN REKAYASA SUMBERDAYA MINERAL	310.810.000,00	309.868.856,00	(941.144,00)	99,69
10	PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	135.000.000,00	113.400.059,00	(21.599.941,00)	84,00
	JUMLAH	17.900.869.700,00	17.730.550.614,00	(170.319.086,00)	99,05

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan dan pengawasan sumber daya bidang pertambangan Untuk mencapai sasaran yang diinginkan

dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Pengawasan Dan Pendataan Bidang Pertambangan;

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini bertujuan untuk pengembangan/perluasan jaringan listrik perdesaan, koordinasi pengembangan ketenagalistrikan serta perencanaan jaringan listrik pedesaan, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan; Pengadaan Alat-Alat Jaringan Listrik; Pemeliharaan Dan Pengawasan Jaringan Listrik; Perencanaan Ketenagalistrikan; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Geragai; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Nipah Panjang; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Kuala Jambi; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Mendahara; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Muara Sabak Timur; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Sadu; Pembangunan Jaringan Listrik Kecamatan Rantau Rasau; Inventarisasi Aset Jaringan Listrik;

c. Program Pengembangan dan Rekayasa Sumber Daya Mineral

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Mineral; Penentuan Potensi Air Bawah Tanah Kec. Rantau Rasau Dan Muara Sabak Timur; Promosi Sumberdaya Mineral Dan Kelistrikan.

d. Program Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Inventarisasi Energi Baru Terbarukan.

Potensi Pertambangan di Tanjung Jabung Timur demikian dominan, ini dapat dilhat perannya sebagai kontributor utama dalam PDRB sampai pada Tahun 2016. Dalam kaitan ini dapat dilihat dua perusahaan asing yaitu PETRONAS dari Malaysia dan PETRO CHINA dari China yang melakukan exsplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Untuk periode Desember 2016 ini lifting minyak bumi di kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 1.239.75 barrel atau rata-rata per hari ± 3.443,75 barrel, sedangkan lifting gas bumi tahun 2016 mencapai 12.185.300 MMBTU.

Sebagai upaya pencapaian rasio 75/100 electricity pada akhir tahun 2016 capaian *Rasio electricity* untuk kecamatan sebesar 100 %, untuk desa / kelurahan 89,25 %, sedangkan untuk rumah tangga 85,24%.

Tabel 4.69.
Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Ketenagalistrikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

BIDANG SUMBER DAYA MINERAL	CAPAIAN
Lifting Minyak Bumi	1.161,05 Barel
Lifting Gas Bumi	16.638,34 MMBTU
BIDANG KETENAGALISTRIKAN	
Ratio Elektricity Kecamatan	100%
Ratio Elektricity Desa/Kelurahan	89,25
Ratio Elektricity Rumah Tangga	85,24%
PLTS	Paket PLTS Terpusat (60 KK) di Pulau Burung Kec. Nipah Panjang.
	Paket PLTS Terpusat Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu

Sumber : LKPJ Dinas ESDM kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Rasio Elektrifikasi Tahun 2016 ini mengalami peningkatan karena telah dibangunnya jaringan listrik dana APBN Program Lisdes di Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Muara Sabak Timur dan ditambah dengan pengembangan pembangunan jaringan listrik di kecamatan lain baik melalui Program Dinas ESDM (APBD II), A-PLN Program PLN (Persero) WS2JB Area Jambi meliputi :

1. Pembangunan gardu induk berkekuatan 30 Mega watt dengan demikian terakomodir krisis energi rumah tangga sebesar 18 mega dan surplus energi sebesar 12 megawatt;
2. Pembangunan jaringan listrik Program Lisdes Dana APBN sepanjang 40,7 kilometer yang berlokasi di Desa Sinar Wajo, Desa Mencolok, Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu, Desa Alang-alang di Kecamatan Muara Sabak Timur, Desa Karya Bhakti di Kecamatan Rantau Rasau;
3. Pembangunan 2 PLTS di Pulau Burung Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang dan Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu berkekuatan 15 Kilo Watt.

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;

3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat rangka kesejahteraan rakyat;
5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun instansi vertikal dan pihak swasta.

4.26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perindustrian* dan bidang urusan *Perdagangan*. Pada Tahun 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 13 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertera dalam tabel 4.70 dibawah ini.

Tabel 4.70.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	758.867.500,00	710.305.556,00	(48.561.944,00)	93,60
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	505.140.000,00	489.853.001,00	(15.286.999,00)	96,97
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	95,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	130.879.700,00	129.317.500,00	(1.562.200,00)	98,80
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.863.000,00	23.860.000,00	(3.000,00)	99,98
6	PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	55.500.000,00	55.363.500,00	(136.500,00)	99,75
7	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	565.030.000,00	462.985.540,00	(102.044.460,00)	81,93
8	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	35.000.000,00	33.699.900,00	(1.300.100,00)	96,28
9	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	58.800.000,00	57.000.113,00	(1.799.887,00)	96,93
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA- SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	1.499.874.000,00	1.481.784.400,00	(18.089.600,00)	98,79
11	PEMANTAPAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN KEREASI PRODUK KERAJINAN	338.495.000,00	301.954.300,00	(36.540.700,00)	89,20
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	348.889.000,00	334.477.000,00	(14.412.000,00)	95,86
13	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	5.323.472.300,00	5.181.698.850,00	(141.773.450,00)	97,33
	JUMLAH	9.663.810.500,00	9.281.299.660,00	(382.510.840,00)	96,04

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang meliputi :

a. Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa; Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah; Sosialisasi Perlindungan Konsumen; Operasi Pasar.

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang/Produk; Temu Usaha Misi Dagang Dan Pasar Lelang Agro; Pembangunan Pasar Sehat Tradisonal; Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi;

c. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Modal Ventura Bagi Industri Berbasis Teknologi;

d. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri; Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah; Pasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Bumn/Swasta.

e. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri;

f. Program Penataan Struktur Industri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri;

g. Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sentra- Sentra Potensial;

h. Pemantapan Pengembangan Inovasi Dan Kereasi Produk Kerajinan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Dan Pemantapan Tata Kelola Dekranasda; Pelatihan Dan Inovasi Kerajinan; Pameran Dan Promosi Produk Kerajinan Dekranasda;

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting penyokong perekonomian satu daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tahun 2016 serta serapan tenaga kerja, dan nilai investasi, produksi, dan bahan baku dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.71.
Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

No	Jenis Industri	Jumlah Industri	Jumlah Tenaga Kerja	2016		
				Nilai Investasi (Rp)	Nilai Produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku (Rp)
1	IKM produk	-	-	-	-	-
2	IKM potensial	608	1.904	20.681.700	153.429.214	8.708.500
3	Industri	-	-	-	-	-
	Jumlah	**608**	**1.904**	**20.681.700**	**153.429.214**	**8.708.500**

Sumber : LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Fasilitas pasar yang telah terbangun sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada table 4.72 berikut :

Tabel 4.72.
Jumlah, Kondisi, Jenis dan Kepemilikan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Tahun	Jumlah pasar	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
		Baik	Sedang	kurang	Mingguan	Harian	Masyarakat	Pemda	Desa
2016	33	10	4	19	30	3	11	17	5

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan anta lain :

1. Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan Pelaku usaha;
2. Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan pelaku usaha;
3. Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM melalul diklat teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
2. Peningkatan koordinasi antar dinas instansi yang baik dalam rangka pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
3. Terwujudnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan biaya yang murah disetiap dan antar Desa / Kelurahan / Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga biaya produksi dan harga jual produk dapat ditekan.

4.27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda menyelenggarakan urusan Penunjang pemerintahan Bidang urusan *Perencanaan*. Pada Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan

14 program dan 51 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel 4.73 dibawah ini.

Tabel 4.73.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	819.455.090,00	771.124.706,00	(48.330.384,00)	94,10
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	831.660.300,00	772.911.257,00	(58.749.043,00)	92,93
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	13.300.000,00	(1.700.000,00)	88,66
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	46.384.000,00	41.332.000,00	(5.052.000,00)	89,10
6	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	485.783.500,00	462.991.067,00	(22.792.433,00)	95,30
7	PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	145.145.000,00	124.098.000,00	(21.047.000,00)	85,49
8	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.130.763.500,00	1.079.089.563,00	(51.673.937,00)	95,43
9	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	373.192.500,00	349.723.040,00	(23.469.460,00)	93,71
10	PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	486.469.900,00	388.584.158,00	(97.885.742,00)	79,87
11	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH	487.210.000,00	443.274.741,00	(43.935.259,00)	90,98
12	PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH	199.037.500,00	184.087.062,00	(14.950.438,00)	92,48
13	PENGEMBANGAN E-GOVERMENT	832.190.000,00	799.735.246,00	(32.454.754,00)	96,10
14	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	264.720.000,00	247.448.430,00	(17.271.570,00)	93,47
	JUMLAH	6.132.011.290,00	5.692.699.270,00	(439.312.020,00)	92,84

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk pengumpulan data, dan updating data untuk dokumen perencanaan pembangunan, profile daerah, serta proyeksi analisa ekonomi makro dan analisa lainnya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah serta stakeholder. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan; Penyusunan Profile Daerah; Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Dan Informasi; Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini merupakan program sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategi Cepat Tumbuh di Daerah. Tujuan dari program ini adalah mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan

perbatasan. Untuk percepatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bidang Infrastruktur Wlayah; Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan.

c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanan pembangunan daerah dan kebijakan yang akan ditampung pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, seperti : RPJP, RPJM, Renstra, RPKD, Renja, KUA, PPAS. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik; Penyusunan RPJMD 2016 - 2021; Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan.

d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah; Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi; Penyusunan Publikasi Susenas; Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Kab. Tanjung Jabung Timur;.

e. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan kebijakan guna mewujudkan pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Outline Plan Drainase Kab. Tanjung Jabung Timur; Pendampingan Kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau / MCC Bappenas; Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP); Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).

g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah

Sasaran dari program ini tersedianya data informasi daerah yang terkini untuk pengembangan Investasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Pembangunan Penanaman Modal; Koordinasi Perencanaan Dan Pembangunan Kerjasama Antar Daerah.

h. Program Pengembangan E-Government

Inti dari program ini guna pengembangan sistem e-government yang telah ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan E-Goverment; Pengembangan Sistem Informasi Dan Aplikasi. Adapun Jumlah Pengguna Jaringan E-Government Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.74.

Jumlah Pengguna Jaringan E-Government s/d Tahun 2016

No	Pengguna	Jumah
1	SKPD ditingkat Kabupaten	31 instansi
2	SKPD ditingkat Kecamatan	11 instansi
3	Instansi vertikal	2 instansi
TOTAL		**44 instansi**

Sumber : LKPJ Bappeda, 2016

Sistem E-government diharapkan dapat memberi kemudahan dalam mencari informasi dan melakukan tugas sehari-hari. Untuk mendapatkan informasi tentang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengakses website resmi kabupaten ***(www.tanjabtimkab.go.id)*** selain itu terdapat pula aplikasi dalam mempermudah pekerjaan sekaligus upaya mencapai good governance, aplikasi yang sudah berjalan antara lain :

- Aplikasi Keuangan Daerah
- Aplikasi Kepegawaian
- Aplikasi LPSE

i. Program Perencanaan Tata Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang diinginkan pada masa yang akan datang. Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah. Strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran masing-masing kebijakan penataan ruang wilayah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang; Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kec. Nipah Panjang.

Adapun keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 antara lain :

Tabel 4.75.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

NO	INDIKATOR KINERJA	capaian
1	Persentase keselarasan perencanaan	91%
2	Persentase keterukuran perencanaan	87%
3	Persentase konsistensi perencanaan	92%
4	Persentase partisipatif dalam perencanaan	70%
5	Persentase inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	67%
6	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi, Sosial Budaya dan Infrastruktur wilayah	9%
7	Persentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	91%
8	Persentase tingkat pengukuran kinerja	87%
9	Persentase tingkat pelaporan kinerja	83%
10	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	100%
11	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100%
12	Penggunaan jaringan E-Goverment	44 instansi

Sumber : LKPJ Bappeda, 2016

Secara umum tidak ada permasalahan yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016 namun ada beberapa langkah penting yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan;
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat;
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pemasangan menara jaringan internet dan atau wifi id di lokasi SKPD yang belum menggunakan E-Goverment.

4.28. Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *Pengawasan*. Pada Tahun 2016, Inspektorat melaksanakan 7 program dan 30 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Inspektorat tertera dalam tabel 4.76 dibawah ini.

Tabel 4.76.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	623.856.400,00	620.753.843,00	(3.102.557,00)	99,50
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	512.700.000,00	511.209.800,00	(1.490.200,00)	99,70
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.250.000,00	13.250.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	13.986.100,00	(13.900,00)	99,90
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	19.950.000,00	(50.000,00)	99,75
6	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.309.813.694,00	2.307.535.743,00	(2.277.951,00)	99,90
7	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	219.401.806,00	219.073.441,00	(328.365,00)	99,85
	JUMLAH	3.713.021.900,00	3.705.758.927,00	(7.262.973,00)	99,80

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 2 (dua) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan mengawal apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur telah dipatuhi dan berjalan sesuai rencana, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keadaan informasi yang dihasilkan oleh berbagai informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Darah yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh bupati tanjung jabung timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif; Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; Review, Monitoring Dan Evaluasi; Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Monitoring Dan Penyelesaian TP-TGR.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas tenaga aparatur pemeriksa internal pemerintah di inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kualitas hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan; Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Capaian kinerja dari inspektorat tahun 2016 tergambar dari hasil pemeriksaan internal dan review tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.77.
Jumlah Pemeriksaan Internal dan Review, 2016

No.	Kegiatan	capaian		Ket.
I.	**Pengawasan internal secara Berkala**	**70**	**Obr**	
1	Reguler	23	Obr	23LHP
2	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda dan Pengaduan Masyarakat	16	Ks	16LHP
3	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	12	Obr	12LHP
4	Probity Audit	6	Obr	6LHP
5	Pengawasan Penggunaan Dana Hibah/Bansos	6	Obr	6LHP
6	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	6	Obr	6LHP
7	SIDAK	1	Pkt	6LHP
II.	**Review Monitorlng dan Evaluasi**	**178**	**Obr**	
8	Review Laporan Keuangan	43	SKPD	1 LHR Kompilasi
9	Evaluasi LAKIP SKPD	43	SKPD	1 LHE Kompilasi
10	Monitoring Penutupan Kas SKPD dlingkup Pemda, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	43	Pkt	24LHIVI
11	Review RKA SKPD	45	SKPD	1 LHR Kompilasi
12	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibaii Barang dan Jasa	4	SKPD	4LHM
III.	**Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**	**7**	**Obr**	
13	Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	**7**	Obr	7LHP

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Tabel 4.78.
Total Temuan hasil audit pemeriksaan Tahun 2011- 2016

Tahun	Total Temuan	Cicilan			Sisa Temuan	% Kinerja ITKAB
		Melalui TLITKAB	Melalui MP TP-TGR	Jumlah		
2011	473.945.685,31	142.060.963,00	106.590.331,79	248.651.294,79	225.294.390,52	52,46
2012	3.666.132.288,10	2.983.792.611,47	658.178.585,63	3.641.971.197,10	24.161.091,00	99,34
2013	1.227.141.167,68	779.132.656,31	423.008.511,37	1.202.141.167,68	25.000.000,00	97,96
2014	1.275.520.854,23	895.673.141,08	247.828.031,45	1.143.501.172,53	132.019.681,70	89,65
2015	13.768.615.917,91	4.993.935.560,07	2.585.743.059,68	7.579.678.619,75	6.188.937.298,16	55,05
TOTAL	**20.411.355.913,00**	**9.794.594.932,00**	**4.021.348.520,00**	**13.815.943.452,00**	**6.595.412.461,00**	
%TINDAK LANJUT		**48%**	**20%**	**68%**	**32%**	

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2016

Dari total temuan Tahun 2011 s/d 2016 sebesar Rp. 20.411.355.913,- (Dua puluh milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), persentase penyelesaian melalui TLITKAB Tanjung Jabung Timur sebesar 48% atau Rp. 9.794.594.932,- (*Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*), dan % penyelesaian melalui

MP TP-TGR sebesar 20% atau Rp. 4.021.348.520,- (*Empat milyar dua puluh satu juta tiga raus empat puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah*).

Total pengembalian uang atas temuan setoran ke kas negara sebesar 68% atau Rp. 13.815.943.452,- (*Tiga belas milyar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah*).

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui terhadap pelaksanaan pengawasan OPD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia dibidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor;
2. Masih adanya OBRK/SKPD yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan Tindaklanjut hasil pemeriksaan;
3. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan;
4. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut kedepan antara lain :

1. Peningkatan kualitas SDM Staf melalui diklat untuk mendapatkan sertifikasi tenaga auditor;
2. Pemberian sanksi yang tegas terhadap OBRK yang tidak/belum melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan Pemutakhiran data yang berkaitan dengan temuan ataupun hasil pengawasan;
3. Peningkatan pemahaman Obrik terhadap rekomendasi saran dari temuan pemeriksaan melalui Pendekatan dengan Objek Pemeriksaan (SKPD);
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

4.29. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *Keuangan*. Pada Tahun 2016, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 9 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertera dalam tabel 4.79 dibawah ini.

Tabel 4.79.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.003.637.000,00	3.838.576.383,00	(165.060.617,00)	95,87
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	678.455.000,00	631.005.715,00	(47.449.285,00)	93,00
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	35.250.000,00	33.000.000,00	(2.250.000,00)	93,61
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.828.000,00	1.300.000,00	(39.528.000,00)	3,18
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	87.557.000,00	81.648.750,00	(5.908.250,00)	93,25
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
7	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.448.770.150,00	4.086.163.424,00	(362.606.726,00)	91,84
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	89.075.000,00	87.697.000,00	(1.378.000,00)	98,45
9	PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	299.299.000,00	270.001.483,00	(29.297.517,00)	90,21
	JUMLAH	9.702.871.150,00	9.049.392.755,00	(653.478.395,00)	93,27

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan Manajemen Dan Evaluasi Aset Daerah; Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; Sistem Informasi Dan Manajemen Gaji; Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Pengamanan Aset Milik Pemerintah; Pengendalian Keuangan Daerah; Penyusunan Laporan Akuntansi Wilayah; Operasional UPTD Wilayah Timur; Operasional UPTD Wilayah Barat; Pemuktahiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan.

b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA);

c. Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Aset Daerah;

Selain program tersebut diatas, DPKAD selaku PPKD, selama tahun anggaran 2016 telah menyalurkan dana transper dan bantuan keuangan yang terdiri dari :

Tabel 4.80.

Dana transper dan bantuan keuangan tahun 2016

NO	URAIAN	REALISASI
I	**BELANJA HIBAH**	**7.784.500.000,00**
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	6.284.500.000,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	1.500.000.000,00
II	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**	**1.052.048.829,00**
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	-
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	1.052.048.829,00
III	**BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA**	**1.565.962.000,00**
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	1.565.962.000,00
IV	**BELANJA BATUAN KEUANGAN KEPADA PROVONSI/KABUPATEN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK**	**82.866.944.140,00**
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	82.074.179.740,00
2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	792.764.400,00
V	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**597.439.384,00**
1	Belanja Tidka Terduga	597.439.384,00
VI	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.000.000.000,00**
1	Penyertaan Modal Pada BUMD	2.000.000.000,00
	JUMLAH	**95.866.894.353,00**

Sumber : DPKAD, 2016

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2016, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain :

1. Masih rendahnya Pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan;
2. proses pensertifikatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terkendala birokrasi yang panjang di BPN.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya melaksanakan rapat koordinasi rutin oleh pejabat yang berwenang pengambil kebijakan;
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi vertikal yang berkompeten dalam rangka memperpendek birokrasi dan rentang waktu.

4.30. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan*. Pada Tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 9 program dan 46 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kepegawaian Daerah tertera dalam tabel 4.81. dibawah ini.

Tabel 4.81.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	785.008.700,00	760.850.942,00	(24.157.758,00)	96,92
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	248.544.000,00	248.233.062,00	(310.938,00)	99,87
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	174.190.000,00	169.790.000,00	(4.400.000,00)	97,47
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.520.000,00	18.520.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.525.000,00	58.900.000,00	(1.625.000,00)	97,31
7	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	281.350.000,00	222.397.228,00	(58.952.772,00)	79,04
8	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS	80.000.000,00	79.906.200,00	(93.800,00)	99,88
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.906.651.600,00	1.831.003.538,00	(75.648.062,00)	96,03
	JUMLAH	3.574.789.300,00	3.409.600.970,00	(165.188.330,00)	95,38

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya; Pengadaan Kartu Tanda Pengenal (Id Card); Evaluasi Dan Verifikasi Daftar Hadir PNS.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Evaluasi Dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah.

c. Program Pendidikan Kedinasan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Keterampilan Dan Profesionalisme; Pendidikan Dan Penjenjangan Struktural Diklatpim III Dan IV; Pendidikan Dan Penjenjangan Struktural Diklatpim II.

d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemrosesan Usulan Pensiun Dan Pangkat Pengabdian.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis PNS; Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pns; Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Dan Cuti PNS; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah; Pelayanan Kartu Taspen, Taperum, Dan Kartu Pegawai; Operasional Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan; Pemberian Bantuan Pendidikan Di PTN/PTS; Penyelenggaraan Diklat Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Dan Jasa; Penyusunan Formasi PNS; Penempatan PNS/Redistribusi PNS; Penataan Sistem Pengurusan Pengangkatan Fungsional Pns/Impassing PNS Fungsional; Pembekalan Masa Persiapan Pensiun; Pemberian Tanda Jasa; Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan; Proses Status Hukum; Diklat Teknis SAP Berbasis Akrual; Pengembangan Karir Dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS; Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 sebanyak 4040 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.82
Komposisi Aparatur Negara
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016

No	Aparatur Negara	2016
∑ PNS		**4.040**
1	Golongan I	41
2	Golongan II	937
3	Golongan III	2.015
4	Golongan IV	1.047
∑ Pejabat eselon		**682**
1	Eselon I	-
2	Eselon II	29
3	Eselon III	156
4	Eselon IV	492
5	Eselon V	5
∑ Menurut Pendidikan		**4.039**
1	SD	47
2	SMP	61
3	SLTA	920
4	DI & DII	572
5	DIII	507
6	S1 & DIV	1.834
7	S2	98
8	S3	-
∑ Pejabat Fungsional		**3.347**
1	Pejabat Fungsonal	3.347

Sumber : LKPJ Badan Kepegawaian Daaerah, 2016

Capaian Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.83.
Capaian Kinerja tahun 2016

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah aparatur yang menjadi Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	3 orang
2	Jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan izin belajar	20 0rang
3	Jenis Diklat Bimtek, Sosialisasi dan Rakor yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensei bidang teknis fungsional dan keahlian	2 jenis
4	persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	96,92%
5	persentase terlaksananya sarana dan prasarana kerja	99,87%
6	persentase terlaksananya peningkatan disiplin aparatur	97,47%
7	jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan	3 dok
8	persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	97,32%
9	persentase tercapainya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%
10	jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier	50%
11	Jumlah PNS yang pensiun	65 orang
12	persentase terbitnya kartu pegawai	99,73%

No.	Indikator Kinerja	Capaian
13	persentase terbitnya SK Kenaikan pangkat	100%
14	persentase terbitnya SK Fungsional	100%
15	Jumlah PNS yang menerima pemberian tanda jasa	50 orang
16	jumlah PNS yang menerima penghargaan bagi PNS teladan	4 orang
17	Persentase terprosesnya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	98,39%
18	Jumlah terselesaikannya status hukum aparatur	19 0rg
19	Jumlah terbitnya Kartu Tanda Pengenal (ID Card)	1000 kartu
20	Pemberian TKD Sesuai dengan beban kerja dan prestasi kerja serta lokasi tempat tugas (sangat terpencil-terpencil-tidak terpencil)	1 persatuan melalui SK Bupati atau Perda
21	Terpenuhinya pengetahuan PNS BUP (Batas Usia Pensiun) yang memasuki masa pensiun untuk kewirausahaan	100%
22	persentase Jumlah SN tersandung masalah Hukum yang mendapatkan bantuan Hukum	100%
23	Jumlah Data ASN yang akurat terkini	4039 org
24	Jumlah aparatur	1 aplikasi

Sumber : LKPJ Badan Kepegawaian Daaerah, 2016

4.31. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah

Kantor Penelitian Pengembangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan Bidang urusan *Penelitian Dan Pengembangan*. Pada Tahun 2016, Kantor Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Penelitian Pengembangan Daerah tertera dalam tabel 4.83 dibawah ini.

Tabel 4.84.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	308.987.000,00	290.159.500,00	(18.827.500,00)	93,90
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	67.500.000,00	66.633.600,00	(866.400,00)	98,71
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	151.250.000,00	151.250.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20.000.000,00	17.675.000,00	(2.325.000,00)	88,37
6	PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	170.665.000,00	170.665.000,00	-	100,00
7	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	144.957.000,00	94.957.000,00	(50.000.000,00)	65,50
8	KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	114.575.000,00	58.995.000,00	(55.580.000,00)	51,49
9	PENINGKATAN KUALITAS DATA DAN PERENCANAAN	178.640.000,00	178.640.000,00	-	100,00
	JUMLAH	1.160.374.000,00	1.032.775.100,00	(127.598.900,00)	89,00

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program Perencanaan Sosial Budaya

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kajian Strategis Penanganan Dan Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Program Penelitian/Pengembangan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penelitian Responsif; Kajian Pengembangan Potensi Wisata Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

c. Program Kelembagaan dan Kelaksanaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Hakteknas; Kegiatan Rakorda;Kegiatan Dewan Riset Daerah/Sida.

d. Program Peningkatan Kualitas Data Dan Perencanaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kajian Penyusunan Database Potensi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Capaian Indikator Kinerja Kantor Penelititan dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.85.

Capaian Kinerja Kantor Penelititan dan Pengembangan Daerah
Tahun 2016

No	Uraian	Capaian
1	Jumlah Kajian Ilmiah bidang Sosial dan Pemerintahan	100%
2	Jumlah Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100%
3	Jumlah Kajian Ilmiah Bidang Inovasi dan Teknologi	100%
4	Jumlah Peneliti yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%
5	Jumlah Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Penelitian	100%

Sumber : LKPJ Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang untuk pencapaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan penelitian akan dilakukan lebih akurat dan cermat;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan.

4.32. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi *staf Pendukung Kepala Daerah*. Pada Tahun 2016, Sekretariat Daerah melaksanakan 22 program dan 100 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Daerah tertera dalam tabel 4.85 dibawah ini.

Tabel 4.86.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Sekretariat Daerah Tahun 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.641.494.750,00	9.088.768.935,00	(1.552.725.815,00)	85,40
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.843.510.900,00	6.109.726.900,00	(733.784.000,00)	89,27
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	256.023.600,00	254.280.250,00	(1.743.350,00)	99,31
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	26.508.000,00	(43.492.000,00)	37,86
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	147.947.000,00	143.952.500,00	(3.994.500,00)	97,30
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.550.000,00	25.870.000,00	(680.000,00)	97,43
7	PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QUR'ANI	5.087.181.000,00	4.757.009.230,00	(330.171.770,00)	93,50
8	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1.567.941.350,00	1.450.164.013,00	(117.777.337,00)	92,48
9	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	305.020.000,00	186.461.768,00	(118.558.232,00)	61,13
10	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	751.016.000,00	714.548.550,00	(36.467.450,00)	95,14
11	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI	1.279.140.000,00	1.183.364.586,00	(95.775.414,00)	92,51
12	PROGRAM PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	47.430.000,00	47.189.000,00	(241.000,00)	99,49
13	PROGRAM PENATAAN PERANGKAT DAERAH	511.126.500,00	509.671.050,00	(1.455.450,00)	99,71
14	PROGRAM PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	117.935.000,00	117.833.100,00	(101.900,00)	99,91
15	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	18.465.000,00	13.383.250,00	(5.081.750,00)	72,47
16	PROGRAM FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	645.610.000,00	392.528.400,00	(253.081.600,00)	60,79
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	162.655.000,00	132.093.000,00	(30.562.000,00)	81,21
18	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	246.130.000,00	227.107.600,00	(19.022.400,00)	92,27
19	PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERMENT	1.263.434.200,00	1.186.402.063,00	(77.032.137,00)	93,90
20	PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTREGITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	73.125.000,00	73.055.000,00	(70.000,00)	99,90
21	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.746.600.000,00	1.721.812.000,00	(24.788.000,00)	98,58
22	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	3.852.525.000,00	3.808.513.950,00	(44.011.050,00)	98,85
	JUMLAH	35.660.860.300,00	32.170.243.145,00	(3.490.617.155,00)	90,21

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 16 (enam belas) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas Iman dan Tagwa Generasi Muda Gurani

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Mtq Tingkat Kabupaten; Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi; Pelaksanaan Safari Ramadhan Dan Sholat Idul Fitri Dan Idul Adha; Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah Dan Kaligrafer Potensial; Pelaksanaan Festival Anak Saleh Indonesia; Pelaksanaan TC Festival Anak Saleh Indonesia; Pelaksanaan Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Provinsi; Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi; Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh; Pelaksanaan Kegiatan Jemaah Haji Dan Umroh; Pelaksanaan Pelatihan Da'i-Da'iah; Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pasca Haji.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diantaranya Pengawasan Tim Raskin Ke 11 Kecamatan Tentang Distribusi Raskin; Pengawasan, Pengkajian, Pengendalian Dan Penyaluran Dana Kupem, Sembako Dan BBM; Peningkatan Koordinasi Dan Pengawasan Kegiatan Lintas Sektoral Bidang Ekonomi; Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi; Pengendalian Kegiatan Pembangunan; Sistem Administrasi Pelaporan Kegiatan Pembangunan; Penyusunan Program Kerja Pembangunan; Koordinasi Dan Pengendalian Pertambangan Dan Energi; Koordinasi Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; Koordinasi Dan Pengendalian Kehutanan, Perkebunan Dan Pertanian; Monitoring, Evaluasi Dan Sosialisasi Kebakaran Lahan Dan Hutan; Koordinasi Dan Pengendalian Potensi Daerah; Pelaksanaan Penyaluran Santunan Kematian; Pengendalian Inflasi Daerah; Penyusunan Ranperda Pengendalian Dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi.

c. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inti dari program ini guna penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah daerah, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pemkab (Advokasi Dan Kuasa Hukum); Penanganan Kasus-Kasus Pemkab (Advokasi Dan Kuasa Hukum);

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan memiliki kegiatan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; Publikasi Peraturan Perundang-Undangan; Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah; Penyusunan Abstrak Produk Hukum Daerah; Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;.

e. Program Penataan Daerah Otonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik hingga lapisan terendah, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pemerintahan Umum; Penataan Dan Penegasan Batas Daerah; Peningkatan Kapasitas Camat; Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Pembakuan Nama Rupa Bumi; Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

f. Program Penataan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.

g. Program Penataan Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal Dan Reformasi Birokrasi; Penataan Tata Naskah Dinas.

h. Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk lebih mengefektikan pelaksanaan pemerintahan dari sisi pembagian tugas pokok. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah.

i. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Promosi Potensi Daerah.

j. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan ialah Hari-Hari Besar Keagamaan; Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT.

k. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dimaksudkan untuk membina dan memfasilitasi wirausahawan dengan modal yang diberikan pemerintah daerah sehingga diharapkan usaha yang dijalankan akan dapat lebih berkembang, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kredit Modal Kerja Pedesaan/Kelurahan; Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bumd Dan Bumdes.

l. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa lahan yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

m. Program Pengembangan E-Goverment

Sebagai sarana melaksanakan Perpes Nomor 54 Tahun 2010 tentang mekanisme pelelangan dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencapai

sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Unit Layanan Pengadaan (ULP).

n. Program Pembangunan Zona Intregitas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil diperlukan pembinaan dan pengembangan aparatur, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Percepatan Pencegahan Bahaya Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

o. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dokumentasi; Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala; Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center; Penataan Dan Pengelolaan Studio Dan Komunikasi.

p. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah; Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Berlangganan Majalah Dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan; Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi Dan Promosi; Penataan, Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Data, Informasi Dan Komunikasi; Pekan Olahraga Dan Uji Kompetensi Persatuan Wartawan Indonesia.

Sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah, berbagai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Tabel berikut akan menggambarkan produk hukum yang dihasilkan tahun 2016.

Tabel 4.87.

Jumlah produk hukum yang dihasilkan Tahun 2016

No	Uraian	2016
1	Peraturan Daerah	10 Produk
2	Peraturan Bupati	44 Produk
3	Keputusan Bupati	585 Produk
4	Prolegda	12 buah

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2016

Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan tahun 2016 ini, dari 4 kasus yang ada, 3 kasus yang selesai. Satu sengketa yang masih dalam proses penyelesaian ialah : Masyarakat Rantau Rasau Desa Dusun Sungai Palas Kec. Berbak dengan Masyarakat Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang.

Tabel 4.88.

Penyelesaian Sengketa Lahan

No	Sengketa Lahan	Sengketa	Yang telah diselesaikan	Persentase	Keterangan
1	2016	4	3	75%	sengketa yang belum selesai karena masih dalam proses yaitu : Masyarakat Rantau Rasau Desa Dusun Sungai Palas Kec. Berbak dengan Masyarakat Desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang.

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2016

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2016, selain masih minimnya jumlah personil di Sekretariat Daerah.

4.33. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Lain Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
2. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
3. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
4. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi *staf Pendukung Kepala Daerah*. Pada Tahun 2016, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia melaksanakan 8 program dan 25 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia tertera dalam tabel 4.88 dibawah ini.

Tabel 4.89.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	192.265.400,00	162.088.500,00	(30.176.900,00)	84,30
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	94.934.000,00	81.810.100,00	(13.123.900,00)	86,17
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	28.250.000,00	26.416.370,00	(1.833.630,00)	93,50
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.500.000,00	4.203.000,00	(1.297.000,00)	76,41
6	PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN ANGGOTA KORPRI YANG BERBAKAT DAN BERPRESTASI	74.101.500,00	68.101.500,00	(6.000.000,00)	91,90
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI ORGANISASI HUKUM DI BIDANG KESADARAN HUKUM, KELEMBAGAAN DAN PERATURAN DAERAH	107.560.000,00	-	(107.560.000,00)	**-**
8	PROGRAM KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI	9.465.000,00	-	(9.465.000,00)	**-**
	JUMLAH	535.075.900,00	345.619.470,00	(189.456.430,00)	64,59

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Kerjasama Peningkatan Anggota Korpri Yang Berbakat Dan Berprestasi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan STG Korpri Tingkat Kabupaten;

b. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Organisasi Hukum Di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan Dan Peraturan Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembentukan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH);

c. Program Kerjasama Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Muscab Korpri Tingkat Kabupaten; Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditahun Anggaran 2016 adalah terhadap Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada tahun anggaran 2016 ini tidak terlepas dari implementasi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4.34. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD melaksanakan urusan *Staf Pendukung DPRD*. Pada Tahun 2016, Sekretariat DPRD melaksanakan 7 program dan 41 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat DPRD tertera dalam tabel 4.89 dibawah ini.

Tabel 4.90.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2016

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	9.164.500.800,00	7.899.274.684,00	(1.265.226.116,00)	86,19
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.424.640.253,00	7.119.814.568,00	(304.825.685,00)	95,89
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	468.300.000,00	459.896.917,00	(8.403.083,00)	98,20
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	333.080.200,00	330.465.050,00	(2.615.150,00)	99,21
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	242.750.000,00	220.112.689,00	(22.637.311,00)	90,67
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40.000.000,00	38.920.000,00	(1.080.000,00)	97,30
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	5.907.640.000,00	5.666.324.370,00	(241.315.630,00)	95,91
	JUMLAH	**23.580.911.253,00**	**21.734.808.278,00**	**(1.846.102.975,00)**	92,17

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.** Program ini mempunyai kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama; Rapat-Rapat Paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah. Dalam menjalankan fungsi legeslasinya, pada tahun 2016 ini telah berhasil dihasilkan sebanyak 10 perda.

Dari 7 (tujuh) kegiatan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasinya dibawah 70%, hal ini dikarenakan kurang cermatnya dalam perencanaan Program Kegiatan dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Prolegda yang telah dilakukan pembahasan dan ditetapkan sebagai Perda tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :

TabeL 4.91.

Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2016

NO.	PERATURAN DAERAH		TENTANG	TANGGAL PENETAPAN	PEMRAKARSA
	NOMOR	TAHUN			
1	1	2016	Tata cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	25 Juli 2016	BPMPD/K
2	2	2016	Pemerintahan Desa	25 Juli 2016	BPMPD/K
3	3	2016	Penerbitan dan Pemeliharaan Ternak	25 Juli 2016	Inisiatif DPRD
4	4	2016	Pertanggungjawaban APBD 2015	31 Agustus 2016	DPKAD
5	5	2016	Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas	4 Oktober 2016	Inisiatif DPRD
6	6	2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	4 Oktober 2016	Bagian Organisasi Setda
7	7	2016	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021	12 Oktober 2016	Bappeda
8	8	2016	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016	24 Oktober 2016	DPKAD
9	9	2016	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada PT. Bank Jambi Tahun 2016	22 Desember 2016	DPKAD
10	10	2016	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017	29 Desember 2016	DPKAD

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur

4.35. 11 Kecamatan

Sebelas Kecamatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan

7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kecamatan melaksanakan urusan *Pemerintahan umum* dan *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*. Total program dan kegiatan yang dilaksanakan 11 kecamatan pada tahun 2016 sebanyak 104 program dan 316 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja pada 11 kecamatan tertera dalam tabel 4.91 dibawah ini.

Tabel 4.92.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan
Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016

NO	KECAMATAN	ANGGARAN	REALISASI	+/-	%
1	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	3.093.488.374,05	2.897.756.848,00	(195.731.526,05)	92,87
2	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	1.565.232.137,95	1.561.537.906,00	(3.694.231,95)	95,87
3	KECAMATAN MENDAHARA	1.138.012.162,18	1.109.472.843,00	(28.539.319,18)	96,58
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.302.181.242,96	1.294.923.171,00	(7.258.071,96)	88,68
5	KECAMATAN GERAGAI	1.253.174.488,59	1.221.742.215,00	(31.432.273,59)	90,78
6	KECAMATAN KUALA JAMBI	1.521.149.575,47	1.507.622.150,00	(13.527.425,47)	92,4
7	KECAMATAN DENDANG	1.166.402.163,63	1.159.847.160,00	(6.555.003,63)	84,65
8	KECAMATAN BERBAK	1.161.007.541,77	1.089.335.050,00	(71.672.491,77)	79,73
9	KECAMATAN RANTAU RASAU	1.163.628.815,96	1.158.403.721,00	(5.225.094,96)	94,53
10	KECAMATAN NIPAH PANJANG	1.579.162.850,75	1.572.506.083,00	(6.656.767,75)	94,57
11	KECAMATAN SADU	1.347.198.220,49	1.269.857.700,00	(77.340.520,49)	90,11
	JUMLAH	41.943.339.464,00	38.394.781.198,00	(3.548.558.266,00)	91,54

Sumber : SIPKD DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini berisikan kegiatan penunjang administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air dan listrik, jasa perlengkapan dan peralatan kantor, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini lebih menitikberatkan pada sarana infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas kantor seperti pembangunan, pengadaaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini berisikan kegiatan tentang pengadaan pakaian dinas pegawai di kecamatan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini berisikan tentang penyusunan capaian kinerja dan keuangan kecamatan yang disusun dalam dokumen pelaporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Subtansi dari program ini ialah alokasi anggaran di kelurahan baik untuk operasional/rutin maupun pembangunan di masing-masing kelurahan. Anggaran ini dikelola oleh masing-masing kelurahan yang ada.

f. Program Penyiapan Penataan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil pembangunan yang ada di kecamatan sekaligus rencana pembangunan kedepan termasuk komoditi unggulan di kecamatan tersebut.

g. Program Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Pedesaan

Program ini merupakan program dari kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang mendukung program ini ialah operasional excavator.

h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas gender dan perlindungan kepada anak.

Data Pekerjaan Alat Berat (excavator) Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 4.93.
Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Tahun 2016

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
1	**MUARA SABAK TIMUR**		
	Kelurahan Muara Sabak Ilir	- Pembuatan Tanggul	5 Km
		Sungai Alang-Alang Kanan/Kiri	
		- Pembuatan Tanggul Parit Ibas	4 Km
		- Pembuatan Tanggul Parit Ibas Rt 04 / 05	4 Km
		- Pembuatan Tanggul Parit H asri	4 Km
2	**MUARA SABAK BARAT**		
5	Kel. Parit Culum I	Pembuatan Tanggul dan Pendalaman Parit	± 2,1 KM
6	Kel. Parit Culum II	Pembuatan Tanggul	± 2,3 KM
3	**MENDAHARA**		
	Mendahara Ilir	- Pembuatan Tanggul/Jalan Menuju Lokasi rencana perumahan nelayan dan wisata mangrove	2500 m
		-pembuatan akses jalan baru di parit adong	560 m
		-penimbunan tanggul keliling SMA 7 Mendahara Ilir	750 m
		- Pembuatan Tanggul Keliling Tanah H.Renreng	840 m
4	**MENDAHARA ULU**		
	Pematang Rahim	- Penggalian Kanal	Panjang 8,5 KM
		- Pembuatan Badan Jalan	Panjang 5 KM
	Desa Sinar Wajo	- Penggalian/Pembersihan Kanal	Panjang 4 KM
5	**GERAGAI**		

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
	Lagan Tengah	Normalisasi Parit Sukur dan Pembuatan Tanggul Parit Sukur	2000 M
	Lagan Tengah	Normalisasi Parit Laucing dan Pembuatan Tanggul Parit Laucing	3400 M
	Lagan Tengah	Normalisasi Parit rata dan Pembuatan Tanggul Parit Rata	3600 M
	Pandan Jaya	Steking Halaman Kantor Camat untuk Lapangan Upacara dan Olahraga	1,5 Ha
	Pandan Jaya	Normalisasi Parit dilingkungan Kantor Canmat Geragai	800 M
	Lagan Tengah	Normalisasi Parit Luwuk dan Pembuatan Tanggul Parit Luwuk	3000 M
	Pandan Jaya	Normalisasi Parit SK. Blok D dan Pembuatan Tanggul Parit SK IV Blok D	2000 M
6	**DENDANG**		
	Kota Kandis Dendang	- Pembuatan Tanggul Makam (TPU) Parit 22	500 m
		- Pencucian Parit (Depan Kantor Desa)	200 m
		- Perbaikan Gorong-gorong Parit 21	1 Paket
		- Servis Alat Berat	1 Unit
		- Servis Jalan	200 m
		- Pembuatan Tanggul Perkebunan Parit 23	1500 x 2 m x 1 m
	Koto Kandis	- Pembuatan Tanggul Banjir Pertanian Parit 4	8000 x 4 m x 1,5 m
7	**KUALA JAMBI**		
	Kel. Kampung Laut	- Penimbunan	Panjang 175 M
		- Pembersihan dan Rehab Tanggul	Panjang 506 M
	Desa Manunggal Makmur	- Pembersihan dan Rehab Tanggul	Panjang 6.533 M
		- Pembersihan dan Pembuatan Tanggul	Panjang 647 M
		- Pembuatan Jalan Penghubung antar Desa Manunggal dan Kuala Lagan	Panjang 2.644 M
	Desa Teluk Majelis	- Pembersihan dan Rehab Tanggul	Panjang 3.337 M
	Desa Kuala Lagan	- Pembuatan Jalan Penghubung antar Desa Kuala Lagan dan Majelis Hidayah	Panjang 3.970 M
8	**BERBAK**		
	Kel. Simpang	- Penimbunan Peninggian TPU RW. 01	L 12 M X P 30 M X T 1 M
		- Steking untuk TPU RW. 01	L 30 M X P 50 M
		- Pembuatan Jalan Menuju TPU RW. 01	L 3 M X P 100 M X T 1 M
		- Pelebaran Jalan TPU RW. 01	L 1,5 M X P 150 M X T 1 M
		- Pelebaran Jalan TPU arah Selatan RW. 01	L 2 M X P 100 M X T 1 M
		- Pembuatan Len belakang Lapangan Bola Kaki RW. 01 sebelah timur	L 2 M X P 100 M X T 1 M
		- Pembuatan Len belakang Lapangan Bola Kaki RW. 01 sebelah Utara	L 2 M X P 110 M X T 1,5 M
		- Pembuatan lokasi Tribun Lapangan Bola Kaki RW. 01	L 4 M X P 5 M X T 1 M
		- Pembuatan Parit Cacing Sebelah Barat Lap. Bola Kaki RW. 01	L 1 M X P 100 M X T 20 cm
		- Penimbunan Halaman Mesjid Nurul Huda RW. 01	L 10 M X P 15 M X T 75 cm
		- Pembuatan Tanggul pengaman Banjir di RT. 18	L 3 M X P 600 M X T 1 M
		- Pembuatan Jalan Usaha Tani (JUT) di RW. 04 Dusun Penganyut	L 3 M X P 1000 M X T 1,5 M
	Desa Rantau Makmur	- Pembuatan Jalan Pintas samping Mesjid Muhajir SK. 7 menuju SK 6	L 3 M X P 500 M X T 1 M
		- Peninggian Tanggul di SK. 5	L 3 M X P 2000 M X T 1 M
9	**RANTAU RASAU**		
1	Desa Bangun Karya	Pembersihan Sekunder dan Pelebaran tanggul badan jalan primer menuju patok 40, SK 16 s/d SK. 21	12 Km
2	Harapan Makmur	Pembuatan Tanggul Badan Jalan Lorong dari SK. 10 s/d 16	3 KM
		pembersihan sekunder dan pelebaran badan jalan SK. 11 Patok 80 menuju patok 100	0,75 KM

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
10	**NIPAH PANJANG**		
	Desa Simpang Jelita	pembuatan tanggul Parit 2 Dusun Jelita Kiri	P.1500 M X L 2 M X T 1,5M
		pembuatan tanggul Parit 2 Dusun Jelita Kiri	P.1500 M X L 2 M X T 1,5M
	Desa Teluk Kijing	Pembuatan tanggul Parit Baru Kanan Dusun Makmur	P.1549 M X L 2 M X T 1,5M
		Pembuatan tanggul Parit 1 Kanan Dusun Makmur	P.710 M X L 2 M X T 1,5M
		Cuci parit Gantung Dusun makmur	P.1900 M X L 2 M X T 1,5M
		cuci parit 1 Kanan Dusun Makmur	P 4946 M X L 2 M X T 1,5M
		Cuci parit 2 Kanan Dusun Makmur	P 9510 M X L 2 M X T 1,5M
		Pembuatan tanggul 2 Kanan Dusun Makmur	P 1000 M X L 2 M X T 1,5M
11	**SADU**		
	Parit 4 Kiri Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Pembangunan tanggul pembatas air asin	550
	Parit 4 Kiri Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Pembangunan tanggul pembatas air asin	1450
	Parit 5 Kiri Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Pembangunan tanggul pembatas air asin	500
	Batas Air Hitam Laut- Remau Baku Tuo	Normalisasi Tanggul	2100
	Batas Air Hitam Laut- Remau Baku Tuo	Normalisasi Tanggul	500
	Parit 3 Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Penggalian Parit	1000
	Parit 1 Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Penggalian Parit	2000
	Parit 1 Sungai Rimun Desa Remau Baku Tuo	Penggalian Parit	1000
	Lokasi Cetak Sawah Desa Remau Baku Tuo	Pembuatan tanggul	1000
	Parit 6-8 Arah TNB Desa Remau Baku Tuo	Normalisasi Parit	2300
	Parit 5 dan parit 7 Remau Baku Tuo	Penggalian Parit	2000
	Pantai Sungai Cemara	Pembangunan Jalan Cemara-Labuhan Pering	600

Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.94.

Target dan Realisasi PDRD 10 Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	PDRD		Persen
		Target	Realisasi	
1	Muara sabak Timur	247.292.241	247.292.240	
2	Mendahara	373.136.364	373.136.364	
3	Mendahara Ulu	120.586.207	120.586.207	
4	Geragai	179.073.796	179.073.796	
5	Dendang	164.732.068	164.732.068	
6	Kuala Jambi	66.348.871	66.348.870	
7	Berbak	85.663.635	85.663.635	
8	Rantau Rasau	164.830.305	164.830.304	
9	Nipah Panjang	169.499.401	169.499.401	
10	Sadu	162.675.962	162.675.962	
JUMLAH		**1.084.820.676**	**1.084.820.675**	

Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2016.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut :

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat.
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa.
3. Kepala Daerah memberitahukan Rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
4. Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/Lembaga.
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah.
7. Saldo kas dikembalikan ke kas umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan Perundang–undangan tersebut, disamping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Azas Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

5.1.1. Dasar Hukum

Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah telah diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berisikan penjelasan umum dana Tugas Pembantuan, penganggaran dana Tugas Pembantuan, penyaluran dana Tugas Pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sedangkan pedoman umum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dana Tugas Pembantuan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Dasar hukum dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2016 adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Selama tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan dana Tugas Pembantuan dari beberapa kementerian/departemen teknis sebagai berikut:

a. Kementerian Dalam Negeri.
b. Kementerian Ketenagakerjaan.

5.1.3. Satuan Kerja Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan yaitu :

a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.1.4. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

5.1.4.1. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterima dari 2 kementerian, yaitu :

1. Kementerian Tenaga Kerja Ditjen Pembinaan pengembangan masyarakat melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 nomor : DIPA-026.04.4.109091/2016.

   Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (PPTK) dengan kegiatan antara lain : Infrastruktur Pedesaan Padat Pekerja. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Kerja Mandiri untuk Penciptaan Wirausaha Baru dan; Administrasi Perkantoran. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 905.188.000,0 terealisasi sebesar Rp.891.443.500,- atau 98,48 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah pembuatan jalan dan pembersihan jalan (Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu), Pelatihan pengelolaan hasil perikanan (Kel. Mendahara ilir Kec. Mendahara dan Kel. Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi, Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang, Kel Simbur Naik dan pengelolaan Kelapa/Kopra (Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang).

2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 nomor : DIPA-067.08.4.350161/2016.

   Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan berupa : Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi; Pengembangan usaha di kawasan transmigrasi; Dukungan manajemen dan dukungan dukungan teknis lainnya; serta promosi dan kemitraan. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 829.367.000,- terealisasi sebesar Rp.801.650.000,- atau 96,66 %. Tujuan dari program ini adalah berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing. Keluaran dari kegiatan ini Pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Kawasan KTM Geragai yaitu fasilitas pembangunan kebun buah bertaraf asia, bantuan berupa alat-alat operasional berkebun dan pemasangan konblok halaman gedung pusat bisnis.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan ini adalah :

1. Terbatasnya tenaga personil PNS yang memahami pelaksanaan tugas sebagai petugas pada kegiatan padat karya infrastruktur pedesaan padat pekerja sehingga pelaksanaan tidak dapat langsung dilaksanakan setelah DIPA/POK diterima;
2. Terdapat revisi baik DIPA, maupun POK sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan dilapangan;
3. Pengembangan sarana dan prasana kawasan transmigrasi anggaran APBN masih sangat terbatas dan diberikan secara bertahap, sedangkan dalam penyelesaian pekerjaannya untuk 1 (satu) kegiatan yang sama tidak dapat dianggarkan secara-bersama-sama;

Adapun solusi dalam penyelesaian masalah tersebut adalah :

1. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur pedesaan padat pekerja dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas instansi terkait dalam bantuan tenaga teknis. Untuk masa yang akan datang diharapkan dari kementerian tenaga kerja dan kementerian PDT dan transmigrasi atau dari provinsi untuk dapat mengadakan pelatihan bagi petugas padat karya infrastruktur;
2. Dilakukan percepatan serapan anggaran atas waktu yang tersisa setelah revis DIPA;
3. Melakukan koordinasi terkait usulan kegiatan sumber dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Dinas terkait Provinsi;

5.1.4.2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diterima dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 nomor : SPDIPA-010.08.4.100741/2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Program dan kegiatan dalam tugas pembantuan ini adalah program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu. Besaran alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 747.804.000,- dan terealisasi sebesar 646.067.050,- atau sebesar 86,40%. Keluaran dari kegiatan ini ialah pelayanan perekaman dan dokumen administrasi kependudukan serta pengadaan beberapa kelengkapan pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Waktu Pelaksanaan yang terlalu sempit, waktu efektif hanya berjalan selama 6 bulan;
2. Proses pencairan keuangan ke KPPN Kuala Tungkal cukup jauh dan butuh waktu tempuh yang relatif lama

Solusi kedepan diharapkan adanya percepatan waktu penyampaian DIPA anggaran dan usulan untuk dilakukan KPPN mobile.

5.2. BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Untuk penugasan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2016 dengan memberikan Bantuan Keuangan Desa yang dapat digunakan sebagai belanja pembangunan desa selain belanja rutin desa. Untuk lebih memacu pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan Alokasi Dana Desa menjadi sebesar Rp. 34.871.849.000,-; Dana desa sebesar Rp. 47.202.331.000,-; serta pembagian pajak

daerah dan retribusi sebesar Rp. 1.565.962.003,00. Anggaran untuk desa ini antara lain diperuntukan untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh 73 desa tahun 2016 antara lain :

1. Pembuatan ruang rapat di kantor desa
2. Perbaikan kantor desa
3. Pembangunan/rehab jerambah dan dermaga
4. Pembangunan dan pembuatan jalan setapak dan jalan tanggul
5. Pembuatan pagar dan gapura
6. Pembuatan gorong-gorong
7. Pembuatan sumur bor dan sumur biasa
8. Pembangunan kantor kepala desa
9. Pembangunan dan rehab jembatan
10. Pembangunan posyandu
11. Pembangunan los pasar
12. Pembangunan jalan jerambah beton
13. Pembangunan MCK
14. Pengadaan meubeliur kantor

Adapun realisasi ADD dan Dana Desa tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

ADD Dan Dana Desa Tahun 2016

No	KECAMATAN	ADD		DD	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Muara sabak Timur	4.835.050.964	4.835.050.964	6.596.549.400	6.596.549.400
2	Mendahara	4.318.890.173	4.318.890.173	5.344.594.022	5.344.594.022
3	Mendahara Ulu	3.007.855.163	3.007.855.163	3.941.259.039	3.941.259.039
4	Geragai	3.533.669.780	3.533.669.780	5.060.741.016	5.060.741.016
5	Dendang	2.783.902.947	2.783.902.947	4.022.842.252	4.022.842.252
6	Kuala Jambi	1.732.175.984	1.732.175.724	2.561.715.245	2.561.715.245
7	Berbak	2.436.599.011	2.436.599.011	3.161.349.912	3.161.349.912
8	Rantau Rasau	3.803.401.458	3.803.401.458	5.024.068.539	5.024.068.539
9	Nipah Panjang	3.479.205.982	3.479.205.982	4.985.108.876	4.985.108.876
10	Sadu	4.036.076.226	4.036.076.226	5.279.552.238	5.279.552.238
JUMLAH		**18.479.369.027**	**18.479.369.027**	**24.965.985.729**	**24.965.985.729**

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016. Secara umum Bab ini terdiri dari kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dan keuangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki, dimana secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada baik oleh badan, dinas, bagian maupun unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara operasional, tugas umum pemerintahan daerah dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dimaksudkan agar masing-masing daerah dapat leluasa dalam mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menciptakan berbagai terobosan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan berbagai potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan suatu daerah tidak dapat mengasingkan diri dan terlepas dari daerah yang lain. Suatu daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara global baik perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, maupun perkembangan di bidang-bidang yang lain. Guna mengantisipasi hal tersebut dan mempertahankan eksistensinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain maupun dengan pihak- pihak lainnya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Dengan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kerjasama antar daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa kebijakan daerah telah ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan keserasian/sinergitas hubungan antar dan inter lembaga pemerintahan daerah, terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar daerah, mantapnya koordinasi pemerintahan, terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, terbangunnya sistem informasi dan komunikasi daerah yang mudah, aktual dan terpercaya.

Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kerjasama ini berupa penentuan tapal batas sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun output dari kegiatan kerjasama ini ialah kesepakatan tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten tetangga dan rencana pembangunan diwilayah perbatasan.

6.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerjasama antar daerah, yaitu : efisisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, menyatakan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah

departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, seperti yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Adapun kerjasama dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain :

1. **Kerjasama dengan Perguruan Tinggi**

   Universitas Jambi

   Kerjasama dengan Universitas Jambi berupa pembukaan program Diploma 3 kelautan dan Perikanan kampus Muara Sabak, berupa bantuan operasional dari Pemda.

   Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.

2. **Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI**

   Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian pertanggungjawaban pada aspek manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 050/968/DATA/BAPPEDA dan Nomor PRJ-5118/PW05/2007.

3. **Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan**

   Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebegai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan RI (BPK-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 188/NK/X-XIII.2/11/2012 dan Nomor 180/04/HKM/2012.

4. **Kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jambi**

   Dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel maka sejak tahun ini telah diterapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara online dalam rangka

mempersiapkan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Pada tanggal 24 September 2014, telah pula ditandatanganin Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) mengenai Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor NK-6/WBP.06/2014 dan Nomor 900/2474/DPKAD/2014.

5. **Kerjasama dengan Perusahaan Migas Petrochina Jabung Ltd.**

   Dalam rangka mewujudkan kewajiban perusahaan berupa *Cooporate Social Responsibility* (CSR), ada beberapa program dari Petrochina Jabung Ltd. tahun fiskal 2016, antara lain : Pelatihan Petani lokal dalam pengembangan pupuk organik; Pelatihan peningkatan kapasitas guru; Pengadaan fasilitas perpustakaan keliling (dalam proses pengadaan); Program pengembangan kapasitasn guru menggunakan modul kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi; Pembangunan fasilitas air bersih Fase V; Study peningkatan kapasitas program; Penyediaan fasilitas Toilet portable 4 unit.

6. **Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk**

   Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam hal pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi (*e-government*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui MoU No.050/393/Eko/Bappeda, dan No.HK.840/DES-U01/2008 pada tangal 21 Oktober 2008. Sampai dengan tahun 2016 ini pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi informasi (*e-government)* sudah dapat diimplementasikan secara bertahap ditengah keterbatasan sarana prasarana termasuk kapasitas bandwith yang tersedia dan jaringan pembangunan jaringan Optik.

7. **Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi**

   Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah daerah berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada bulan Maret lalu, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor Pemda:973/845/131/DPKAD/2014 dan Nomor Bank Jambi:33.12/PKS.DIR/2012. Kerjasama ini diadakan untuk penerimaan pembayaran serta penatakelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. **Kerjasama Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)**

   Kerjasama Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Layanan Informasi Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nomor : KS.302/023/KB/IX/2015 dan nomor : 181/7/HKM/2015.

   Adapun inti dari perjanjian kerjasama tersebut adalah kesepakatan tentang Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan Peralatan Pemantau Kualitas Udara Partikulat PM 2,5. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2015.

   Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan lahan, listrik dan jaringan komunikasi milik Pihak Kedua yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan milik BMKG Pusat tepatnya di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan Pihak Kesatu menyiapkan peralatan pemantauan kualitas udara partikulat PM 2,5, komputer PC, UPS 650VA, UPS 4000VA, panel outdoor, dan shelter empat persegi. Para pihak secara bersama-sama berkewajiban menjaga kesinambungan operasional peralatan Kualitas Udara partikulat PM 2,5 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

9. **Kerjasama Dengan PT. Fireli**

   Kerjasama Dengan PT. Fireli tentang Training dan Workhsop Pembekalan Persiapan Masa Pensiun BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

10. **Kerjasama Dengan Millennium Challenge Corporation (MCC)**

    Kerjasama dengan *Millennium Challenge Corporation* (MCC) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat (*Milllennium Challenge Account* - Indonesia) dengan Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 13/NK.GUB/BAPPEDA/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Program *Compact* Proyek Kemakmuran Hijau di Provinsi Jambi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam.

11. **Kerjasama dengan Bank Indonesia**

    Kerjasama dilakukan dalam bentuk pengembangan klaster padi di desa bangun karya Kecamatan Rantau Kecamatan Berbak.

12. **Kerjasama dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi**
    Kerjasama Pembangunan Kebun Buah Skala Orchard dalam rangka mendukung program revolusi orange.
13. **Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian**
    Kerjasama Pembangunan Taman Teknologi Pertanian yang berlokasi di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) desa Kota Baru Kecamatan Geragai.

6.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH

Koordinasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2016 adalah koordinasi institusional. Kegiatan koordinasi yang dilakukan mampu secara efektif mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama dan kesepakatan bersama.

Beberapa koordinasi utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Koordinasi dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
4. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
5. Koordinasi dengan perangkat pusat di daerah dan instansi vertikal lainnya seperti BPS Kabupaten, BMKG, Balai Taman Nasional Berbak dan BPN Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat utama dan strategis dilakukan oleh Bupati Tanjung jabung Timur bersama-sama dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta perangkat daerah yang terkait. Bersama dengan para pimpinan wilayah, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), sedangkan dengan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif.

Rapat Forkompimda yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik kepada instansi vertikal di tingkat provinsi maupun dengan berbagai kementerian teknis terkait.

Koordinasi dengan kementerian yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2016 adalah dengan Kementerian Sosnakertrans melalui Program Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) atau dikenal dengan KTM (Kota Terpadu Mandiri). PPID merupakan salah satu instrumen mempercepat pembangunan dan kemakmuran suatu daerah yang tertinggal. Instrumen ini menitikberatkan pada percepatan suatu daerah dengan mengintegrasi beberapa sub kawasan dengan segala potensi dan peluang yang tersedia sehingga menjadikannya suatu kawasan pusat pertumbuhan dengan beberapa kota penyangga. Keterpaduan dan keselarasan yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan gairah perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli masyarakat hingga tercapai tingkat kesejahteraan dan kemandirian yang diinginkan.

Di sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Koordinasi dengan TNI AD dalam rangka pengawalan pencapaian peningkatan produksi Tanaman Pangan kegiatan USUS PAJALE, selanjutnya koordinasi dengan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi jambi dan Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pembangunan pertanian. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Sungai Sumatera VIII, DINAS Pekerjaan Umum tetang penentuan lokasi dan kedalaman pembangunan irigasi. Dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan mempertahankan Lahan Pertanian Berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/kota sebagai lembaga

koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota.

Disektor peternakan, koordinasi dilakukan dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTUHMT) Padang Mangatas dengan tujuan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka mengembangkan Balai Pembibitan Ternak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Disektor Perikanan dan Kelautan, koordinasi dilakukan dengan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dengan tujuan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan Balai Penelitian tehnik dan Pertanian Jambi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Peertanian, Kementerian Pertanain untuk percepatan pembangunan pertanaian dan kawasan perbatasan dan lahan sub optimal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya koordinasi dilakukan dengan Balai Sungai Sumatera VIII, Kementerian Pekerjaan Umum dalam perencanaan dan penentuan lokasi pengairan, irigasi/tanggul. Berikutnya koordinasi juga dilakukan dengan Ballai konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan, dalam penentuan trace jalan yang berdekatan dengan Taman Nasional Berbak.

Di sektor perkebunan dan kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional yang diwujudkan dala pemanfaatan/perluasan taaruang lahan perkebunan dan kawasan kehutanan. koordinasi Juga dilakukan dengan manggala agni tentang penanggulangan kebakaran hutan. Selain itu koordinasi juga dilakukan dengan kehutanan provinsi Jambi tentang pengamanan, perlindungan hutan dan peredaran hasil hutan, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Di sektor penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan program MP3KI dengan tujuan akselerasi pengurangan kemiskinan dan program MP3EI dengan tujuan akselerasi pertumbuhan dengan pemerataan (*Growth with Equity*).

Di sektor Kabudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan koordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional dengan kegiatan Pembebasan Lahan Situs Purbakala yang ada dikabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya juga melakukan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kementerian Kehutanan dalam peningkatan Objek wisata yang berwawasan lingkungan dan objek wisata hutan mangrove (bakau) yang berada

ditaman berbak. Selain itu juga mengadakan kerjasama dengan Lembaga Lingkungan Hidup dalam kegiatan berupa penanaman penghijauan hutan mangrove yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di sektor Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan koordinasi Badan Koordinasi Penanaman modal RI terkait dengan penyelenggaraan perizinan penanaman modal. Selanjutnya juga melakukan koordinasi Kementerian kehutanan terkait dengan penetapan peta kawasan hidrologis gambut (KHG). Selain itu juga mengadakan koordinasi dengan badan pertanahan nasional (BPN) terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang membutuhkan risalah pertimbangan teknis pertanahan. Koordinasi juga dilakukan dengan Taman Nasional Sembilan dan Berbak terkait dengan batas Taman Nasional Sembilan dan Berbak. Selanjutnya koordinasi juga dilakukan dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam terkait dengan rekomendasi atas penyelenggaraan perizinan.

Di sektor Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi dengan tujuan terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sektor Infrastruktur, dilaksanakan kerjasama dengan Kodim 0419 dalam upaya membuka keterisoliran daerah melalui pembangunan jalan dari Simpang Pala Tuang menuju Desa Sungai Tawar Kecamatan Mendahara.

Di sektor tata kelola pemerintah, kerjasama dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Muara Sabak melalui Tim Pengawas 4B

Disektor keamanan, dilaksanakan kerjasama kejaksaan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

6.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ancaman bencana berupa: bencana banjir, kebakaran, gelombang pasang dan bencana angin badai puting beliung, disamping pengaruh potensi bencana kabupaten lain di provinsi Jambi berupa gempa bumi, pada tahun 2016 hanya mengalami tiga jenis bencana alam dari lima jenis potensi bencana alam di kabupaten ini

1. **Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam. Berikut kejadian/bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2016 :

a. Bencana Angin Puting Beliung :
   - Desa Mendahara Tengah Kec.Mendahara sebanyak 44 unit (11 juli 2016)
   - Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur sebanyak 16 unit (28 Agustus 2016)

b. Bencana kebakaran bangunan rumah penduduk :
   - SK II Dusun. Karya Mulya RT. O2 Desa Rantau Rasau II Kec. Rantau rasau sebanyak 1 unit (1 April 2016)
   - Jl. Merdeka RT. 01 RW. 10 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang sebanyak 1 unit (6 April 2016)
   - RT. 08 RW. 04 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang sebanyak 1 unit (3 Agustus 2016)
   - RT. 02 & 03 Kel. Ma. Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur sebanyak 10 unit (12 September 2016)
   - Kel. Simpang Kec. Berbak sebanyak 2 unit (31 Oktober 2016)

c. Bencana kebakaran lahan dan hutan
   - Muara Sabak Barat
     - Kel. Parit Culum I seluas 1,5 Ha (Lahan Masyarakat)
     - Kel. Nibung Putih seluas 2 Ha (Lahan Masyarakat)
     - Kel. Parit Culum I seluas 1,5 Ha (Lahan Masyarakat)

2. **Status Bencana**

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah banjir, kebakaran, angin puting beliung dan tanah longsor dan masih berstatus bencana lokal, terkecuali bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap status bencananya dinaikan menjadi bencana nasional.

3. **Pembiayaan dan Anggaran**

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2016, baik bencana banjir, kebakaran, angin puting beliung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA OPD teknis terkait dan pos pembiayaan dana tidak terduga pada PPKD.

4. Antisipasi Daerah

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Disamping itu penanganan terhadap kejadian bencana baik dari sebelum dan sesudah terjadinya bencana, sangat diperlukan adanya program serta koordinasi antar stakeholder/instansi terkait dalam penanganan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membuat program kegiatan antara lain:

a. Pembentukan satgas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
b. Koordinasi dengan kecamatan untuk pembuatan posko-posko bencana
c. Mengadakan pelatihan terhadap satgas PBP tentang penanggulangan bencana baik dari sebelum maupun sesudah terjadi bencana
d. Penyebaran informasi serta himbauan kepada masyarakat akan gejala-gejala terjadi bencana dan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian bencana
e. Koordinasi antar stakeholder/instansi terkait dalam penyamaan langkah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
f. Mengadakan sarana dan prasarana untuk evakuasi korban bencana alam.

Selanjutnya beberapa SKPD terkait telah pula mengantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya bencana seperti : Dinas Sosnakertrans, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.

5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain :

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
b. Dinas Sosnakertrans bidang pemberian bantuan (Bansos)

c. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan pada bidang penanggulangan kebakaran

d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

e. Pekerjaan Umum

f. Dinas Kesehatan

6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan juklak dan juknis dalam penanganannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk pertengahan tahun 2015.

6.5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap aparat trantib guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan hukum dan trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah.

1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa.

   Wujud pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa antara penyelenggaraan FMD (fisik, mental, dan displin), bela diri dan pelatihan korsik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Output dari kegiatan ini diharapkan anggota tidak hanya memiliki fisik yang kuat tetapi juga memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan mental baik.

2. Kegiatan penertiban Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah

   Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Sasaran dari kegiatan diprioritaskan kepada penertiban kepada Peraturan Daerah yang berhubungan dengan ketertiban umum dan aset-saet daerah.

BAB VII
PENUTUP

Bab ini memuat kata akhir dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Kembali ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan perwujudan dan tekad dari setiap Kepala Daerah untuk menuju pada kepemerintahan yang baik *(good governance)*. Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 merupakan produk manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terus berkembang, LKPJ ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan manajemen pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Akhirnya, kami beserta segenap aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengharapkan agar LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Terima kasih

Muara Sabak, Maret 2017

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO, SE